

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN *SUSTAINABLE LIVELIHOOD*
TERHADAP VARIASI CAPAIAN PDRB PER KAPITA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

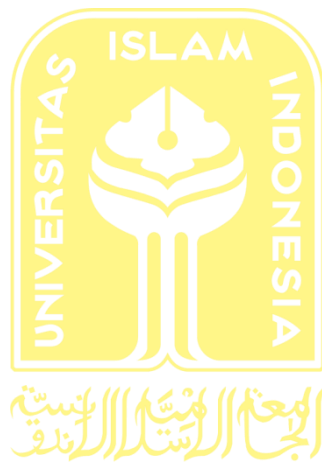
Diajukan untuk menyusun tesis S-2 dalam Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Ekonomi



Diajukan oleh Rizqa Dyah Qurniawati 23918029

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 26 Maret 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Akhsyim Afandi', is placed above the name.

Drs. Akhsyim Afandi, M.A., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta,.....



Rizqa Dyah Qurniawati

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis
yang disusun oleh :

RIZQA DYAH QURNIAWATI

No. Mhs. : 23918029

Konsentrasi : Ekonomika Kebijakan Publik

Dengan Judul:

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD TERHADAP
VARIASI CAPAIAN PDRB PER KAPITA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**



Penguji I

Drs. Akhsyim Afandi, M.A., Ph.D.

Penguji II

Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waramahtullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Pengaruh Kebijakan *Sustainable Livelihood* Terhadap Variasi Capaian PDRB Per Kapita Di Provinsi Jawa Tengah”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi & Keuangan pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi dalam proses penyusunan tesis ini.
3. Keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan tesis ini.
4. Teman-teman Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunungkidul yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan tesis ini.
5. Teman-teman Magister Ilmu Ekonomi Angkatan 28 yang selalu memberikan semangat, saling mendukung dan berbagi pengalaman selama masa studi dan penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa studi.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apa pun selama penyusunan tesis ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan.

Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak yang berkepentingan serta menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, Maret 2026

Penulis



Rizqa Dyah Qurniawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	8
2.1.2 Teori Fiskal Federalisme.....	9
2.1.3 Teori <i>Transfer Dependency</i>	10
2.1.4 Teori <i>Keynesian Fiscal Policy</i>	12
2.1.5 Teori <i>Neoclassical Growth</i>	13
2.1.6 Teori <i>Endogenous Growth</i>	14
2.1.7 Teori <i>Classical Labor</i>	15
2.1.8 Teori <i>Schumpeterian Innovation</i>	16
2.1.9 Konsep <i>Sustainable Livelihood</i>	17
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	28
2.4 Hipotesis Penelitian	30
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1 Populasi dan Sample	32
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	33
3.3.1 Definisi Operasional	33

3.3.2 Pengukuran Variabel.....	37
3.4 Metode Analisis	40
3.5 Pendekatan Model Regresi Data Panel	41
3.5.1 Pendekatan Regresi Data Panel dengan Common Effect Model (CEM).....	41
3.5.2 Pendekatan Regresi Data Panel dengan Fixed Effect Model (FEM).....	42
3.5.3 Pendekatan Regresi Data Panel dengan Random Effect Model (REM)	42
3.6 Uji Pemilihan Model Regresi Panel.....	43
3.6.1 Uji Chow.....	43
3.6.2 Uji Lagrange Multiplier (LM).....	44
3.6.3 Uji Hausman	45
3.7 Pengujian Hipotesis	46
3.7.1 Uji Asumsi Klasik.....	46
3.7.2 Uji Statistik	49
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Analisis Deskriptif Variabel.....	53
4.1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto	53
4.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	57
4.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	61
4.1.4 Belanja Pemerintah Daerah.....	64
4.1.5 Penanaman Modal Dalam Negeri	68
4.1.6 Penanaman Modal Asing	70
4.1.7 Angkatan Kerja	73
4.1.8 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	77
4.1.9 UMKM Pengguna Internet.....	79
4.1.10 Analisis Statistik Variabel.....	82
4.2 Analisis Data Panel	83
4.2.1 Estimasi Model Regresi Panel	83
4.2.2 Teknik Penaksiran Model	90
4.3 Pengujian Hipotesis Penelitian.....	95
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	95
4.3.2 Uji Statistik Parsial (Uji t).....	99
4.3.3 Uji Statistik Simultan (Uji F)	101

4.3.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2).....	102
4.4 Pembahasan.....	103
4.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	103
4.4.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	105
4.4.3 Belanja Pemerintah Daerah.....	107
4.4.4 Penanaman Modal Dalam Negeri	108
4.4.5 Penanaman Modal Asing	109
4.4.6 Angkatan Kerja	111
4.4.7 Usaha Mikro Kecil dan Menengah	112
4.4.8 UMKM Pengguna Internet.....	113
4.4.9 UMKM Pengguna Internet di Kota.....	114
4.4.10 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat (PTPP), Belanja Pemerintah Daerah (BPD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Angkatan Kerja (AK), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), UMKM pengguna internet (IT), dan UMKM Pengguna Internet di wilayah kota (KOTA_IT) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB)	115
5.1 Kesimpulan	117
5.2 Implikasi	119
5.3 Saran	123
5.4 Keterbatasan Penelitian.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1 Variabel Penelitian.....	38
Tabel 4.1 Statistik Variabel.....	82
Tabel 4.2 Hasil estimasi PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK dengan <i>Common Effect</i> , <i>Fixed Effect</i> , dan <i>Random Effect</i>	84
Tabel 4.3 Hasil estimasi PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT dengan <i>Common Effect</i> , <i>Fixed Effect</i> , dan <i>Random Effect</i>	87
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK	91
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT	92
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK.....	92
Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT	93
Tabel 4. 8 Hasil Model Fixed Effect PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT	94
Tabel 4. 9 Uji Multikolinearitas Model Fixed Effect PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT	97
Tabel 4. 10 Uji Heteroskedastisitas Model Fixed Effect PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT	98
Tabel 4. 11 Uji Autokorelasi Model Fixed Effect PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 PDRB Per Kapita Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah.....	2
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Hubungan Antar Variabel	30
Gambar 4. 1 Grafik PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023.....	54
Gambar 4. 2 Grafik PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023	57
Gambar 4. 3 Grafik PTPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023	62
Gambar 4. 4 Grafik BPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023	65
Gambar 4. 5 Grafik PMDN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023.....	68
Gambar 4. 6 Grafik PMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023	71
Gambar 4. 7 Grafik AK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023	74
Gambar 4. 8 Grafik Jumlah UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 s.d 2023.....	77
Gambar 4. 9 Grafik Jumlah UMKM Pengguna Internet (IT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 s.d 2023.....	80
Gambar 4. 10 Diagram Uji Normalitas Model <i>Fixed Effect</i> PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT	96

ABSTRAK

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah. Variasi capaian PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui PDRB serta mendalami evaluasi kebijakan *sustainable livelihood* yang diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menerapkan model regresi data panel yang menggabungkan data deret waktu (tahun 2017–2023) dengan data lintas wilayah (35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah) menggunakan program Eviews 10.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel UMKM tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita. Sedangkan variabel Angkatan Kerja menjadi variabel paling dominan dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Secara simultan semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita. Analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat menjelaskan PDRB per kapita sebesar 99,4% sedangkan 0,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model seperti IPM, tingkat kemiskinan, dan kualitas infrastruktur. Pemerintah perlu membangun ekosistem pendukung yang lebih lengkap, seperti penyediaan pusat pelatihan keterampilan digital, pendampingan dalam pengelolaan toko daring, fasilitasi akses ke *marketplace* nasional maupun internasional, serta perbaikan layanan logistik dan sistem pembayaran digital

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh Angkatan Kerja. Implikasi temuan pada penelitian ini bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yaitu pemerintah perlu mengarahkan fokus pada pengembangan

UMKM yang benar- benar berkualitas melalui program pembinaan UMKM unggulan yang menekankan penguatan kemampuan manajerial, kemudahan akses pembiayaan, peningkatan standar kualitas produk, serta dukungan perluasan pasar. Dengan cara tersebut, UMKM diharapkan tidak hanya bertambah secara jumlah, tetapi juga mampu memberi kontribusi yang lebih nyata terhadap peningkatan PDRB per kapita.

Kata kunci: *sustainable livelihood*, PDRB per kapita, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Belanja Pemerintah Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, UMKM, UMKM Pengguna Internet

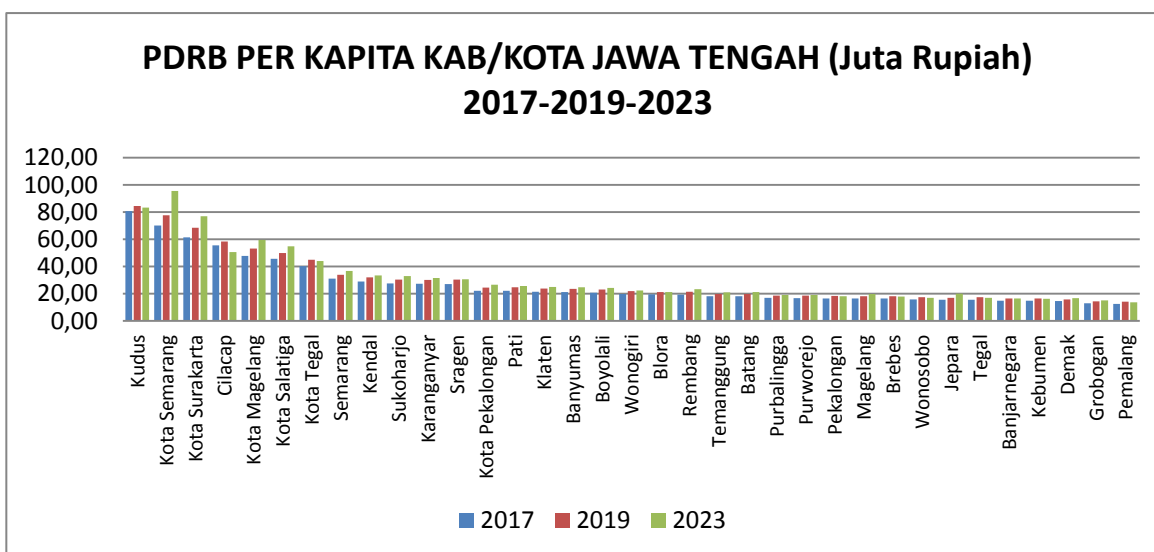
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi pekerjaan rumah yang tiada habisnya dari dekade ke dekade untuk terus diperjuangkan. Berbagai kebijakan telah dirumuskan untuk mencapai suatu target dalam mensukseskan ekonomi rakyat. Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, kebijakan penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) telah direncanakan dan diimplementasikan dalam jangka waktu 5 tahun (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) September 2024, Provinsi Jawa Tengah masih mencatat 3,40 juta orang yang masuk dalam kategori miskin, dengan garis kemiskinan rata-rata sebesar Rp 521.093 per kapita per bulan. Kondisi ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar kedua secara absolut di Pulau Jawa. Hal ini juga memunculkan pertanyaan mengenai program strategi kebijakan terkait dengan penguatan *sustainable livelihood*, di mana kebijakan tersebut fokus pada usaha peningkatan ekonomi dalam aspek pemberian modal, peningkatan teknologi, pasar, dan manajemen usaha terkait *start up* wirausaha baru, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019).



Gambar 1.1 PDRB Per Kapita Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah

Data perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya variasi dalam pemerataan ekonomi. Selain fakta sebelumnya yang mengungkapkan masih banyaknya warga miskin di wilayah Provinsi Jawa Tengah, data tersebut juga menggambarkan bahwa distribusi ekonomi belum merata dengan baik, sehingga belum mampu mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Pada periode 2017 hingga 2023, distribusi kontribusi PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus mencapai nilai tertinggi. Data PDRB per kapita di tiap kabupaten atau kota di provinsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai variasi kondisi ekonomi antar wilayah. Untuk memahami perbedaan tingkat kesejahteraan tersebut, para pembuat kebijakan perlu menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi variasi capaian PDRB per kapita antar daerah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman

Modal Asing (PMA), serta Belanja Pemerintah Daerah (BPD). Pada penelitian yang dilakukan Hikmatiyar & Hayati (2011) pengaruh PMDN, PMA, dan jumlah angkatan kerja berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian oleh Rahman & Chamelia (2015), di Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa PAD dan belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB karena faktor-faktor seperti penerimaan PAD yang tidak optimal dan pengelolaan belanja daerah yang kurang fokus, sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Sementara Albasyari & Priyadi (2023) memperluas pendekatan dengan menggunakan data panel lintas kabupaten/kota di Jawa Tengah. Meskipun kajian-kajian ini memberikan pemahaman penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi output regional, sebagian besar penelitian masih terbatas pada analisis parsial dan belum secara komprehensif menggabungkan variabel fiskal lokal seperti pendapatan asli daerah, belanja pemerintah daerah, serta investasi dan angkatan kerja secara simultan dalam satu model empiris yang sama.

Variasi capaian PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah mendorong fokus penelitian ini pada ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas ketimpangan dan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui PDRB belum mendalami evaluasi kebijakan *sustainable livelihood* yang diterapkan dengan tujuan mencapai pemerataan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Evaluasi kebijakan ini dipilih karena relevansinya dengan masalah sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan pemerataan capaian PDRB per kapita antar kabupaten di provinsi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan sebuah model

yang menggabungkan kelima variabel tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang faktor-faktor yang memengaruhi PDRB per kapita di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam menganalisis kebijakan penguatan *sustainable livelihood* dan pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia dan pemerataan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah UMKM memberikan kontribusi terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah jumlah UMKM Pengguna Internet memberikan kontribusi terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
5. Bagaimana Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
6. Bagaimana Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
7. Bagaimana Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
8. Bagaimana Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh terhadap variasi capaian PDRB per

kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?

9. Bagaimana jumlah UMKM, UMKM pengguna internet, Pendapatan Asli Daerah , Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Belanja Pemerintah Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Jumlah Angkatan Kerja memberikan kontribusi secara simultan terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi dari suatu praktik kebijakan ekonomi *sustainable livelihood* yang mempengaruhi juga pemerataan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah jumlah UMKM memberikan kontribusi terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Menganalisis apakah jumlah UMKM pengguna internet memberikan kontribusi terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Menganalisis bagaimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Menganalisis bagaimana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
5. Menganalisis bagaimana Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
6. Menganalisis bagaimana Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?

7. Menganalisis bagaimana Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
8. Menganalisis bagaimana Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?
9. Menganalisis bagaimana jumlah UMKM, UMKM pengguna internet, Pendapatan Asli Daerah , Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Belanja Pemerintah Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Jumlah Angkatan Kerja memberikan kontribusi secara simultan terhadap variasi capaian PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi berbasis *sustainable livelihood*.
2. Manfaat Praktis: Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merumuskan dan memperbaiki kebijakan pembangunan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Menguraikan teori-teori yang relevan, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III : Metodologi Penelitian

Menjelaskan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Menyajikan hasil penelitian di lapangan dan pembahasannya berdasarkan teori dan data empiris.

BAB V : Penutup

Memuat kesimpulan, implikasi, dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah mencerminkan sejauh mana daerah tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan warganya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Todaro dan Smith, pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal, investasi, tenaga kerja, serta produktivitas sektor-sektor unggulan (Meyer et al., 2017). Dalam kerangka otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana transfer dari pemerintah pusat menjadi sumber utama dalam membiayai pembangunan.

PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh berbagai unit usaha di sebuah wilayah tertentu, seperti provinsi atau kabupaten/kota, dalam kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (2025) "PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah/ wilayah dalam periode tertentu". PDRB adalah pengembangan dari konsep Produk Domestik Bruto (PDB) yang biasanya mengukur total output nasional, namun dalam PDRB pengukuran ini diterapkan secara spesifik pada tingkat daerah atau wilayah tertentu.

Secara teori, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berperan sebagai alat utama untuk memahami dinamika ekonomi di tingkat wilayah. PDRB mengadopsi kerangka

makroekonomi nasional ke konteks daerah atau regional, dan menjadi dasar penting dalam analisis kebijakan pembangunan daerah. Namun, agar kebijakan yang dibuat tidak keliru, interpretasi terhadap PDRB perlu dilakukan dengan cermat, dengan memperhatikan aspek distribusi, sosial, serta faktor spasial yang ada.

2.1.2 Teori Fiskal Federalisme

Teori *Fiskal Federalisme* yang dikemukakan Richard Musgrave (1959), Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peran penting dalam menentukan perkembangan ekonomi suatu daerah. Semakin besar PAD yang dimiliki, semakin banyak pula dana yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta mendukung berbagai aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Investasi pada sektor-sektor ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, produktivitas di daerah pun akan meningkat. Oleh karena itu, kenaikan PAD secara langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, karena mampu meningkatkan daya saing dan efisiensi ekonomi setempat. PAD tidak hanya menunjukkan kemampuan fiskal suatu daerah, tetapi juga menjadi pendorong utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dalam Teori *Fiskal Federalisme* pendapatan di berbagai tingkatan pemerintahan diterapkan di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dalam sistem ini, setiap wilayah mulai dari tingkat terendah seperti kabupaten atau kota hingga tingkat yang lebih tinggi seperti provinsi, memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Prasetya, 2012). *Fiskal Federalisme* merupakan metode pengelolaan keuangan negara yang melibatkan beberapa fungsi utama,

seperti pengumpulan pendapatan, peminjaman dana, serta penggunaan anggaran untuk mendukung pendapatan daerah dalam sistem federal. Artinya, ini merupakan cara untuk meningkatkan keuangan daerah dengan memberikan pinjaman untuk tujuan tertentu kepada entitas terkait, sekaligus mengalokasikan dana untuk kegiatan yang bertujuan mendorong pertumbuhan (Anderson, 2010). Teori *Fiskal Federalisme* berkaitan erat dengan sistem desentralisasi yang ada di Indonesia, di mana pengelolaan ekonomi masyarakat di tingkat kabupaten atau kota menjadi tanggung jawab langsung dari pemerintah daerah tersebut.

Selain itu, teori ini juga menyoroti pentingnya tiga fungsi utama dalam pengelolaan keuangan publik di berbagai level pemerintahan, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Fungsi distribusi berfokus pada upaya pemerataan pendapatan melalui kebijakan fiskal yang adil, sementara fungsi stabilisasi bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Di Indonesia, penerapan teori ini bisa dilihat dari mekanisme transfer dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan pemerintah pusat ke daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

2.1.3 Teori *Transfer Dependency*

Teori *Transfer Dependency* yang dikemukakan oleh Bahl & Martinez-Vazquez (2022) merupakan teori yang berkaitan dengan ketergantungan pemerintah daerah pada dana bantuan dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat mempengaruhi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melemahkan akuntabilitas fiskal di tingkat

lokal, serta berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran dan risiko *moral hazard* (Eyraud & Lusinyan, 2011). Padahal pengelolaan suntikan dana dari pemerintah pusat sangat menentukan implikasi dalam pembangunan daerah, penyerapan yang sempurna akan menghasilkan dorongan besar terhadap inovasi yang sesuai dengan keadaan ekonomi daerah. Selain itu, cara pengelolaan dana bantuan dari pemerintah pusat sangat berperan dalam menentukan hasil pembangunan daerah. Penyerapan dana yang maksimal dapat mendorong munculnya inovasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi ekonomi daerah.

Berbagai faktor yang mengimplikasikan pertumbuhan ekonomi dari daya serap dana pemerintah daerah yang berasal pemerintahan pusat antara lain dampak marginal dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan tidak bisa sepenuhnya dipisahkan dari faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan. Selanjutnya dampak desentralisasi fiskal akan berdampak tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan akan ada dampak keterlambatan pertumbuhan ekonomi yang belum terdeteksi.

Dana Alokasi Umum (DAU) berperan sebagai solusi untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, karena bantuan dana dari pemerintah pusat ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan pelaksanaan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama yang dialokasikan untuk sektor infrastruktur dan sumber daya manusia, memiliki dampak signifikan dalam menurunkan ketimpangan di wilayah tersebut. Keberhasilan ini juga sangat bergantung pada sejauh mana dana DAK diserap dan digunakan secara efisien untuk kebutuhan pengurangan ketimpangan (Wardhana et al., 2013).

Dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, terutama melalui belanja modal yang dapat mempengaruhi PDRB. Program Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) memberikan dukungan finansial kepada daerah untuk meningkatkan produktivitas sumber daya yang dimiliki, sehingga pada akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Muhammad Hasan, 2015). Oleh sebab itu, agar pemerataan ekonomi di setiap daerah bisa tercapai, penting untuk mengenali kebutuhan spesifik di masing-masing daerah. Dengan memahami kebutuhan tersebut, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia dapat difokuskan secara tepat, sehingga dampaknya bisa optimal bagi pertumbuhan dan kemajuan daerah.

2.1.4 Teori *Keynesian Fiscal Policy*

Teori *Keynesianisme* yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, menyatakan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menganggap pasar bebas akan menciptakan stabilitas secara otomatis, *Keynesianisme* menekankan bahwa intervensi pemerintah diperlukan. Kebijakan fiskal, seperti meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak, dapat memberikan dampak positif dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara (Indah et al., 2023).

Belanja pemerintah daerah (BPD) berperan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi karena dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan sumber daya manusia yang mendukung proses pembangunan. Intervensi dari pemerintah daerah ini memiliki dampak positif bagi kelangsungan perekonomian setempat, di mana semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan, semakin tinggi pula laju

pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai (Saputra et al., 2021).

Dalam kerangka *Keynesian Fiscal Policy*, belanja pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga dianggap sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan kapasitas produksi daerah. Peningkatan anggaran di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperbaiki konektivitas antarwilayah. Dampak dari hal ini menciptakan efek berganda (*multiplier effect*), di mana peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong konsumsi masyarakat, menarik investasi dari sektor swasta, serta membuka lebih banyak lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang tepat di tingkat daerah tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam pemerataan pembangunan antarwilayah serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

2.1.5 Teori *Neoclassical Growth*

Teori *Neoclassical Growth* yang diperkenalkan oleh Robert Solow menyoroti tiga faktor utama dalam mendorong perkembangan ekonomi, yaitu akumulasi modal, peningkatan jumlah tenaga kerja, dan penerapan teknologi (Meyer et al., 2017). Model Solow tidak bisa dianggap berdiri sendiri secara parsial. Misalnya, penambahan modal tidak selalu langsung meningkatkan produktivitas, bahkan bisa saja menambah biaya sehingga mengurangi keuntungan usaha. Hal yang sama juga berlaku untuk tenaga kerja dan teknologi. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut lebih menekankan pada pentingnya pemanfaatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai upaya menjaga keberlanjutan ekonomi daerah. Tidak meratanya capaian PDRB per kapita yang terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya akumulasi modal, melainkan

juga sangat terkait dengan faktor pembangunan manusia dan pemerataan akses teknologi.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha domestik di wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan modal dari dalam negeri. Namun, konsentrasi investasi yang hanya terpusat di beberapa wilayah tertentu menjadi salah satu penyebab tidak meratanya capaian PDRB per kapita. Hal ini terjadi karena daya tarik utama bagi investasi swasta adalah keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah (Riskiyah Aprilia et al., 2024). Keuntungan lokasi mengacu pada daerah yang memiliki potensi tinggi untuk memberikan hasil keuntungan yang menarik bagi para investor, baik domestik maupun asing. Secara umum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat berdampak positif terhadap PDRB. Namun, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan penggunaan dana menjadi tidak efisien. Hal ini terkait dengan sistem kapitalisasi yang berkembang, seperti yang terjadi di kawasan industri Tangerang, di mana kontribusinya belum memberikan dampak signifikan terhadap pemerataan ekonomi di wilayah Jawa Barat (Lestari & Robertus, 2023).

2.1.6 Teori *Endogenous Growth*

Endogenous Growth Theory mengkritik Teori Solow yang menganggap teknologi sebagai faktor eksternal dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul Romer, teknologi sebenarnya dapat dipahami sebagai hasil dari proses yang terjadi secara internal dalam perekonomian itu sendiri (Jones, 2021). Pertumbuhan yang berkelanjutan bisa dicapai melalui kemajuan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia di suatu daerah. Penggunaan teknologi sebagai faktor eksternal saja justru bisa menurunkan efektivitas dan efisiensi pertumbuhan ekonomi jika tidak disertai dengan pemahaman terhadap faktor internal yang muncul sebagai dampak dari pemanfaatan teknologi tersebut (Jones, 2021)

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah investasi dari luar negeri yang bertujuan membantu pelaku usaha domestik dalam meningkatkan produktivitas mereka, yang pada gilirannya berdampak pada PDRB. Namun, ada sejumlah faktor yang menunjukkan bahwa PMA tidak selalu langsung berpengaruh terhadap PDRB. Faktor-faktor tersebut meliputi risiko negara, seperti kurangnya fasilitas pendukung meliputi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta infrastruktur.

2.1.7 Teori *Classical Labor*

Berdasarkan *Classical Labor Theory* yang dikembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo, tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi utama yang secara langsung memengaruhi kapasitas output sebuah perekonomian (Hacbert & Link, 1987). Jumlah tenaga kerja yang cukup, terutama jika didukung oleh keterampilan dan produktivitas yang baik, akan meningkatkan kemampuan daerah untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan PDRB per kapita. Adam Smith menekankan pentingnya pembagian kerja (*division of labor*) yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sementara David Ricardo menyoroti peran tenaga kerja dalam hubungannya dengan ketersediaan sumber daya serta keuntungan komparatif antarwilayah atau negara.

Namun, peningkatan jumlah angkatan kerja tidak selalu secara otomatis memberikan dampak positif bagi perekonomian. Jika pertumbuhan tenaga kerja tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas, keterampilan, serta ketersediaan lapangan kerja yang memadai, maka kontribusi tenaga kerja terhadap PDRB per kapita akan terbatas. Dalam situasi seperti ini, jumlah tenaga kerja yang besar justru berisiko menimbulkan masalah seperti pengangguran terbuka ataupun pengangguran sebagian. Oleh karena itu, secara teori, jumlah angkatan kerja memang berdampak positif pada PDRB per kapita, namun seberapa besar

pengaruhnya sangat bergantung pada tingkat produktivitas serta efektivitas pemanfaatan tenaga kerja tersebut.

2.1.8 Teori *Schumpeterian Innovation*

Berdasarkan *Schumpeterian Innovation Theory* yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, kewirausahaan dan inovasi menjadi motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Malerba & McKelvey, 2020). Schumpeter menegaskan bahwa pelaku usaha, termasuk yang berskala kecil dan menengah, memiliki peran penting dalam proses "*creative destruction*" yaitu penggantian teknologi, produk, atau metode lama dengan yang lebih efisien dan produktif melalui inovasi. Di tingkat daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi kekuatan penting dalam perekonomian karena sifatnya yang fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap dinamika pasar, serta memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat setempat. Keberagaman dan jumlah UMKM yang besar dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah, memperluas ruang produksi, dan menciptakan nilai tambah yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan PDRB per kapita.

Selain itu, UMKM juga berperan penting sebagai penyedia lapangan kerja, terutama di sektor informal dan semi-formal, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peran ini sejalan dengan pandangan Schumpeter yang menyatakan bahwa inovasi tidak hanya terjadi di perusahaan besar, tetapi juga di usaha kecil yang mampu mengenali peluang pasar yang spesifik dan menawarkan solusi kreatif. Dengan menjangkau pasar lokal dan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah, UMKM mampu mengoptimalkan potensi ekonomi setempat serta menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) melalui jaringan rantai pasok, distribusi, dan konsumsi

dalam masyarakat.

Secara teori, jumlah UMKM yang banyak dan produktif akan memberikan dampak positif pada PDRB per kapita karena mampu meningkatkan kapasitas produksi, memperluas basis ekonomi, dan memperkuat fondasi perekonomian daerah. Namun, seberapa besar pengaruh positif tersebut sangat bergantung pada bagaimana UMKM dikelola, kemampuan mereka untuk berinovasi, serta dukungan dari kebijakan pemerintah, seperti akses ke pembiayaan, pelatihan, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Tanpa adanya dukungan ini, pertumbuhan UMKM tidak akan maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB per kapita, bahkan berisiko mengalami masalah seperti persaingan yang tidak sehat atau stagnasi dalam produktivitas.

2.1.9 Konsep *Sustainable Livelihood*

Konsep penghidupan berkelanjutan atau *sustainable livelihood* mulai banyak mendapat perhatian dalam kajian pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan pada akhir 1990-an. Secara singkat, konsep ini menjelaskan bagaimana individu, keluarga, dan komunitas dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara yang menjaga keberlanjutan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menurut Robert Chambers & Gordon Conway (2014), mata pencaharian mencakup kemampuan dan aset, baik yang bersifat materi maupun sumber daya sosial, serta berbagai aktivitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Suatu mata pencaharian dianggap berkelanjutan ketika mampu menghadapi serta pulih dari berbagai tekanan dan guncangan, sekaligus menjaga atau bahkan meningkatkan kemampuan dan aset yang dimiliki tanpa merusak atau menurunkan kualitas sumber daya alam yang menjadi fondasi utama penghidupannya.

Sustainable livelihood menunjukkan pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan penguatan kemampuan masyarakat agar dapat menjaga kelangsungan hidup mereka secara berkelanjutan. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, kerangka ini tetap menjadi alat penting untuk menganalisis berbagai isu dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi lokal terutama di Provinsi Jawa Tengah, pendekatan *sustainable livelihood* sangat penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pengembangan sektor-sektor produktif seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM menjadi salah satu pendorong utama ekonomi masyarakat karena mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan sumber penghasilan bagi kelompok berpendapatan rendah.

Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu strategi dalam menjalankan penghidupan yang berkelanjutan karena mampu menciptakan peluang ekonomi secara langsung sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Transformasi digital dalam UMKM, seperti pemanfaatan internet, media sosial, *platform e-commerce*, dan aplikasi keuangan digital, menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi serta memperluas akses pasar. Dengan digitalisasi, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, mengurangi biaya transaksi, dan mempercepat perkembangan usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah yang lebih stabil. Proses ini sejalan dengan prinsip *sustainable livelihood* karena digitalisasi memanfaatkan modal fisik dan sumber daya manusia untuk memperkuat aset finansial dan sosial secara berkelanjutan.

Dengan demikian, menggabungkan konsep *sustainable livelihood*, pemberdayaan UMKM, dan transformasi digital dapat menciptakan sinergi yang strategis untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah

memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan yang memudahkan UMKM memperoleh pelatihan, akses digital, infrastruktur yang memadai, serta pembiayaan yang inklusif, guna mewujudkan pembangunan yang berlandaskan kekuatan ekonomi lokal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah telah banyak dilakukan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Beberapa studi menunjukkan bahwa variabel seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, investasi, dan peran UMKM memiliki kontribusi penting dalam mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang sering digunakan sebagai indikator utama kesejahteraan ekonomi suatu daerah.

Penelitian oleh Rahman & Chamelia (2015), di Jawa Tengah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang disebabkan oleh pengelolaan PAD yang kurang optimal dan kurang fokusnya pengelolaan belanja daerah sehingga tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, penelitian oleh Sunan Hidayat et al. (2020) di Jawa Barat menemukan bahwa PAD, Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja modal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memiliki pengaruh signifikan. Penelitian Shafwah et al. (2024), menambahkan bahwa meskipun PAD berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi, dampaknya belum cukup kuat secara signifikan, dengan penyebab utama adalah keterbatasan kapasitas institusional dan kualitas birokrasi dalam pengelolaan PAD. Ketiga

penelitian ini secara keseluruhan menekankan pentingnya manajemen keuangan daerah, khususnya terkait PAD dan belanja daerah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Variasi efek PAD dan belanja daerah antara wilayah mencerminkan perlunya kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan kapabilitas dan kondisi spesifik daerah agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan.

Penelitian Wardhana et al. (2013) dan Hasan (2015), menyoroti betapa pentingnya peran dana transfer dari pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah Indonesia. Wardhana et al. (2013) menemukan bahwa dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berfungsi sebagai stimulus fiskal yang membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran dan mendorong pembangunan. Namun, dalam hal penurunan ketimpangan pendapatan antar daerah, efek dana transfer ini belum maksimal, karena berbagai kendala seperti aturan *hold harmless* dan distribusi dana yang tidak merata. Sebaliknya Hasan (2015), menegaskan bahwa dana transfer dari pusat sangat berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah di Sulawesi Selatan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan belanja daerah, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Kedua studi ini memberi gambaran bahwa dana transfer pemerintah pusat merupakan alat penting untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Namun, efektivitas pemanfaatannya sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola dana tersebut secara efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, pengelolaan dana transfer yang optimal sangat diperlukan agar dapat memperkuat pemerataan pembangunan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Azis et al. (2022) mengkaji dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau menunjukkan hasil bahwa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum (DAU) justru berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerimaan daerah dan dana transfer yang dikelola dengan efektif dapat mendorong pembangunan serta pertumbuhan ekonomi lokal di Riau. Namun, keberhasilan tersebut sangat tergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola fiskal, terutama menghadapi tantangan geografis dan disparitas antar daerah dalam provinsi. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya desentralisasi fiskal dan peran optimal PAD, DBH, dan DAK dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menunjukkan bahwa tidak semua jenis dana transfer seperti DAU memberikan dampak positif bila pengelolaannya tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah setempat.

Penelitian yang dilakukan Saputra et al. (2021) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, baik secara langsung maupun melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel intervening. Hal ini menegaskan bahwa investasi dalam belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, mampu merangsang aktivitas ekonomi masyarakat dan selanjutnya meningkatkan PAD.

Hasil penelitian Lestari & Robertus (2023), mengungkapkan bahwa penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dana perimbangan, dan aglomerasi secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah di

Provinsi Banten pada periode 2011-2020. Namun, jika dilihat satu per satu, hanya dana perimbangan yang memiliki pengaruh signifikan dan bersifat negatif, yang berarti peningkatan dana perimbangan mampu menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sedangkan penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri, dan aglomerasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara individual. Dana perimbangan ini lebih banyak dialokasikan ke wilayah kabupaten dibandingkan kota, dengan tujuan mendukung pemerintahan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan membantu mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah.

Sebaliknya penelitian yang dilakukan Albasyari & Priyadi (2023) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama 2017-2021 dipengaruhi secara signifikan oleh beberapa faktor, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, jumlah penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara parsial, belanja modal terbukti memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara PAD memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan. Di sisi lain, penelitian memberikan pandangan kritis dengan menegaskan bahwa meskipun Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi investasi yang tidak merata dapat memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah. Melengkapi temuan ini, Riskiyah Aprilia et al. (2024) menekankan peran penting investasi, khususnya PMDN, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari upaya reformasi pemerintahan yang lebih efektif (*Rethinking Government*). Ketiga studi ini secara bersama-sama menyoroti pentingnya investasi baik dari dalam maupun luar negeri serta optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi

ketimpangan antar wilayah, demi mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Penelitian oleh Hikmatiyar & Hayati (2011) mengkaji pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), serta jumlah angkatan kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Provinsi Jawa Tengah selama periode 1995-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB per kapita. Namun secara parsial, PMDN tidak berpengaruh signifikan meskipun koefisiennya positif, hal ini dikarenakan PMDN yang tumbuh hanya terkonsentrasi pada sektor industri pengolahan dan tidak merata di sektor lain. Sebaliknya, PMA dan jumlah angkatan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Angkatan kerja menjadi faktor penting karena menyuplai tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan produksi dan pertumbuhan sektor ekonomi di daerah. Temuan ini menggarisbawahi bahwa kolaborasi investasi baik dari dalam maupun luar negeri, bersama dengan ketersediaan tenaga kerja yang memadai, menjadi kombinasi utama dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi regional yang lebih baik.

Penelitian Nilasari & Amelia (2022) menyoroti pentingnya peran PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa meskipun PDRB per kapita berkaitan dengan ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti dengan pemerataan pendapatan yang baik. Selain itu, partisipasi angkatan kerja memengaruhi ketimpangan melalui ketersediaan lapangan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Temuan ini menekankan bahwa ketimpangan pendapatan tidak

hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara umum, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan pemerataan kesempatan kerja dalam masyarakat. Selanjutnya, penelitian Hikmatiyar & Hayati (2011) memperlihatkan bagaimana investasi, baik dari dalam negeri maupun asing, serta tenaga kerja yang cukup, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan PDRB. Kombinasi dua penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi dan tenaga kerja penting, tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses kerja, hasil pertumbuhan tersebut belum tentu menghasilkan pemerataan pendapatan yang optimal.

Penelitian Andira & Chandra (2023), menunjukkan bahwa pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki dampak signifikan dalam mendorong perkembangan ekonomi Kota Pekanbaru pada periode 2020 sampai 2022. Kontribusi UMKM tersebut tercermin melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang didorong oleh penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal. Konsisten dengan temuan tersebut, Ananda (2024) menegaskan bahwa UMKM memainkan peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi lokal tidak hanya lewat output ekonomi, tetapi juga dengan berkontribusi pada pemerataan ekonomi karena kedekatan mereka dengan komunitas dan pemanfaatan sumber daya lokal. Kedua penelitian ini bersama-sama menunjukkan bahwa pengembangan UMKM memberikan dampak ganda, yakni mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja dan distribusi ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, UMKM dapat dipandang sebagai kekuatan utama dalam mendukung keberlanjutan penghidupan (*sustainable livelihood*) baik

di tingkat lokal maupun regional di Indonesia.

Penelitian Mutiarani et al. (2025) menegaskan bahwa digitalisasi UMKM memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia. Penerapan teknologi digital, seperti e-commerce, media sosial, aplikasi kasir digital, dan sistem pembayaran non-tunai membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas akses pasar, yang berujung pada peningkatan pendapatan dan omzet usaha. Digitalisasi juga mempermudah pelaku UMKM dalam mendistribusikan serta memasarkan produk secara online, sehingga meningkatkan likuiditas pasar. Meskipun tantangan seperti rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM masih ada, proses transformasi digital tetap menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah di era global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi UMKM bukan hanya memperkuat kinerja bisnis, tetapi juga berkontribusi secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Data	Hasil Temuan
1	Yozi Aulia Rahman & Ayunda Lintang Camelia (2015)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008–2012	Regresi Linier Berganda	Data BPS Jateng 2008–2012	PAD & Belanja Daerah tidak signifikan terhadap PDRB
2	Wahyu Sunan Hidayat & Budi Santosa (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat 2010–2015	Regresi data Panel	Data BPS Jabar 2010–2015	<ul style="list-style-type: none"> • PAD, DAU, dan BM, secara signifikan dan positif mempengaruhi PDRB. • DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. • Secara bersamaan, PAD, DAU, BM, dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB.
3	Rif'ah Shafwah, Masradin,	Pendapatan Asli Daerah (PAD): Kunci Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier	Data BPS Kota Makassar	PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

No	Penulis	Judul	Metode	Data	Hasil Temuan
	& Afiah Mukhtar (2022)	yang Berkelanjutan		2019-2023	
4	Adhitya Wardhana, Bambang Juanda, Hermanto Siregar, & Kodrat Wibowo (2013)	Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	Regresi Panel	Data BPS Nasional 2001-2010	Transfer Pemerintah Pusat mampu menurunkan ketimpangan antarwilayah.
5	Muhammad Hasan (2015)	Pengaruh Dana Transfer Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan	Regresi Linier Berganda	Data BPS Sulsel 2005–2010	Dana transfer pusat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6	Abdul Aziz, Dahlan Tampubolon, Selly Prima Desweni (2022)	Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2012–2020	Regresi Data Panel	Data BPS Riau 2012–2020	<ul style="list-style-type: none"> • DBH, DAK, PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. • DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
7	Muh Resa Saputra, Haliah, Aini Indrijawati (2021)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening	metode partial least square	LRA Sulawesi Selatan 2010–2019 BPS 2016-2020	Belanja modal meningkatkan pertumbuhan ekonomi langsung & melalui PAD.
8	Naufan Nadhief Albasyari & Unggul Priyadi (2023)	Analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 2017–2021	Regresi Data Panel	Data BPS Jateng 2017–2021	PMA, PMDN, pengeluaran pemerintah, TK, inflasi dan IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah
9	Galuh Gita Lestari & Mulyo Hendarto Robertus	Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Dana Perimbangan, dan Aglomerasi terhadap	Regresi Panel	Data Banten 2011–2020	<ul style="list-style-type: none"> • PMDN, PMA, & Aglomerasi tidak signifikan terhadap ketimpangan di Banten • Dana Perimbangan signifikan terhadap

No	Penulis	Judul	Metode	Data	Hasil Temuan
	(2023)	Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Provinsi Banten Tahun 2011–2020			ketimpangan di Banten
10	Nikmatul Riskiyah Aprilia, Deswita Aurelia, Moh Djasuli (2024)	Pengaruh Investasi dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Upaya Mewujudkan Rethinking Government	Regresi Linier	Data BPS Nasional 2018-2020	Investasi PMDN berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
11	Putri Fajarni Hikmatiyar & Banatul Hayati (2011)	Analisis Pengaruh PMDN, PMA, dan Angkatan Kerja terhadap PDRB	Regresi Linier	Data BPS 1995–2009	PMDN, PMA, dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
12	Aprillia Nilasari & Rizky Amelia (2022)	Pengaruh PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia	Regresi Linier	Data BPS 2019-2021	<ul style="list-style-type: none"> PDRB per kapita, dan IPM berpengaruh positif signifikan pada ketimpangan distribusi pendapatan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
13	Agung Putra Andira & Roni Chandra (2023)	Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2020–2022	Regresi Linier Berganda	Data BPS Pekanbaru 2020–2022	pertumbuhan UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi.
14	Yuvika Ananda Nst (2024)	Peran UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal	metode analisis tematik	BPS & Kemenkop UKM 2023	UMKM berperan penting dalam meningkatkan ekonomi lokal & ketahanan ekonomi.
15	Mutiarani, Novi R, Dewi M, Gustina M, Thamara (2025)	Analisis Dampak Digitalisasi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal Di Indonesia	Studi literature review	Kemenkop UKM 2020-2024	digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan produktivitas Lokal, dan daya saing UMKM, sehingga berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi di lokal

Jika ditelaah lebih dalam, banyak penelitian yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB, namun mayoritas hanya fokus pada aspek-aspek tertentu secara terpisah tanpa mengaitkannya dengan konteks kebijakan yang diterapkan di daerah tertentu. Perbedaan utama dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada konteks yang diangkat, yakni untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan solusi terhadap masalah pemerataan capaian PDRB per kapita. Provinsi Jawa Tengah dipilih memiliki sejarah panjang, serta budaya yang kaya, sehingga menjadi objek kajian yang menarik dalam kerangka sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Sustainable Livelihood* dari sisi ekonomi untuk mengkaji upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidup sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan ekonomi.

Penelitian ini sejalan dengan kerangka kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan. Dengan demikian, berbagai studi sebelumnya semakin memperkuat asumsi dan relevansi model penelitian yang diangkat dalam tesis ini, yaitu bahwa pertumbuhan ekonomi daerah, yang diukur melalui PDRB per kapita, dipengaruhi oleh kombinasi faktor-faktor seperti fiskal, investasi, tenaga kerja, kapasitas usaha mikro, serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung penghidupan yang berkelanjutan.

2.3 Kerangka Pemikiran

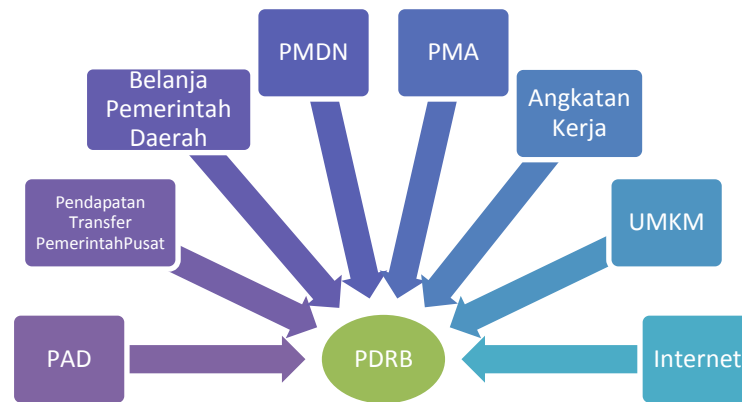
Berdasarkan teori serta hasil penelitian sebelumnya, dapat dirancang sebuah konsep pemikiran yang menggambarkan hubungan antarvariabel dalam penelitian ini. PDRB per

kapita dipilih sebagai variabel independen karena mencerminkan tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB per kapita diharapkan dapat menjadi langkah penting dalam pemerataan capaian PDRB per kapita antarwilayah, sejalan dengan kebijakan pembangunan yang mengedepankan inklusivitas dan keberlanjutan.

Sebagai variabel independen, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat menggambarkan kapasitas fiskal daerah, yang berperan dalam menentukan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan. Sementara itu, belanja pemerintah daerah sebagai bentuk pelaksanaan anggaran mencerminkan kebijakan pengeluaran publik yang apabila dialokasikan dengan tepat ke sektor-sektor produktif, berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) mewakili investasi yang berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi di tingkat lokal. Di sisi lain, angkatan kerja menggambarkan potensi sumber daya manusia yang perlu didukung dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai dan berkualitas.

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat krusial dalam mendukung perekonomian daerah, karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sekaligus membantu pemerataan ekonomi. Penguatan UMKM melalui transformasi digital, seperti peningkatan akses terhadap teknologi dan internet, diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta memperbesar kontribusi UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan hubungan tersebut, diasumsikan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, belanja pemerintah daerah, investasi baik dari PMDN maupun PMA, jumlah angkatan kerja, serta perkembangan UMKM termasuk UMKM digital, akan berkontribusi pada peningkatan PDRB per kapita. Peningkatan PDRB per kapita yang merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu menurunkan kesenjangan antarwilayah, sejalan dengan pendekatan pembangunan yang berfokus pada prinsip *sustainable livelihood* sebagaimana tertuang dalam kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018- 2023.

2.4 Hipotesis Penelitian

Pernyataan hipotesis dikembangkan dari landasan teori serta literatur sebelumnya yang digunakan penulisan ini. Berdasarkan landasan teori serta literatur sebelumnya maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

H1 : Diduga Jumlah UMKM berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita.

H2 : Diduga UMKM yang menggunakan internet berpengaruh positif terhadap PDRB

per kapita.

H3 : Diduga PAD berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita.

H4 : Diduga Transfer Pemerintah Pusat berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita.

H5 : Diduga Belanja Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita.

H6 : Diduga PMDN berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita.

H7 : Diduga PMA berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita.

H8 : Diduga Angkatan kerja berpengaruh positif terhadap PDRB per kapita.

H9 : Diduga jumlah UMKM, UMKM pengguna internet, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Belanja Pemerintah Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, Jumlah Angkatan Kerja memberikan kontribusi secara simultan terhadap PDRB per kapita kab/kota di Provinsi Jawa Tengah?

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data numerik dari berbagai sumber relevan untuk dianalisis secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai aspek yang diteliti. Metode yang diterapkan adalah Analisis Deret Waktu, yaitu teknik yang mempelajari data yang dikumpulkan secara berurutan dari waktu ke waktu untuk memperoleh informasi periodik, biasanya tahunan. Metode ini didasarkan pada proses dekomposisi deret waktu (*Seasonal and Trend decomposition using loess*), yang memisahkan data menjadi komponen tren dan musiman. Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian kebijakan, penggunaan data historis sangat penting untuk dapat memproyeksikan kondisi jangka panjang dengan menghilangkan pengaruh fluktuasi siklus yang bersifat statis dari data yang tersedia.

3.1 Populasi dan Sample

Populasi yang dipilih untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan *Sustainable Livelihood* adalah terkait dengan sumber kebijakan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Artinya populasi yang diteliti adalah kawasan regional Jawa Tengah. Sedangkan sample yang diambil dari populasi tersebut adalah terkait dengan kabupaten atau kota yang masuk kedalam kawasan regional Provinsi Jawa Tengah. Ada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah yang masuk kedalam sample data penelitian ini. Dengan periode waktu penelitian selama 7 tahun dari tahun 2017 sampai 2023, maka total populasi dalam penelitian ini terdiri dari : $35 \text{ kabupaten/kota} \times 7 \text{ tahun} = 245 \text{ unit observasi}$.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP), Belanja Pemerintah Daerah (BPD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Angkatan Kerja (AK), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan UMKM pengguna Internet (IT). Selain itu data-data pendukung lainnya berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah untuk melengkapi data dari variabel kebijakan. Serta data-data lain yang telah melalui proses pengolahan menggunakan data primer yang tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode data administratif dari sumber terpercaya pemerintah, dan juga menggunakan studi dokumen kebijakan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga data-data yang dikumpulkan dapat diolah dan dianalisis dengan dukungan dari analisis dokumen pemerintah.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Definisi Operasional

a. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang dijelaskan oleh variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita atas Dasar Harga Konstan tahun 2010, yang dinyatakan dalam juta rupiah, merupakan indikator yang umumnya digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran rata-rata

penduduk di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan harga yang tetap pada tahun dasar 2010. PDRB ini merupakan versi regional dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengukur total kegiatan ekonomi di wilayah tertentu, seperti provinsi atau kabupaten/kota. Dengan menggunakan harga dasar yang sama pada periode 2017 hingga 2023, perhitungan ini mampu menghilangkan efek inflasi, sehingga pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu dapat dibandingkan secara nyata dan akurat. PDRB per kapita atas dasar harga konstan digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga, memberikan gambaran yang lebih adil dalam membandingkan kinerja ekonomi antar tahun, sekaligus membantu dalam penyusunan kebijakan ekonomi berdasarkan tingkat produktivitas yang sebenarnya. Indikator ini sangat penting dalam memantau perkembangan ekonomi riil suatu daerah, serta menjadi alat utama dalam analisis makroekonomi regional, perencanaan pembangunan, dan penilaian kinerja pemerintah daerah.

b. Variabel Independen (bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi atau menjelaskan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal dan dipungut berdasarkan peraturan daerah, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri. PAD berfungsi sebagai salah satu instrumen penting untuk membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri, sehingga semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi pula kemandirian fiskal daerah tersebut.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari alokasi anggaran pemerintah pusat, yang ditransfer ke daerah untuk membiayai kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pemerintah. Transfer ini bertujuan membantu daerah dalam membiayai kebutuhan belanja, melaksanakan desentralisasi, serta mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah.

3) Belanja Pemerintah Daerah

Belanja Pemerintah Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran tertentu. Pengeluaran ini digunakan untuk menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, serta menyediakan layanan publik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Belanja ini mencakup beberapa jenis, seperti belanja operasi yang meliputi pembayaran gaji pegawai dan pembelian barang atau jasa, belanja modal yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan aset tetap lainnya, belanja tidak terduga yang disiapkan untuk menghadapi situasi darurat, serta belanja transfer yang diberikan untuk membantu desa atau lembaga lainnya dalam wilayah tersebut. Fungsi utama dari belanja pemerintah daerah adalah sebagai alat fiskal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal,

serta memperkuat kualitas layanan publik yang ada di daerah.

4) Penanaman Modal dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dari dalam negeri, seperti warga negara Indonesia, perusahaan lokal, pemerintah daerah, atau koperasi, untuk menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri. PMDN memiliki peran penting dalam memperkokoh perekonomian nasional dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal secara optimal.

5) Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah investasi yang dilakukan oleh investor dari luar negeri, baik individu warga negara asing, perusahaan asing, maupun pemerintah asing, untuk menjalankan usaha di Indonesia pada sektor-sektor yang diizinkan oleh pemerintah sesuai dengan aturan investasi yang berlaku. Selain menambah modal bagi pembangunan, PMA juga berperan penting dalam membawa teknologi terbaru, praktik manajemen modern, serta membuka peluang akses ke pasar internasional.

6) Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang siap dan terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Besarnya angkatan kerja menjadi salah satu indikator utama dalam menganalisis kondisi pasar tenaga kerja, tingkat produktivitas, serta potensi perkembangan ekonomi di suatu daerah.

7) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha kecil dengan kriteria tertentu yang ditentukan berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mendorong perkembangan ekonomi di tingkat lokal, serta membantu mewujudkan pemerataan kesejahteraan di masyarakat.

8) UMKM Pengguna Internet

UMKM pengguna internet adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memanfaatkan internet dalam aktivitas usahanya, baik untuk:

- Promosi/iklan (media sosial, website, *marketplace*)
- Transaksi penjualan/pembelian (*e-commerce*, online shop)
- Komunikasi dengan pelanggan (chat, email, WA)
- Pembayaran digital (*e-wallet*, transfer online)
- Pengelolaan usaha (software akuntansi, *cloud storage*)

Didefinisikan sebagai unit usaha mikro, kecil, atau menengah yang secara aktif menggunakan koneksi internet untuk mendukung proses bisnis setidaknya dalam satu aspek: promosi, transaksi, komunikasi, atau manajemen usaha.

3.3.2 Pengukuran Variabel

Berikut adalah model pengukuran hubungan variabel kebijakan *Sustainable Livelihood* terhadap PDRB per kapita atas dasar harga konstan dalam pendekatan

penelitian kuantitatif khususnya dengan pendekatan data panel time series atau regresi ekonometrika. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan *sustainable livelihood* memengaruhi pertumbuhan ekonomi riil, yang direpresentasikan melalui PDRB per kapita di suatu wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dari waktu ke waktu.

Struktur variabel dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian

No	Sub Dimensi	Simbol	Devinisi Operasional	Satuan	Sumber Data
1	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita	PDRB	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB) merupakan indikator ekonomi yang menunjukkan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.	Juta rupiah	BPS
2	Pendapatan Asli Daerah	PAD	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari potensi ekonomi lokal dan dipungut berdasarkan peraturan daerah, yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah secara mandiri.	Miliar Rupiah	BPS
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	PTPP	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah seluruh penerimaan daerah yang berasal dari alokasi anggaran pemerintah pusat, yang ditransfer ke daerah untuk membiayai kebutuhan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pemerintah.	Miliar Rupiah	BPS
4	Belanja Pemerintah Daerah	BPD	Belanja Pemerintah Daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dalam rangka menjalankan	Miliar Rupiah	BPS

No	Sub Dimensi	Simbol	Devinisi Operasional	Satuan	Sumber Data
			fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.		
5	Penanaman Modal Dalam Negeri	PMDN	Total nilai investasi yang ditanamkan oleh pelaku usaha dalam negeri di suatu wilayah dalam satu tahun anggaran.	Juta Rupiah	BPS
6	Penanaman Modal Asing	PMA	Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanamkan modal di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh investor asing baik berupa perorangan warga negara asing, badan usaha asing, atau pemerintah asing untuk menjalankan usaha di sektor-sektor yang dibuka oleh pemerintah Indonesia, sesuai dengan regulasi investasi yang berlaku.	Juta Rupiah	BPS
7	Angkatan Kerja	AK	Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tersedia dan aktif dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan.	%	BPS
8	Jumlah UMKM	UMKM	UMKM adalah jenis usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha kecil dengan kriteria tertentu berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan, sebagaimana diatur dalam undang-undang di Indonesia.	Unit	BPS
9	UMKM Pengguna Internet	IT	UMKM pengguna internet didefinisikan sebagai unit usaha mikro, kecil, atau menengah yang secara aktif menggunakan koneksi internet untuk mendukung proses bisnis setidaknya dalam satu aspek: promosi, transaksi, komunikasi, atau manajemen usaha.	Unit	BPS

3.4 Metode Analisis

Penelitian ini menerapkan model regresi data panel yang menggabungkan data deret waktu (tahun 2017–2023) dengan data lintas wilayah (35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah) menggunakan program Eviews 10. Analisis data panel menjadi salah satu pendekatan yang terus berkembang dan banyak digunakan dalam penelitian ekonometrika modern. Hal ini karena data panel mampu memberikan informasi yang lebih kaya dan akurat, sehingga mendukung peningkatan teknik estimasi dan penguatan hasil teoretis. Selain itu, secara praktis, penggunaan data panel dapat membantu mengatasi keterbatasan data dalam penelitian. Ketika data untuk variabel tertentu tidak cukup tersedia, penggabungan antara data *time series* dan *cross section* memungkinkan peneliti memperoleh lebih banyak observasi tanpa perlu melakukan modifikasi terhadap data asli, sehingga hasil analisis menjadi lebih representatif.

Model regresi panel dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PDRB}_{it} = \beta_0 + \beta_1\text{PAD}_{it} + \beta_2\text{PTPP}_{it} + \beta_3\text{BPD}_{it} + \beta_4\text{PMDN}_{it} + \beta_5\text{PMA}_{it} + \beta_6\text{AK}_{it} + \beta_7\text{UMKM}_{it} + \beta_8\text{IT}_{it} + \text{eit}$$

Di mana:

- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- PTPP = Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- BPD = Belanja Pemerintah Daerah
- PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri
- PMA = Penanaman Modal Asing
- AK = Angkatan Kerja
- UMKM = Jumlah UMKM

IT	=	UMKM Pengguna Internet
i	=	kabupaten/kota
t	=	tahun
eit	=	error term

3.5 Pendekatan Model Regresi Data Panel

Teknik analisis data panel dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan metode *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*.

3.5.1 Pendekatan Regresi Data Panel dengan Common Effect Model (CEM)

Model *common effect* ini merupakan pendekatan paling sederhana dalam mengestimasi parameter pada data panel. Teknik ini memadukan data *cross section* dan *time series* menjadi satu kesatuan tanpa membedakan antarwaktu maupun antarindividu. Estimasi umumnya dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Dalam model *common effect*, tidak diperhitungkan adanya perbedaan karakteristik antara unit individu maupun periode waktu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku semua entitas seragam sepanjang waktu pengamatan. (Iqbal,2015). Asumsi model *common effect* adalah sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PTPP_{it} + \beta_3 BPD_{it} + \beta_4 PMDN_{it} + \beta_5 PMA_{it} + \beta_6 AK_{it} + \beta_7 UMKM_{it} + \beta_8 IT_{it} + e_{it}$$

Di mana:

β_0	=	konstanta
β_n	=	koefisien regresi
i	=	<i>cross section</i>
t	=	<i>time series</i>

$$e_{it} = \text{error}$$

3.5.2 Pendekatan Regresi Data Panel dengan Fixed Effect Model (FEM)

Model *fixed effect* adalah model regresi data panel yang memiliki efek berbeda antar individu dan individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan dapat diestimasi melalui teknik *least square dummy*. (Iqbal,2015). Asumsi model *fixed effect* adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PDRB}_{it} = & \beta_0 + \mu_i + \beta_1 \text{PAD}_{it} + \beta_2 \text{PTPP}_{it} + \beta_3 \text{BPD}_{it} + \beta_4 \text{PMDN}_{it} + \beta_5 \text{PMA}_{it} + \beta_6 \text{AK}_{it} \\ & + \beta_7 \text{UMKM}_{it} + \beta_8 \text{IT}_{it} + e_{it} \end{aligned}$$

Di mana:

β_0 = konstanta

β_n = koefisien regresi

μ_i = efek tetap wilayah masing-masing

i = *cross section*

t = *time series*

e = *error*

3.5.3 Pendekatan Regresi Data Panel dengan Random Effect Model (REM)

Model *random effect* adalah model regresi data panel yang memiliki perbedaan dengan model *fixed effect*, pemakaian model *random effect* mampu menghemat pemakaian derajat kebebasan sehingga estimasi lebih efisien. Model *random effect* menggunakan *generalized least square* sebagai pendugaan parameter. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series*. (Iqbal, 2015) Asumsi model *random effect* adalah sebagai berikut :

$$\text{PDRB}_{it} = \beta_0 i + \beta_1 \text{PAD}_{it} + \beta_2 \text{PTPP}_{it} + \beta_3 \text{BPD}_{it} + \beta_4 \text{PMDN}_{it} + \beta_5 \text{PMA}_{it} + \beta_6 \text{AK}_{it} + \beta_7 \text{UMKM}_{it} + \beta_8 \text{IT}_{it} + e_{it}$$

Di mana:

$\beta_0 i$ = konstanta tidak lagi tetap (nonstokastik) tetapi bersifat random

β_n = koefisien regresi

i = *cross section*

t = *time series*

e = *error*

3.6 Uji Pemilihan Model Regresi Panel

Sebelum melakukan estimasi regresi utama, terlebih dahulu dilakukan serangkaian pengujian pemilihan model untuk menentukan spesifikasi model data panel yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Langkah ini sangat krusial karena setiap tipe model panel memiliki asumsi serta konsekuensi yang berbeda terhadap hasil estimasi yang dihasilkan. Tahapan uji yang dilakukan meliputi:

3.6.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan salah satu model pada regresi data panel model *common effect* (CEM) dan model *fixed effect* (FEM) yang sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat signifikansi model FEM menggunakan uji statistik F. Adapun nilai F dihitung berdasarkan persamaan berikut:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{(\text{SSE}_P - \text{SSE}_{DV}) / (N - 1)}{(\text{SSE}_{DV}) / (NT - N - K)}$$

Di mana:

N = Jumlah individu (*cross section*)

T = Jumlah periode waktu (*time series*)

K = Banyaknya parameter dalam model FEM

SSE_P = *residual sum of squares* untuk model CEM

SSE_{DV} = *residual sum of squares* untuk model FEM

Hipotesis dalam uji *chow* dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Model *Common Effect*

H_1 = Model *Fixed Effect*

3.6.2 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model *Random Effect* (REM) atau model *Common Effect* (CEM) yang paling tepat digunakan. Uji Lagrange Multiplier ini dikembangkan oleh *Breusch Pagan*, pengujian ini didasarkan pada nilai residual dari model *common effect* (CEM). Uji LM didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan sebesar jumlah variabel independen. Apabila nilai LM lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares*, maka model yang tepat adalah model *random effect* (REM), sebaliknya jika nilai LM lebih kecil dari nilai *Chi-Squares* maka model yang tepat adalah model *common effect* (CEM). Adapun nilai LM dihitung berdasarkan persamaan berikut:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n [\sum_{t=1}^T e_{it}]^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

Di mana:

n = Jumlah individu

T = Jumlah periode waktu

E = Residual model *Common Effect*

Hipotesis dalam uji *LM* dalam penelitian ini adalah:

H₀ = Model *Common Effect*

H₁ = Model *Random Effect*

3.6.3 Uji Hausman

Uji Hausman yaitu untuk menentukan model *random effect* (REM) dan model *fixed effect* (FEM) yang sebaiknya dilakukan dalam pemodelan data panel. Hipotesis nolnya adalah tidak terdapat hubungan antara model dengan satu atau lebih variabel penjelas. Dengan mengikuti kriteria Wald, nilai statistik Hausman ini akan mengikuti distribusi chi-square. Adapun nilai Wald dihitung berdasarkan persamaan berikut:

$$W = X^2(K) = (b - \hat{\beta})' [\text{var}(b) - \text{var}(\hat{\beta})]^{-1} (b - \hat{\beta})$$

Di mana:

b = vektor estimasi paramater REM

β = vektor estimasi paramater FEM

Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut :

H₀ = model *Random Effect*

H₁ = model *Fixed Effect*

Hasil dari ketiga pengujian tersebut menjadi landasan dalam memilih model panel terbaik yang akan dipakai untuk tahap pengujian hipotesis berikutnya. Dengan begitu, pemilihan model yang tepat diharapkan dapat memberikan estimasi yang lebih akurat, konsisten, dan mampu mencerminkan kondisi nyata secara lebih valid.

3.7 Pengujian Hipotesis

Untuk dapat menghasilkan persamaan regresi yang baik, maka harus dilakukan uji asumsi analisis regresi terlebih dahulu, yang terdiri atas:

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Model yang baik juga harus sesuai dengan kriteria pengujian asumsi klasik, agar prediksi yang dihasilkan lebih baik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen, variabel dependen, atau keduanya dalam model regresi memiliki distribusi data yang normal. Model regresi yang baik idealnya menunjukkan distribusi data yang normal atau setidaknya mendekati normal. Salah satu metode yang sering digunakan untuk menguji normalitas adalah uji *Jarque-Bera* (JB), yang juga tersedia sebagai fitur otomatis dalam program EViews 10. Statistik uji dapat dihitung dengan persamaan berikut ini:

$$JB = \frac{n}{6} \left[S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right]$$

Di mana:

N = ukuran sampel

S = menyatakan kemencengan

K = menyatakan keruncingan

Uji *Jarque-Bera* memiliki statistik uji yang mengikuti distribusi *chi-square* dengan dua derajat kebebasan. Apabila nilai *Jarque-Bera* yang diperoleh lebih besar daripada nilai *chi-square* pada tingkat signifikansi 5%, maka hipotesis

nol diterima, yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai *Jarque-Bera* lebih kecil dari nilai chi-square tersebut, hipotesis nol ditolak, menandakan bahwa data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas terjadi ketika terdapat hubungan linear yang kuat di antara variabel independen dalam model regresi berganda. Untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas, peneliti biasanya menggunakan regresi bantu (*auxiliary regression*). Melalui regresi ini, dapat diketahui sejauh mana dua atau lebih variabel independen saling berkaitan dan secara bersama-sama memengaruhi variabel independen lainnya. Indikasi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai F, di mana jika F hitung lebih besar dari F kritis pada derajat kebebasan tertentu, maka model mengandung masalah multikolinieritas. Dalam data gabungan (*pooled data*), persoalan ini dapat diatasi dengan pemberian pembobotan silang (*cross section weight*) atau dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Umumnya, multikolinieritas muncul pada model dengan data runtun waktu (*time series*), sehingga penggabungan data tersebut dengan data lintas individu (*cross section*) dapat membantu mengurangi masalah tersebut secara teknis.

c. Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians residual dalam model regresi berbeda antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser adalah metode statistik untuk mendeteksi

heteroskedastisitas dalam model regresi linear, dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Penerapan pada uji heteroskedastisitas adalah jika nilai $\text{sig} > 0.05$ maka H_0 diterima: model bebas heteroskedastisitas (homoskedastis). Jika nilai $\text{sig} \leq 0.05$ maka H_0 ditolak: terdapat heteroskedastisitas, yang mengindikasikan varians residual tidak konstan antar pengamatan.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan kondisi di mana terdapat hubungan atau keterkaitan antara nilai observasi yang berurutan dalam suatu rangkaian waktu. Permasalahan ini umumnya muncul pada model yang menggunakan data runtun waktu (*time series*). Salah satu cara sederhana untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah melalui Uji Durbin-Watson (DW). Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai statistik Durbin-Watson yang dihasilkan dengan nilai batas pada tabel DW. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bila nilai DW statistik terletak antara $0 < d < d_L$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif ditolak.
- 2) Bila nilai DW statistik terletak antara $4 - d_L < d < 4$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif ditolak.
- 3) Bila nilai DW statistik terletak antara $d_U < d < 4 - d_U$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif maupun H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi negatif diterima.
- 4) Bila nilai DW statistik terletak antara $d_U < d < 4 - d_U$, H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif maupun H_0 yang menyatakan tidak ada

autokorelasi negatif diterima.

- 5) Ragu-ragu tidak ada autokorelasi negatif bila nilai DW statistik terletak antara $dU \leq d \leq 4 - dL$.

Penerapan metode *Generalized Least Square* (GLS) dapat mengurangi atau menghilangkan masalah autokorelasi yang sering muncul pada estimasi dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hal ini terjadi karena OLS cenderung menghasilkan estimasi varians yang terlalu rendah (*underestimate*). Melalui GLS, permasalahan autokorelasi dapat diminimalkan. Asumsi autokorelasi umumnya muncul pada model yang diestimasi menggunakan OLS, sedangkan pada model data panel yang menggunakan model *Fixed Effect*, baik melalui pendekatan *Least Square Dummy Variable* (LSDV) maupun GLS, masalah tersebut dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena GLS memberikan pembobotan terhadap variasi data sehingga mampu menstabilkan hasil estimasi.

3.7.2 Uji Statistik

Uji statistik merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol (H_0) yang diajukan dapat diterima atau ditolak secara statistik berdasarkan hasil pengolahan sampel. Keputusan tersebut diambil dengan mengacu pada nilai statistik uji yang diperoleh dari data penelitian.

a. Uji Statistik Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menilai sejauh mana masing-masing variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen dalam model regresi data panel. Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari setiap variabel independen menunjukkan hubungan yang

signifikan dengan variabel terikat, sehingga dapat diidentifikasi variabel mana yang berpengaruh secara parsial terhadap model. Uji t menguji apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak, dimana untuk kekuatan pada uji t adalah sebagai berikut :

H_0 = Tidak ada pengaruh yang berarti dari variabel independen terhadap variabel terikat.

H_1 = Ada pengaruh yang berarti dari variabel independen terhadap variabel terikat.

Untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak, maka pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} jika :

1. $t_{hitung} > t_{tabel}$: maka H_0 ditolak H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel independen (X) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat (Y) adalah signifikan.
2. $t_{hitung} < t_{tabel}$: maka H_0 diterima H_1 ditolak, yang berarti bahwa variabel independen (X) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan. (Utari, 2017)

Uji t memiliki peran penting karena membantu menunjukkan sejauh mana setiap variabel independen berkontribusi dalam menjelaskan perubahan pada variabel terikat. Dengan demikian, peneliti bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh dan relevan dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan.

b. Uji Statistik Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menentukan apakah secara bersama-sama seluruh variabel independen dalam model regresi data panel memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji ini penting karena tidak hanya mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel secara terpisah, tetapi juga melihat apakah model secara keseluruhan layak dan signifikan dalam menjelaskan variabel independen. Dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = Variabel independen tidak memiliki pengaruh dengan variabel terikat.

H_1 = Ada pengaruh secara serentak antara semua variabel independen terhadap variabel terikat.

Dengan kriteria:

1. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$: maka H_0 ditolak H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel independen (X) secara serentak terhadap variabel terikat (Y) adalah signifikan.
2. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$: maka H_0 diterima H_1 ditolak, yang berarti bahwa variabel independen (X) secara serentak terhadap variabel terikat (Y) adalah tidak signifikan. (Utari, 2017)

Uji F menjadi acuan penting untuk menilai keabsahan model regresi yang dipakai, karena uji ini menunjukkan seberapa baik gabungan variabel independen dapat menjelaskan perubahan pada variabel terikat dalam penelitian yang dilakukan.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2 dan Adjusted R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel independen mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, dimana semakin mendekati angka 1, berarti model tersebut dapat menjelaskan sebagian besar variasi pada variabel independen dengan baik. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 0, artinya variabel independen kurang mampu menjelaskan variasi variabel terikat, dan mayoritas perubahan disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar model. Dalam penelitian dengan data panel, selain R^2 biasa, sering juga digunakan Adjusted R^2 yang sudah disesuaikan. Nilai Adjusted R^2 ini memberikan gambaran yang lebih tepat, terutama ketika model melibatkan banyak variabel independen, karena memperhitungkan jumlah variabel dan ukuran sampel sehingga mengurangi kemungkinan bias akibat penambahan variabel yang kurang relevan. Oleh sebab itu, interpretasi hasil uji R^2 sangat penting untuk menilai sejauh mana model regresi data panel yang digunakan dapat menggambarkan hubungan antara variabel PDRB dengan variabel-variabel seperti PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, dan IT secara akurat.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan dalam penelitian ini membahas pengaruh variabel-variabel seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat (PTPP), Belanja Pemerintah Daerah (BPD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Angkatan Kerja (AK), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta UMKM pengguna internet (IT) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah.

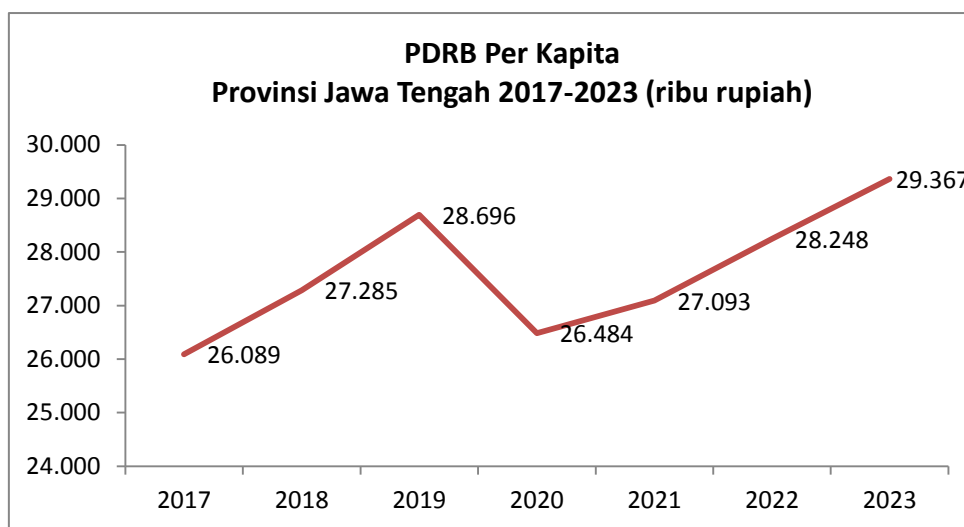
Penelitian menggunakan data panel, yang menggabungkan data *cross-section* dari 35 kabupaten/kota dengan data *time-series* selama 2017-2023, dengan 245 data untuk model dasar. Pada model utama, analisis difokuskan pada periode 2019-2023 dengan 175 data untuk menangkap dampak implementasi kebijakan *Sustainable Livelihood*. Pemilihan model regresi data panel dilakukan dengan membandingkan tiga pendekatan utama yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Ketiga model diuji melalui Uji Chow dan Uji Hausman guna menentukan pendekatan paling tepat yang mampu menjelaskan temuan secara akurat. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 10.

4.1 Analisis Deskriptif Variabel

4.1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto

PDRB per kapita adalah ukuran pendapatan rata-rata yang diperoleh setiap individu dalam suatu wilayah dalam periode tertentu, dihitung dengan membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduknya. Indikator ini sering digunakan untuk menilai kesejahteraan

masyarakat secara umum karena mencerminkan nilai produk barang dan jasa yang tersedia per orang. PDRB per kapita yang dihitung dengan harga konstan menunjukkan pertumbuhan ekonomi riil, yaitu peningkatan kemampuan ekonomi yang sesungguhnya tanpa dipengaruhi fluktuasi harga.



Gambar 4. 1 Grafik PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023

Pada tahun 2017, nilai PDRB per kapita Jawa Tengah tercatat sekitar 26.089 ribu rupiah, kemudian mengalami kenaikan bertahap sampai mencapai 28.696 ribu rupiah di tahun 2019. Memasuki tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup tajam ke angka 26.484 ribu rupiah, yang kemungkinan besar dipicu oleh pengaruh pandemi global terhadap perekonomian daerah.

Setelah mengalami penurunan, kinerja ekonomi mulai menunjukkan pemulihan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, angka PDRB per kapita naik ke 27.093 ribu rupiah, dengan tren peningkatan berlanjut hingga tahun 2022 dan 2023, sampai akhirnya menembus angka 29.367 ribu rupiah di tahun terakhir. Perkembangan ini menggambarkan upaya dan kemampuan daerah untuk bangkit dari tekanan ekonomi, sekaligus menunjukkan optimisme bahwa pertumbuhan yang terjadi lebih stabil dan berkelanjutan ke

depannya. Data ini menjadi refleksi atas perubahan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setelah melalui berbagai tantangan ekonomi.

Pada tahun 2017, nilai PDRB per kapita di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan variasi yang cukup signifikan, yang menjadi dasar bagi pola pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Kabupaten Kudus menempati posisi tertinggi dengan nilai sekitar 80,83 juta rupiah per kapita. Di tempat lain, Kota Semarang mencatat angka sebesar 70,14 juta rupiah per kapita. Daerah-daerah seperti Kabupaten Cilacap dan Surakarta juga termasuk yang memiliki nilai PDRB per kapita tinggi, yaitu masing-masing 55,65 juta rupiah dan 61,39 juta rupiah. Namun, terdapat juga wilayah seperti Kabupaten Grobogan dan Pemalang yang justru berada di angka rendah, hanya sekitar 12,93 juta rupiah dan 12,60 juta rupiah per kapita, menggambarkan adanya ketimpangan ekonomi yang cukup mencolok antara daerah-daerah tersebut.

Tahun 2018 menunjukkan peningkatan PDRB per kapita di hampir seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus tetap memimpin dengan nilai sekitar 82,47 juta rupiah, sementara Kota Semarang mengalami kenaikan menjadi 73,49 juta rupiah. Pertumbuhan positif juga terlihat di Kabupaten Cilacap, Kota Surakarta, dan Kabupaten Klaten, mencerminkan kondisi ekonomi yang makin membaik serta penguatan sektor produksi dan jasa di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2019, dengan Kabupaten Kudus mencatat angka 84,46 juta rupiah, Kota Semarang meraih 77,62 juta rupiah, dan Kota Surakarta naik menjadi 68,55 juta rupiah. Kabupaten dan kota lain seperti Cilacap, Sukoharjo, dan Karanganyar juga mengalami pertumbuhan. Tahun ini menjadi periode puncak sebelum pandemi Covid-19, saat mayoritas wilayah berhasil menikmati stabilitas dan peningkatan

ekonomi yang cukup kuat.

Pandemi Covid-19 membawa dampak besar pada tahun 2020. PDRB per kapita di banyak daerah menurun tajam. Kabupaten Kudus sedikit turun ke 83,66 juta rupiah, Kota Semarang justru melonjak ke 83,25 juta rupiah, namun mayoritas kabupaten lain seperti Kabupaten Cilacap turun menjadi 46,43 juta rupiah. Kabupaten di zona bawah seperti Kabupaten Grobogan tetap mengalami penurunan, memperlihatkan keterbatasan sektor ekonomi dalam menghadapi krisis.

Memasuki tahun 2021, pemulihan ekonomi mulai terlihat walau belum sepenuhnya pulih di semua daerah. Kabupaten Kudus mengalami penurunan tipis menjadi 81,58 juta rupiah, Kota Semarang justru naik, dan Kota Surakarta berada di angka 69,09 juta rupiah. Peran sektor industri dan jasa di kota-kota utama sangat penting dalam mendukung proses pemulihan ekonomi tersebut.

Pada tahun 2022, kondisi ekonomi mengalami perbaikan signifikan yang terlihat dari kenaikan PDRB per kapita di hampir seluruh kabupaten dan kota. Kabupaten Kudus berhasil mencapai 82,50 juta rupiah, Kota Semarang naik tajam ke 91,06 juta rupiah, dan Kota Surakarta meningkat menjadi 73,21 juta rupiah. Kabupaten Cilacap juga bangkit ke angka 48,64 juta rupiah. Meskipun perbedaan capaian PDRB per kapita antar wilayah masih ada, pemulihan ekonomi berlangsung secara konsisten.

Tahun 2023 menandai puncak pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus kembali naik menjadi 83,44 juta rupiah, Kota Semarang melonjak ke 95,50 juta rupiah, dan Kota Surakarta mencapai 77,10 juta rupiah. Beberapa daerah lain seperti Kabupaten Cilacap mencapai 50,72 juta rupiah, Kabupaten Klaten mencapai 24,87 juta rupiah, dan Kabupaten Grobogan mencapai 14,99 juta rupiah mengikuti tren

peningkatan ini. Tahun tersebut menunjukkan bahwa ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tidak hanya berhasil pulih dari dampak krisis, tetapi juga mencapai kinerja tertingginya selama periode pengamatan.

4.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dikumpulkan pemerintah daerah dari potensi ekonomi yang berada dalam wilayahnya sendiri, sesuai regulasi yang berlaku. Sumber PAD meliputi berbagai bentuk pajak dan retribusi daerah, hasil pemanfaatan aset yang dimiliki dan dipisahkan, hingga kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan sah lainnya.

Besar kecilnya PAD mencerminkan seberapa mandiri secara fiskal suatu daerah, karena semakin tinggi PAD, makin berkurang pula ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Dana PAD ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, membiayai pembangunan lokal, dan meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat.



Gambar 4. 2 Grafik PAD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023

Grafik tersebut menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa

Tengah dari tahun 2017 hingga 2023 dalam miliar rupiah. Pada awal periode, tahun 2017 PAD tercatat sekitar 946,81 miliar rupiah. Angka ini kemudian naik menjadi 989,92 miliar rupiah pada tahun 2018 dan kembali meningkat cukup tajam hingga mencapai 1.039,74 miliar rupiah pada tahun 2019. Kenaikan beruntun ini menunjukkan penguatan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah sebelum munculnya guncangan ekonomi karena pandemi Covid-19.

Memasuki tahun 2020, terlihat sedikit penurunan PAD menjadi sekitar 983,06 miliar rupiah. Hal ini menggambarkan tekanan kondisi ekonomi, yang sangat mungkin berkaitan dengan dampak pandemi terhadap aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak maupun retribusi. Namun, tren negatif tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 2021 PAD kembali naik menjadi sekitar 1.005,99 miliar rupiah, lalu meningkat lagi ke 1.049,51 miliar rupiah pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya sekitar 1.092,02 miliar rupiah pada tahun 2023. Secara keseluruhan, grafik ini menampilkan menunjukkan bahwa meskipun sempat terdampak krisis, Provinsi Jawa Tengah mampu memulihkan bahkan memperkuat kinerja PAD nya, yang berarti ruang fiskal dan kemandirian keuangannya juga semakin membaik.

Tahun 2017 Kota Semarang sebagai daerah dengan realisasi PAD paling besar, mencapai kurang lebih 1.791,9 miliar rupiah, disusul Kabupaten Cilacap sekitar 645,8 miliar rupiah dan Kabupaten Brebes sekitar 528,8 miliar rupiah. Kabupaten Banyumas juga menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat dengan PAD sekitar 619,7 miliar rupiah, sementara kabupaten seperti Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara berada di kisaran 355,9 miliar rupiah dan 297,5 miliar rupiah. Pola ini menggambarkan bahwa pada awal periode, kota pusat aktivitas ekonomi serta kabupaten yang memiliki basis

industri atau pelabuhan sudah memiliki fondasi PAD yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar kabupaten lainnya.

Memasuki tahun 2018, kinerja PAD di banyak daerah mengalami naik-turun, tetapi secara umum masih berada pada rentang yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Kota Semarang tetap menjadi penyumbang PAD terbesar dengan nilai sekitar 1.821,3 miliar rupiah, sementara PAD Kabupaten Banyumas meningkat menjadi sekitar 648,3 miliar rupiah dan Kabupaten Cilacap justru menurun ke sekitar 497,4 miliar rupiah. Di sisi lain, beberapa wilayah seperti Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Grobogan mengalami penurunan PAD yang cukup terasa, mengisyaratkan adanya tekanan terhadap kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli.

Pada tahun 2019, terlihat penguatan PAD di sejumlah kabupaten/kota. Kota Semarang kembali mencatat kenaikan hingga sekitar 2.159,4 miliar rupiah, Kabupaten Kebumen meningkat menjadi sekitar 401,2 miliar rupiah, dan Kabupaten Pekalongan mencapai sekitar 391,3 miliar rupiah. Namun, tidak semua wilayah mengalami tren serupa, misalnya PAD Kabupaten Klaten turun ke sekitar 273,7 miliar rupiah, menunjukkan adanya perbedaan kondisi dan dinamika ekonomi lokal antar daerah.

Tahun 2020, bertepatan dengan awal merebaknya pandemi Covid-19, memperlihatkan penyesuaian PAD di berbagai wilayah. Menariknya, Kota Semarang justru mengalami lonjakan signifikan dengan PAD sekitar 2.516,6 miliar rupiah, sementara Kabupaten Cilacap sedikit menurun ke sekitar 495,4 miliar rupiah dan Kabupaten Banyumas meningkat ke sekitar 729,9 miliar rupiah. Di sisi lain, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Purbalingga masih bergerak di kisaran 252,3 miliar rupiah dan 284,01 miliar rupiah, mencerminkan kemampuan adaptasi fiskal yang

berbeda- beda dalam menghadapi guncangan ekonomi pandemi.

Memasuki tahun 2021, mulai tampak fase awal pemulihan di mana banyak daerah berhasil memperbaiki realisasi PAD dibanding tahun 2020. Kabupaten Cilacap mengalami lonjakan hingga sekitar 739,1 miliar rupiah, Kabupaten Banyumas naik ke sekitar 762 miliar rupiah, dan Kabupaten Semarang mencapai sekitar 575,7 miliar rupiah. Meski demikian, pemulihan belum sepenuhnya merata, terbukti dari kabupaten seperti Kabupaten Wonogiri yang justru sedikit menurun ke kisaran 241,3 miliar rupiah.

Pada tahun 2022, kecenderungan penguatan PAD semakin terlihat meskipun tidak berlangsung serempak di semua daerah. Kota Semarang kembali mengukuhkan dominasinya dengan PAD sekitar 2.545,99 miliar rupiah, Kabupaten Tegal mencapai sekitar 531,2 miliar rupiah, sementara Kabupaten Cilacap berada di kisaran 700,4 miliar rupiah. Di sisi lain, ada wilayah yang justru stagnan atau menurun, seperti Kabupaten Karanganyar yang turun ke sekitar 266,8 miliar rupiah, menandakan perbedaan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan.

Memasuki tahun 2023, mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan PAD dibanding tahun sebelumnya. Kota Semarang tetap menjadi daerah dengan PAD terbesar, sekitar 2.865,7 miliar rupiah, disertai peningkatan yang cukup mencolok di Kabupaten Kendal hingga sekitar 601,2 miliar rupiah dan Kabupaten Cilacap sekitar 757,7 miliar rupiah. Sejumlah wilayah lain juga memperlihatkan penguatan, misalnya Kabupaten Banyumas yang mencapai sekitar 889,3 miliar rupiah, sehingga menggambarkan menguatnya kembali kapasitas fiskal daerah setelah tekanan berat pada masa pandemi.

4.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dapat dimaknai sebagai dukungan keuangan yang berasal dari APBN dan dialirkan ke pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal mereka dalam menjalankan urusan otonomi dan menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Dukungan ini sangat krusial terutama bagi daerah dengan PAD yang relatif lemah, karena memungkinkan pemerintah daerah tetap membiayai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial lainnya secara berkesinambungan.

Secara umum, pendapatan transfer ini tersusun atas beberapa jenis dana. Bagian terbesarnya adalah dana perimbangan yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang dirancang untuk menjembatani ketimpangan kemampuan keuangan antara pusat dan daerah maupun antar daerah itu sendiri. Selain itu, terdapat dana insentif daerah, dana otonomi khusus atau keistimewaan yang diberikan kepada wilayah dengan status tertentu, serta dana desa yang langsung mengalir ke pemerintah desa untuk memperkuat pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Melalui rangkaian skema tersebut, transfer dari pusat diharapkan mampu mengurangi kesenjangan fiskal antarwilayah dan mendorong tercapainya pembangunan yang lebih merata secara nasional.



Gambar 4. 3 Grafik PTPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023

Grafik tersebut menggambarkan bagaimana aliran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP) ke Provinsi Jawa Tengah berkembang sepanjang tahun 2017–2023. Pada awal periode tahun 2017, besaran transfer tercatat sekitar 45.621,75 miliar rupiah dan naik sedikit menjadi 45.777,41 miliar rupiah pada tahun 2018. Pada tahun 2019, nilai transfer pusat kembali menguat hingga mencapai 48.001,61 miliar rupiah, sebelum turun tipis pada 2020 menjadi 47.656,61 miliar rupiah, yang merefleksikan tekanan fiskal di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Mulai tahun 2021, pola grafik berubah cukup mencolok dengan kenaikan yang jauh lebih besar. Dana transfer meningkat menjadi sekitar 60.249,11 miliar rupiah, lalu terus bertambah menjadi 62.246,49 miliar rupiah pada tahun 2022 dan menyentuh 63.204,57 miliar rupiah pada tahun 2023. Rangkaian kenaikan ini menggambarkan semakin besarnya dukungan keuangan pemerintah pusat bagi Provinsi Jawa Tengah, terutama pada masa pemulihan pascapandemi. Di sisi lain, tren tersebut juga menunjukkan bahwa porsi dana transfer tetap memegang peran penting dalam struktur pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat provinsi.

Pada tahun 2017, pendapatan transfer yang diterima pemerintah kabupaten/kota di

Jawa Tengah sudah berada pada level yang cukup besar di banyak daerah. Kabupaten Cilacap, misalnya, memperoleh sekitar 1.875 miliar rupiah, disusul Kabupaten Banyumas sekitar 1.868 miliar rupiah dan Purbalingga sekitar 1.239 miliar rupiah. Secara umum, sebagian besar kabupaten memperoleh transfer di rentang 1 hingga 2 triliun rupiah, dengan perbedaan besaran yang dipengaruhi karakteristik dan kebutuhan fiskal masing-masing wilayah.

Memasuki tahun 2018, nilai transfer ke daerah cenderung bergerak naik untuk sejumlah kabupaten. Kabupaten Cilacap menerima sekitar 1.894 miliar rupiah, Kabupaten Banyumas juga berada di kisaran yang sama yaitu sekitar 1.894 miliar rupiah, sedangkan Kabupaten Purbalingga menerima sekitar 1.241 miliar rupiah. Di banyak kabupaten lainnya, dana transfer menunjukkan pola peningkatan yang relatif stabil dibanding tahun 2017, mencerminkan keberlanjutan dukungan fiskal dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2019, peran pendapatan transfer dalam menopang APBD daerah semakin menguat. Kabupaten Cilacap tercatat menerima sekitar 1.981 miliar rupiah, sementara Banyumas mencapai sekitar 2.003 miliar rupiah dan Purbalingga sekitar 1.306 miliar rupiah. Kenaikan di beberapa daerah ini menandakan fungsi transfer yang kian penting sebagai sumber pembiayaan bagi pelaksanaan program pembangunan di tingkat lokal.

Tahun 2020 ketika perekonomian nasional terdampak pandemi, pola pendapatan transfer menunjukkan dinamika yang sedikit berbeda. Kabupaten Cilacap menerima sekitar 1.751 miliar rupiah, sementara Banyumas justru meningkat menjadi sekitar 2.047 miliar rupiah, dan Purbalingga sedikit turun ke sekitar 1.275 miliar rupiah. Fluktuasi ini mencerminkan penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan kondisi ekonomi makro yang berubah akibat guncangan pandemi.

Pada tahun 2021, pendapatan transfer kembali menguat di banyak kabupaten sebagai bagian dari upaya pemulihan pascapandemi. Kabupaten Cilacap memperoleh sekitar 2.403 miliar rupiah, Banyumas sekitar 2.536 miliar rupiah, dan Purbalingga sekitar 1.570 miliar rupiah. Tambahan ruang fiskal ini membantu pemerintah daerah menjaga kelangsungan layanan publik dan mendorong pemulihan aktivitas ekonomi lokal.

Tren penguatan masih berlanjut pada tahun 2022, terlihat dari peningkatan nilai transfer di sejumlah daerah. Kabupaten Cilacap menerima sekitar 2.563 miliar rupiah, Banyumas sekitar 2.590 miliar rupiah, dan Purbalingga sekitar 1.702 miliar rupiah. Dana perimbangan tersebut berperan penting dalam mendukung agenda pembangunan, baik untuk belanja wajib maupun pembiayaan program prioritas daerah.

Pada tahun 2023, kinerja pendapatan transfer relatif terjaga, dengan beberapa daerah kembali mencatat kenaikan dan sebagian lainnya mengalami sedikit penyesuaian. Kabupaten Cilacap memperoleh sekitar 2.674 miliar rupiah, Banyumas berada pada angka yang sama yaitu sekitar 2.674 miliar rupiah, sementara Purbalingga sedikit menurun menjadi sekitar 1.697 miliar rupiah. Secara keseluruhan, besaran transfer terlihat cukup stabil, dengan variasi moderat antardaerah seiring penyesuaian kebutuhan dan kapasitas **fiskal masing- masing kabupaten.**

4.1.4 Belanja Pemerintah Daerah

Belanja pemerintah daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik, yang mengurangi kekayaan bersih/ekuitas dana daerah. Belanja ini mencakup berbagai jenis pengeluaran, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal/infrastruktur, subsidi, hibah, bantuan sosial, transfer ke desa, hingga belanja tak

terduga, yang semuanya diarahkan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.



Gambar 4. 4 Grafik BPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023

Grafik di atas menggambarkan pergerakan Belanja Pemerintah Daerah (BPD) Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017–2023 yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Pada awal periode, tahun 2017 belanja daerah berada di kisaran 74.502,30 miliar rupiah dan naik menjadi sekitar 76.191,84 miliar rupiah pada tahun 2018, lalu terdorong cukup kuat pada tahun 2019 hingga menyentuh kurang lebih 82.297,67 miliar rupiah.

Pada tahun 2020, belanja pemerintah daerah masih terus naik dan mencapai sekitar 83.654,18 miliar rupiah, menjadikannya salah satu level tertinggi dalam tahun pengamatan. Setahun kemudian, pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup terasa ke kisaran 77.970,65 miliar rupiah, yang dapat dilihat sebagai fase penyesuaian kebijakan dan pengelolaan anggaran, antara lain karena dampak pandemi serta penggeseran prioritas belanja.

Mulai tahun 2022, belanja daerah kembali menguat dengan nilai sekitar 82.219,92 miliar rupiah dan kembali meningkat pada tahun 2023 hingga kurang lebih 84.655,54

miliar rupiah. Dilihat secara keseluruhan, pola grafik menunjukkan tren jangka panjang yang naik dengan satu masa koreksi di tahun 2021, sebelum belanja pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah kembali menguat di dua tahun terakhir periode pengamatan.

Pada tahun 2017, belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah tersebar cukup merata di berbagai wilayah. Kota Semarang menempati posisi pertama dengan realisasi belanja terbesar, yakni sekitar 4,329 miliar rupiah, diikuti Kabupaten Brebes 2,768 miliar rupiah dan Kabupaten Kebumen 2,630 miliar rupiah. Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas juga mencatat angka yang cukup signifikan, masing-masing sekitar 3,003 dan 3,201 miliar rupiah. Sebaliknya, wilayah dengan populasi dan aktivitas ekonomi lebih kecil seperti Kota Magelang hanya membelanjakan sekitar 879 miliar rupiah, ini menggambarkan beragamnya skala dan kebutuhan fiskal antar daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2018, total belanja pemerintah daerah menunjukkan kenaikan di sebagian besar kabupaten/kota. Kota Semarang masih memimpin dengan angka sekitar 4,506 miliar rupiah, sementara Kabupaten Brebes tetap tinggi di kisaran 2,825 miliar rupiah. Kabupaten Banyumas naik menjadi 3,319 miliar rupiah, dan Kabupaten Pemasang mengalami lonjakan signifikan ke angka 2,324 miliar rupiah. Realisasi ini menunjukkan adanya ekspansi anggaran setelah fase pemulihan awal beberapa tahun sebelumnya.

Tahun 2019 menjadi masa pertumbuhan anggaran yang menonjol. Kota Semarang membukukan belanja hingga menembus 5,134 miliar rupiah, dan Kabupaten Tegal mencapai 2,867 miliar rupiah. Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas juga menikmati pertumbuhan, masing-masing sebesar 3,256 dan 3,621 miliar rupiah. Kenaikan rata-rata 5–10% dibanding tahun sebelumnya banyak didorong oleh tambahan alokasi

untuk pembangunan infrastruktur.

Meskipun diterpa pandemi di tahun 2020, belanja pemerintah daerah tetap stabil. Kota Semarang mampu mempertahankan anggaran belanja di posisi atas, sekitar 5,256 miliar rupiah, disusul Kabupaten Brebes 3,271 miliar rupiah dan Kabupaten Banyumas 3,744 miliar rupiah. Terdapat sedikit penurunan di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Cilacap yang realisasinya menjadi 3,194 miliar rupiah, namun secara umum capaian belanja tetap tinggi dan di atas 90% dari target fiskal daerah.

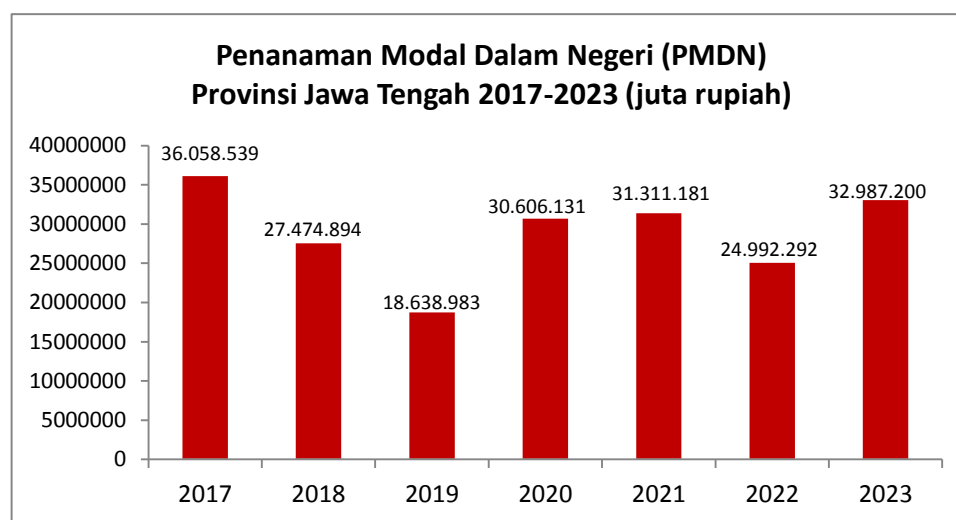
Tahun 2021 menandai awal masa pemulihan pasca pandemi. Realisasi belanja tetap signifikan di Kota Semarang 4,764 miliar rupiah dan Kabupaten Brebes 3,126 miliar rupiah, sementara Kabupaten Banyumas mengalami sedikit penurunan ke 3,431 miliar rupiah. Banyak daerah menjaga belanja di kisaran 2 sampai 3 miliar rupiah, seiring pemerintah daerah mengalihkan fokus pada belanja sosial dan stabilitas ekonomi masyarakat.

Memasuki 2022, tren belanja daerah kembali bergerak naik. Kota Semarang menunjukkan realisasi di angka 4,872 miliar rupiah dan Kabupaten Pemalang mencatat pertumbuhan hebat hingga 3,508 miliar rupiah. Kabupaten Brebes tetap stabil di kisaran 3,091 miliar rupiah, menunjukkan adanya penyesuaian dan kebijakan fiskal yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Pada 2023, Kota Semarang mencapai rekor tertinggi dengan belanja mendekati 4,984 miliar rupiah, sementara Kabupaten Cilacap pun naik signifikan ke 3,581 miliar rupiah. Kabupaten Brebes 3,161 miliar rupiah dan Kabupaten Banyumas 3,620 miliar rupiah tetap konsisten. Kenaikan rata-rata 3–5% per tahun ini menegaskan ketahanan dan kemampuan fiskal di Provinsi Jawa Tengah untuk terus beradaptasi dan berkembang.

4.1.5 Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman modal dalam negeri dapat dipahami sebagai aktivitas penanaman dana untuk berbisnis di wilayah Indonesia yang seluruh sumber dananya berasal dari dalam negeri. Dalam praktiknya, pelaku PMDN bisa berupa warga negara Indonesia secara perseorangan, perusahaan/badan usaha nasional, hingga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mengalokasikan modalnya untuk mendirikan usaha baru atau memperluas usaha yang sudah berjalan di Indonesia.



Gambar 4. 5 Grafik PMDN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023

Grafik di atas menampilkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2017–2023 dalam satuan juta rupiah. Pada tahun 2017, nilai PMDN berada pada level tertinggi sepanjang periode, sekitar 36.058.539 juta rupiah, kemudian menurun cukup tajam menjadi 27.474.894 juta rupiah pada tahun 2018 dan kembali turun hingga sekitar 18.638.983 juta rupiah pada tahun 2019.

Memasuki tahun 2020, arus investasi domestik berbalik menguat dengan nilai sekitar 30.606.131 juta rupiah dan masih naik lagi pada tahun 2021 menjadi kurang lebih 31.311.181 juta rupiah. Pada tahun 2022 terjadi koreksi ke kisaran 24.992.292 juta rupiah,

tetapi pada tahun 2023 nilai PMDN kembali terdorong naik hingga sekitar 32.987.200 juta rupiah. Secara keseluruhan, pola grafik menunjukkan fluktuasi dengan dua fase penguatan utama, yakni di awal periode tahun 2017 dan pada rentang 2021–2023, yang mencerminkan naik-turunnya minat dan kapasitas investasi pelaku domestik di Provinsi Jawa Tengah.

Tahun 2017, realisasi PMDN masih berada pada tahap awal dengan total sekitar 37 juta rupiah di seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Pekalongan menjadi penyumbang terbesar dengan sekitar 5.907 juta rupiah, disusul Kabupaten Sukoharjo sekitar 2.055 juta rupiah dan Kabupaten Karanganyar sekitar 1.958 juta rupiah, sementara Kabupaten Wonosobo berada di posisi terendah hanya sekitar 1,7 juta rupiah.

Pada tahun 2018, arus investasi domestik menguat di banyak daerah. Kota Semarang menempati posisi tertinggi dengan sekitar 8.535 juta rupiah, membuat total realisasi naik hingga kurang lebih 45 juta rupiah. Kabupaten Boyolali sekitar 1.114 juta rupiah, Kabupaten Sragen sekitar 2.442 juta rupiah, dan Kabupaten Cilacap yang meningkat hingga sekitar 4.805 juta rupiah juga tampil sebagai kontributor penting.

Tahun 2019 menunjukkan sedikit koreksi penurunan ke kisaran 28 juta rupiah. Salah satu penopang sebelumnya, Kabupaten Pekalongan hanya mencatat sekitar 41 juta rupiah. Meski demikian, Kabupaten Cilacap tetap menjadi pusat investasi utama dengan sekitar 6.831 juta rupiah, diikuti Kabupaten Kudus sekitar 2.042 juta rupiah dan Kabupaten Klaten sekitar 212 juta rupiah.

Memasuki tahun 2020, dampak pandemi mulai terasa dalam pola investasi. Di Kabupaten Cilacap, nilai PMDN melemah menjadi sekitar 4.285.260 juta rupiah, sementara Kabupaten Banyumas justru naik ke sekitar 1.075.030 juta rupiah dan Kota

Semarang meningkat ke sekitar 6.633.895 juta rupiah. Kabupaten Grobogan mencatat lonjakan mencolok hingga sekitar 3.492.707 juta rupiah, mengindikasikan adanya proyek skala besar yang masuk ke wilayah tersebut.

Pada tahun 2021, pergerakan investasi kembali berfluktuasi. Realisasi di Kabupaten Cilacap turun ke sekitar 1.554.233 juta rupiah dan di Kabupaten Banyumas ke sekitar 996.394 juta rupiah, sedangkan Kota Semarang melonjak tajam hingga sekitar 8.483.056 juta rupiah. Nilai PMDN di Kabupaten Grobogan turun ke sekitar 4.137.736 juta rupiah, namun tetap tergolong tinggi dibanding banyak kabupaten lain, mencerminkan dinamika investasi yang sangat dipengaruhi kondisi eksternal dan kebijakan lokal.

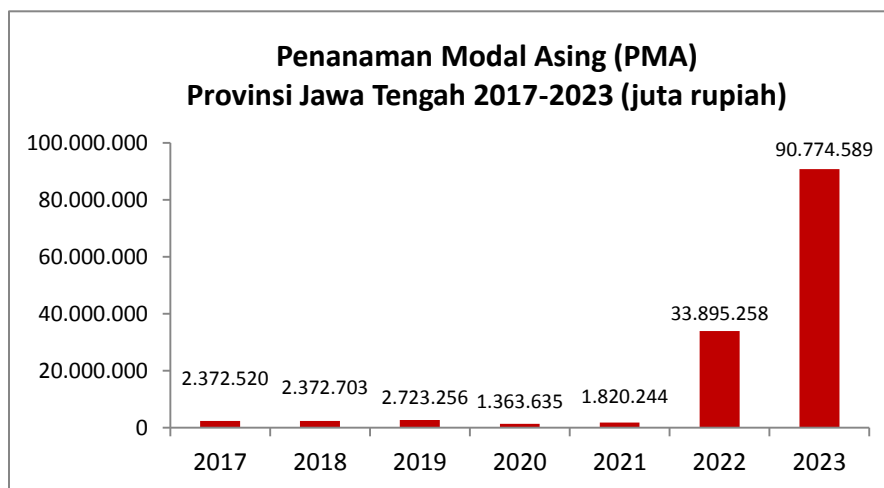
Tahun 2022 menjadi periode yang cukup berat bagi sejumlah daerah. Nilai PMDN di Kabupaten Cilacap merosot ke sekitar 622.737 juta rupiah, di Kabupaten Banyumas turun ke sekitar 859.956 juta rupiah, dan di Kota Semarang menyusut ke sekitar 5.096.830 juta rupiah. Grobogan juga mengalami penurunan tajam ke sekitar 517.607 juta rupiah, yang menandai melemahnya minat investor pada tahun tersebut.

Pada 2023, terlihat sinyal pemulihan investasi di beberapa wilayah. Di Kabupaten Cilacap, realisasi PMDN naik kembali ke sekitar 1.730.249 juta rupiah, di Kabupaten Banyumas meningkat menjadi sekitar 1.094.384 juta rupiah, dan di Kota Semarang bertambah hingga sekitar 6.984.722 juta rupiah. Kabupaten Grobogan juga mulai membaik dengan capaian sekitar 344.602 juta rupiah, menunjukkan bahwa arus investasi domestik mulai berangsur pulih meskipun belum sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi.

4.1.6 Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor dari luar negeri untuk membangun atau menjalankan usaha di Indonesia. Modal

yang digunakan bisa sepenuhnya dari pihak asing, atau merupakan hasil kerja sama dengan penanam modal domestik dalam bentuk *joint venture*. Dalam praktiknya, pelaku PMA dapat berupa individu warga negara asing, perusahaan atau badan usaha asing, atau bahkan pemerintah negara lain, dengan tujuan memperoleh keuntungan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di Indonesia.



Gambar 4. 6 Grafik PMA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023

Grafik di atas menampilkan perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017–2023 dalam satuan juta rupiah. Pada tahun 2017 dan 2018, nilai PMA relatif stabil di kisaran 2.372.520–2.372.703 juta rupiah, lalu meningkat pada 2019 menjadi sekitar 2.723.256 juta rupiah.

Tahun 2020 terjadi penurunan ke sekitar 1.363.635 juta rupiah dan sedikit membaik pada tahun 2021 menjadi sekitar 1.820.244 juta rupiah, menunjukkan fase pelemahan investasi asing. Namun, sejak tahun 2022 PMA melonjak sangat tajam hingga sekitar 33.895.258 juta rupiah dan kembali meningkat drastis pada tahun 2023 mencapai sekitar 90.774.589 juta rupiah. Pola ini menggambarkan bahwa setelah periode fluktuasi dan penurunan, minat investor asing sangat kuat dalam dua tahun terakhir.

Tahun 2017, realisasi investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan sebaran

yang cukup beragam antar kabupaten/kota. Kabupaten Purbalingga mencatat sekitar 363.030 juta rupiah, Kabupaten Jepara sekitar 1.042.726 juta rupiah, dan Kota Semarang sekitar 200.588 juta rupiah. Sementara itu, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas masing-masing hanya berada di kisaran 5.839 juta rupiah dan 4.966 juta rupiah, sehingga tampak jelas perbedaan skala investasi antarwilayah.

Pada tahun 2018, nilai PMA mengalami fluktuasi di berbagai daerah. Investasi di Kabupaten Cilacap meningkat menjadi sekitar 9.297 juta rupiah, sedangkan Kabupaten Banyumas justru turun ke sekitar 774 juta rupiah. Kota Semarang mengalami penurunan tajam ke sekitar 46.012 juta rupiah. Di sisi lain, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Karanganyar juga melemah, dengan realisasi masing-masing sekitar 12.358 juta rupiah dan 7.522 juta rupiah.

Memasuki tahun 2019, nilai investasi PMA secara umum masih relatif kecil, dengan sejumlah daerah mencatat angka di bawah 50 juta rupiah. Kabupaten Cilacap mencapai sekitar 16.668 juta rupiah, sementara Kota Semarang naik kembali ke sekitar 122.124 juta rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergerakan investasi asing masih sangat dinamis dan berbeda antar kabupaten/kota.

Pada tahun 2020, hampir seluruh wilayah mengalami penurunan nilai PMA. Di Kabupaten Cilacap, investasi hanya sekitar 2.446 juta rupiah, sedangkan Kota Semarang sekitar 110.752 juta rupiah. Kabupaten Purbalingga melaporkan sekitar 538 juta rupiah dan Kabupaten Wonogiri sekitar 5.272 juta rupiah, mencerminkan tekanan kuat pada arus investasi asing di masa awal pandemi.

Tahun 2021 memperlihatkan adanya perbaikan di beberapa daerah meski belum merata. Kabupaten Boyolali mencatat sekitar 25.796 juta rupiah, Kabupaten Pati sekitar

45.944 juta rupiah, dan Kota Semarang sekitar 104.259 juta rupiah. Sementara itu, kabupaten/kota lain masih bergerak fluktuatif, menandakan bahwa kepercayaan investor asing belum sepenuhnya pulih.

Situasi berubah drastis pada tahun 2022 ketika PMA melonjak tajam di sejumlah wilayah. Kabupaten Cilacap berhasil menarik investasi sekitar 147.360 juta rupiah dan Kota Semarang melonjak hingga sekitar 4.777.159 juta rupiah. Lonjakan sangat besar juga terjadi di Kabupaten Jepara dan Pati, masing-masing sekitar 9.424.590 juta rupiah dan 1.459.913 juta rupiah, yang mengindikasikan masuknya proyek skala besar.

Pada tahun 2023, peningkatan investasi asing mencapai titik yang sangat menonjol, terutama di Kabupaten Cilacap dengan nilai sekitar 23.142.198 juta rupiah atau sekitar 23 triliun rupiah. Kota Semarang mencatat sekitar 415.193 juta rupiah, sedangkan Kabupaten Banyumas dan Kota Tegal masing-masing berada di kisaran 70.599 juta rupiah dan 34.268 juta rupiah. Pola ini menggambarkan fase ekspansi kuat PMA di beberapa pusat pertumbuhan, meski belum seluruh daerah menikmati lonjakan serupa.

4.1.7 Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk yang sudah memasuki usia produktif, biasanya dimulai pada usia 15 tahun ke atas, yang secara aktif berkontribusi dalam proses ekonomi, baik dengan bekerja maupun mencari pekerjaan. Dalam lingkup statistik Indonesia, angkatan kerja terdiri dari dua kelompok utama yaitu mereka yang tengah bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan atau berstatus pengangguran terbuka, tetapi siap dan mampu apabila ada kesempatan kerja.

Ciri utama angkatan kerja adalah kesiapan fisik dan mental untuk terlibat dalam produksi barang atau jasa. Tidak hanya mencakup pekerja tetap, tetapi juga pekerja paruh

waktu, pengangguran yang aktif mencari pekerjaan, serta individu yang sementara tidak bekerja namun masih memiliki hubungan kerja. Konsep ini menjadikan angkatan kerja sebagai cerminan potensi sumber daya manusia dalam masyarakat yang bisa digerakkan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian maupun pengembangan sosial.

Di sisi lain, mereka yang berada di luar angkatan kerja, seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau lansia yang memilih tidak bekerja, tidak masuk dalam kategori ini meski secara usia mungkin memenuhi syarat. Pemerintah dan berbagai pihak terus mendorong peningkatan kualitas dan keterampilan angkatan kerja, agar dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dunia kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.



Gambar 4. 7 Grafik AK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s.d 2023

Grafik di atas menampilkan Partisipasi Angkatan Kerja (AK) di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2017–2023 dengan pola yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 AK tercatat 69,11%, lalu sedikit menurun menjadi 68,81% pada tahun 2018, lalu pada tahun 2019 kembali naik tipis menjadi 68,85%.

Memasuki tahun 2020 dan 2021, angka tersebut terus menguat masing-masing menjadi 69,43% dan 69,58%, yang menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang terserap atau setidaknya aktif di pasar kerja. Lonjakan yang lebih jelas tampak pada

tahun 2022 ketika AK mencapai 70,84%, dan kemudian menorehkan level tertinggi dalam rentang waktu tersebut pada tahun 2023, yaitu 71,72%. Secara keseluruhan, pergerakan ini menggambarkan tren kenaikan partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah, dengan sedikit penurunan di awal tetapi diikuti peningkatan cukup nyata hingga akhir periode.

Pada tahun 2017, struktur pasar tenaga kerja Jawa Tengah sudah relatif solid dengan jumlah angkatan kerja sekitar 10 juta orang dan partisipasi angkatan kerja di banyak kabupaten/kota berada di kisaran sangat tinggi, sekitar 93–97%. Porsi penduduk yang sudah bekerja mencapai sekitar 90–97% dari angkatan kerja, sementara pengangguran hanya berada di rentang kurang lebih 4–7%. Kota besar seperti Semarang, Surakarta, dan Magelang termasuk wilayah dengan partisipasi angkatan kerja di atas 90% sekaligus tingkat pengangguran yang relatif rendah.

Memasuki tahun 2018, pola tersebut pada dasarnya masih terjaga. Tingkat partisipasi angkatan kerja di sebagian besar daerah tetap tinggi, sekitar 92–97%, dan jumlah penduduk yang terserap bekerja sedikit meningkat. Namun, ada beberapa kabupaten yang mulai menunjukkan tekanan di pasar kerja, misalnya Kabupaten Cilacap dengan tingkat pengangguran yang naik hingga sekitar 7,48%, meskipun secara umum porsi penduduk yang bekerja di banyak wilayah tetap di atas 90%.

Pada tahun 2019, situasi ketenagakerjaan masih tergolong stabil dengan sedikit perbaikan. Di banyak kabupaten/kota, persentase penduduk yang bekerja naik tipis dan berada di kisaran 91–97% dari angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka bervariasi antardaerah tetapi umumnya tetap dalam rentang 3–7%, sehingga secara keseluruhan mencerminkan kondisi pasar kerja yang cukup sehat di Provinsi Jawa Tengah menjelang pandemi.

Tahun 2020 membawa perubahan karena guncangan pandemi. Di sejumlah daerah, partisipasi angkatan kerja mulai turun dan proporsi penduduk yang bekerja menyusut ke kisaran sekitar 90–95%. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran di beberapa kabupaten/kota, seperti Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Temanggung, terdorong naik hingga sekitar 7–9%. Secara agregat, angkatan kerja masih berada di sekitar 9–10 juta orang, tetapi tekanan terhadap daya serap lapangan kerja jelas lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

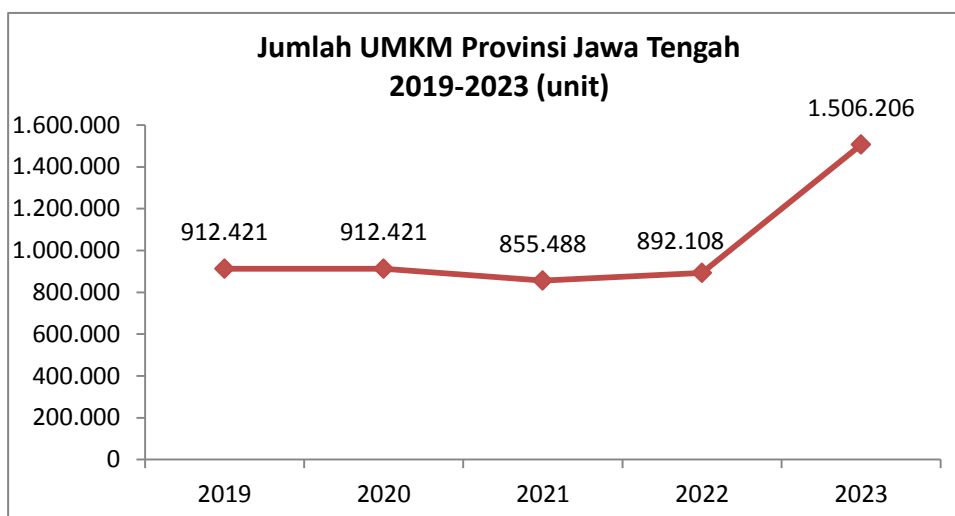
Pada tahun 2021, tanda-tanda pemulihan mulai tampak. Persentase penduduk yang bekerja kembali merangkak naik ke rentang kurang lebih 90–95% dan tingkat pengangguran mulai menurun, meski masih ada daerah yang mencatat angka di atas 6%. Jumlah angkatan kerja tetap stabil sekitar 9–10 juta orang, menggambarkan proses pemulihan bertahap di pasar tenaga kerja setelah fase awal pandemi.

Situasi membaik lebih jauh pada tahun 2022 ketika partisipasi angkatan kerja kembali menguat dan rata-rata melampaui 93% di banyak kabupaten/kota. Porsi pengangguran turun ke kisaran sekitar 4–6%, sementara jumlah penduduk yang bekerja meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Provinsi Jawa Tengah mulai pulih lebih kuat dan tekanan pengangguran berangsur mereda.

Pada tahun 2023, struktur ketenagakerjaan Jawa Tengah tampak semakin stabil. Di hampir seluruh kabupaten/kota, persentase penduduk yang bekerja berada di kisaran 91–96% dari total angkatan kerja. Tingkat pengangguran masih berada dalam rentang sekitar 4–8%, tetapi tidak menunjukkan lonjakan besar. Dengan jumlah angkatan kerja yang tetap kuat di sekitar 9–10 juta orang, pasar tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tampak memiliki fondasi yang cukup kokoh untuk menopang aktivitas ekonomi daerah.

4.1.8 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Tengah memegang peran penting sebagai tulang punggung ekonomi daerah, karena menyerap banyak tenaga kerja dan tersebar hampir di seluruh sektor, mulai dari perdagangan tradisional, produksi rumahan, hingga jasa dan industri kreatif. Di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi provinsi, perkembangan jumlah UMKM menjadi indikator kunci untuk melihat seberapa besar partisipasi pelaku usaha lokal dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di setiap kabupaten/kota. Pembahasan mengenai data jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah akan memberikan gambaran lebih jelas tentang sebaran, skala, dan potensi penguatan struktur ekonomi rakyat di wilayah ini.



Gambar 4. 8 Grafik Jumlah UMKM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 s.d 2023

Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2019–2023 menunjukkan dinamika yang cukup jelas. Pada tahun 2019 dan 2020, jumlah unit usaha tercatat stabil di angka 912.421 unit, lalu menyusut pada 2021 menjadi 855.488 unit.

Memasuki tahun 2022, jumlah UMKM kembali bertambah menjadi 892.108 unit, meski masih sedikit di bawah capaian awal periode. Peningkatan yang paling menonjol

tampak pada tahun 2023, ketika jumlah UMKM melonjak tajam hingga mencapai 1.506.206 unit. Secara umum, setelah fase penurunan dan cenderung stagnan, kinerja sektor UMKM di Provinsi Jawa Tengah justru berbalik menguat dan mengalami ekspansi yang sangat besar pada tahun terakhir pengamatan.

Pada tahun 2019, jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah sudah sangat besar dan tersebar tidak merata antarwilayah, dengan beberapa kabupaten memiliki puluhan ribu pelaku usaha. Kabupaten Banyumas tercatat memiliki sekitar 51.254 unit, Kabupaten Purbalingga bahkan mencapai 73.715 unit, dan Kabupaten Kebumen sekitar 52.497 unit, sedangkan Kota Semarang dan Kota Surakarta masing-masing menampung sekitar 12.565 dan 6.416 unit.

Memasuki 2020, tampak adanya penyesuaian jumlah UMKM di beberapa daerah yang kemungkinan berkaitan dengan awal pandemi, meskipun skala usahanya masih relatif terjaga. Kabupaten Banyumas dan Kota Semarang, misalnya, tetap berada di kisaran 51 ribu dan 12 ribu unit UMKM, sementara wilayah seperti Kabupaten Purbalingga maupun Kota Pekalongan mengalami perubahan kecil dalam jumlah unit usaha yang aktif.

Pada tahun 2021, geliat pemulihan mulai terasa dengan bertambahnya jumlah UMKM di banyak kabupaten/kota. Kabupaten Banyumas tercatat memiliki sekitar 50.878 unit, Kabupaten Purbalingga melonjak tajam hingga 85.966 unit, dan Kota Surakarta bertambah menjadi sekitar 8.050 unit, menggambarkan kembalinya aktivitas usaha rakyat setelah tekanan awal pandemi.

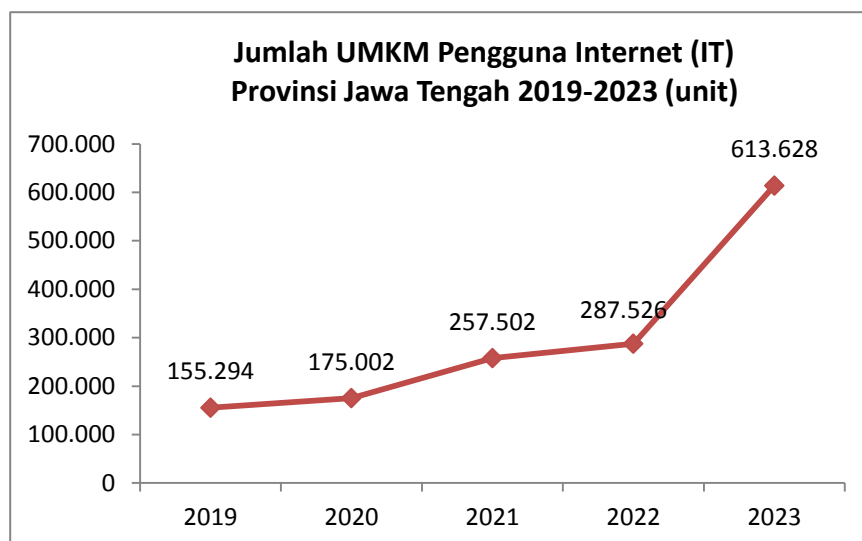
Tren positif berlanjut pada tahun 2022, ketika berbagai daerah mencatat peningkatan lebih lanjut dalam jumlah UMKM yang beroperasi. Kabupaten Banyumas mencapai sekitar 88.949 unit, Kabupaten Magelang sekitar 64.818 unit, sementara Kota Semarang

naik signifikan hingga sekitar 53.446 unit, yang menunjukkan kemampuan adaptasi dan ketahanan pelaku usaha kecil di fase pascapandemi.

Pada tahun 2023, pertumbuhan sektor UMKM di Provinsi Jawa Tengah tampak semakin menguat, dengan beberapa daerah mencatat angka yang cukup besar. Kabupaten Cilacap menampung sekitar 63.203 unit, Kabupaten Banyumas tetap tinggi dengan sekitar 88.949 unit, Kabupaten Purbalingga sekitar 65.567 unit, dan Kota Semarang mempertahankan skala usaha yang besar dengan sekitar 53.446 unit. Pola ini mencerminkan stabilitas sekaligus ekspansi basis UMKM di provinsi tersebut setelah melewati periode tekanan ekonomi sebelumnya.

4.1.9 UMKM Pengguna Internet

UMKM pengguna internet adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Para pelaku UMKM ini memanfaatkan internet untuk berbagai tujuan, misalnya memasarkan produk lewat media sosial, mengelola usaha dengan aplikasi digital, berkomunikasi dengan pelanggan secara daring, serta menerima dan mengirim pesanan melalui *e-commerce*. Dengan konektivitas digital, UMKM dapat memperluas jangkauan usahanya, meningkatkan efisiensi transaksi, dan secara langsung memperbesar peluang mendapatkan pelanggan baru di pasar yang lebih luas. Penggunaan internet juga membuat UMKM lebih adaptif dalam menghadapi perubahan tren bisnis dan menambah daya saing di era digitalisasi ekonomi.



Gambar 4. 9 Grafik Jumlah UMKM Pengguna Internet (IT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 s.d 2023

Grafik di atas menunjukkan jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah yang sudah memanfaatkan internet (IT) tampak terus meningkat sepanjang tahun 2019–2023. Pada tahun 2019 tercatat sekitar 155.294 unit yang menggunakan internet, lalu bertambah menjadi 175.002 unit pada tahun 2020, menunjukkan penggunaan teknologi digital yang mulai menguat di kalangan pelaku UMKM.

Kecenderungan naik ini berlanjut pada tahun 2021 dengan jumlah 257.502 unit dan kembali bertambah pada tahun 2022 menjadi 287.526 unit. Lonjakan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2023, ketika jumlah UMKM pengguna internet melonjak tajam hingga mencapai 613.628 unit. Secara keseluruhan, pola ini menegaskan bahwa pemanfaatan internet oleh UMKM di Provinsi Jawa Tengah tidak hanya meningkat secara bertahap, tetapi mengalami percepatan sangat kuat pada tahun terakhir periode pengamatan.

Pada tahun 2019, penggunaan internet di kalangan UMKM masih sangat terbatas, dengan adopsi yang menonjol hanya di beberapa wilayah tertentu. Kabupaten Purbalingga menjadi yang terdepan dengan 12.546 unit yang aktif memanfaatkan internet, diikuti

Kabupaten Banyumas dengan 8.723 unit dan Kabupaten Cilacap dengan 7.786 unit. Sementara itu, kota-kota besar justru berada di bawah, seperti Kota Semarang dengan 2.139 unit dan Kota Surakarta 1.092 unit, sehingga transformasi digital saat itu tampak masih terkonsentrasi di daerah tertentu saja.

Memasuki tahun 2020, terjadi lonjakan signifikan seiring percepatan digitalisasi akibat situasi pandemi. Kabupaten Purbalingga tetap unggul dengan 14.139 unit UMKM pengguna internet, disusul Kabupaten Banyumas 9.831 unit dan Kabupaten Cilacap 8.774 unit peningkatan juga terlihat di Kota Semarang yang mencapai 2.410 unit dan di kabupaten lain seperti Purworejo yang naik dari 3.353 menjadi 3.779 unit.

Pada tahun 2021, adopsi internet oleh UMKM melonjak tajam hampir di seluruh wilayah. Kabupaten Cilacap mencatat 13.928 unit UMKM pengguna internet, Kabupaten Purbalingga 21.204 unit, dan Kabupaten Banyumas 12.122 unit. Daerah lain seperti Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak juga mulai mengejar dengan rata-rata di atas 3.000 unit UMKM, didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi pelaku usaha kecil.

Tahun 2022 Kabupaten Purbalingga kembali mencatat angka tertinggi dengan 27.707 unit UMKM pengguna internet, diikuti Kabupaten Banyumas 16.398 unit dan Kabupaten Cilacap 13.386 unit. Kota Salatiga mulai menunjukkan kemajuan dengan 1.016 unit, sementara Kota Semarang relatif stabil pada 3.776 unit, menandakan konsistensi dan perluasan adopsi pascapandemi, terutama di sektor industri.

Tahun 2023 menjadi puncak transformasi digital UMKM di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas mencatat 36.238 unit UMKM pengguna internet, Kabupaten Cilacap 25.749 unit, Kabupaten Pati 25.307 unit, dan Kabupaten Purbalingga 26.712 unit. Kota

Semarang mengalami perkembangan pesat dengan 21.774 unit, sedangkan Kota Salatiga juga tumbuh signifikan hingga 10.503 unit, mengindikasikan bahwa digitalisasi UMKM telah menjangkau hampir seluruh kabupaten/kota secara lebih merata.

4.1.10 Analisis Statistik Variabel

Statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini menyajikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan, meliputi nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari setiap variabel penelitian di Provinsi Jawa Tengah. Adapun hasil perhitungan tersebut disajikan dalam tabel statistik deskriptif berikut:

Tabel 4. 1 Statistik Variabel

Statistik	PDRB	PAD	PTPP	BPD	PMDN	PMA	AK	UMKM	IT
Mean	29	430	1.519	2.291	824.772	370.508	94	29020	8.508
Median	21	355	1.520	2.255	247.327	11.452	95	25408	6.514
Max	95	2.865	2.673	5.256	16.418.900	23.142.198	98	88949	36238
Min	12	179	553	849	1.688.500	0.000000	75	1.829	311
Std. Dev.	18	348	473	743	1.721.316	1.733.177	2	18535	6.905

Dari tabel 4.1, menunjukkan statistik dasar dari variabel independen dan dependen penentu dalam penelitian ini. PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah memiliki rata-rata 29 dengan rentang dari minimum 12 hingga maksimum 95, mencerminkan perbedaan yang mencolok terhadap pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rentang minimum 179 hingga maksimum 2.865 dengan rata-rata 430, mengindikasikan ketimpangan signifikan dalam kapasitas fiskal daerah. Transfer ke Daerah (PTPP) relatif stabil dengan rentang minimum 553 hingga maksimum 2.673, sedangkan Belanja Pembangunan Daerah (BPD) rentang minimum 849 hingga maksimum 5.256 dengan rata-rata 2.291. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menunjukkan perbedaan yang mencolok dengan rentang

minimum 1,69 juta rupiah hingga maksimum 16,42 juta rupiah, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai nilai maksimum 23,14 juta rupiah dari titik nol. Tingkat angkatan kerja (AK) dengan rentang minimum 75% hingga maksimum 98% dan rata-rata⁹⁴. Jumlah UMKM bervariasi luas dengan rentang minimum 1.829 unit hingga maksimum 88.949 unit, sedangkan UMKM Pengguna Internet (IT) dengan rentang minimum 311 unit hingga maksimum 36.238 unit dengan rata-rata menunjukkan perbedaan yang mencolok antar daerah. Secara keseluruhan, Tabel 4.1 menggambarkan heterogenitas kondisi ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan perbedaan terbesar pada PMDN, PMA, dan jumlah UMKM, sementara variabel seperti PTPP dan AK relatif stabil, yang menjadi dasar penting dalam analisis regresi panel untuk mengontrol efek heterogenitas antar wilayah.

4.2 Analisis Data Panel

Analisis data panel dilakukan untuk memahami hubungan antara variabel penelitian dengan mempertimbangkan data *time series* dan *cross section*. Dengan metode ini, hasil analisis menjadi lebih akurat dan informatif, terutama dalam mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah tahap ini, analisis dilanjutkan dengan proses estimasi model regresi panel untuk menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian.

4.2.1 Estimasi Model Regresi Panel

Penelitian ini menggunakan dua jenis model regresi panel, yakni regresi panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK sebagai model dasar dan regresi panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT sebagai model utama.

Dalam mengestimasi model regresi data panel, terdapat tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan *common effect*, *fixed effect* dan *random effects*.

4.2.1.1 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Berikut ini adalah tabel hasil estimasi estimasi PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK dengan *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.

Tabel 4.2 Hasil estimasi PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK dengan *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*

Variabel dependen: PDRB						
Variabel Independen	<i>Common Effect</i>		<i>Fixed Effect</i>		<i>Random Effect</i>	
	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob
C	1,247	0,730	-0,771	0,297	-0,273	0,708
LPAD	0,830***	0,000	-0,057***	0,018	-0,034	0,150
LPTPP	-0,673***	0,000	0,175***	0,000	0,145***	0,000
LBPD	-0,401**	0,032	0,189***	0,000	0,155***	0,001
LPMDN	0,058***	0,001	-0,001	0,840	0,001	0,853
LPMA	0,008	0,239	0,002	0,279	0,002	0,111
LAK	0,931	0,238	0,352***	0,007	0,314***	0,015
r-square	0,526		0,993		0,246	
Adjusted R-squared	0,514		0,991		0,226	
S.E. of regression	0,350		0,046		0,052	
Sum squared resid	29.210		0,441		0,645	
Log likelihood	-87,110		426,544			
F-statistic	43,965		707,024		12,909	
Prob (F-statistic)	0,000		0,000		0,000	

Catatan:

- *** prob < 0,01 (signifikan pada alpha 1%)
- ** prob < 0,05 (signifikan pada alpha 5%)
- * prob < 0,10 (signifikan pada alpha 10%)

Berdasarkan Tabel 4.2 model regresi data panel adalah sebagai berikut:

1. *Common Effect Model*

Konstanta sebesar 1,247 menunjukkan nilai dasar PDRB tanpa dipengaruhi semua variabel independen (PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK) atau dalam kondisi dasar. Koefisien 0,830 pada variabel PAD berarti jika PAD meningkat sebesar 1%.

maka PDRB akan meningkat sebesar 0,830%. Sebaliknya, koefisien negatif pada variabel PTPP (-0,673) menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada PTPP maka PDRB akan menurun sebesar 0,673%. Demikian juga dengan koefisien BPD (-0,401) menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada BPD akan menurunkan PDRB sebesar 0,401%. Sementara itu, variabel PMDN memiliki koefisien 0,058 yang berarti jika PMDN meningkat 1% maka PDRB akan meningkat sebesar 0,058%. Koefisien pada PMA sebesar 0,008 yang berarti jika PMA meningkat 1% maka PDRB akan meningkat sebesar 0,008%. Demikian juga dengan variable AK dengan koefisien sebesar 0,931 memberikan efek positif yang artinya peningkatan 1% pada AK maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,931%.

2. *Fixed Effect Model*

Konstanta sebesar (-0,771) menunjukkan nilai dasar PDRB tanpa dipengaruhi semua variabel independen (PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK) atau dalam kondisi dasar. Koefisien (-0,057) pada variabel PAD berarti jika PAD meningkat sebesar 1%, maka PDRB akan menurun sebesar 0,057%. Koefisien pada variabel PTPP adalah 0,175 maka setiap kenaikan 1% pada PTPP maka PDRB akan meningkat sebesar 0,175%. Demikian juga dengan BPD yang memiliki koefisien sebesar 0,189 menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada BPD maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,189%. Sementara itu, variabel PMDN memiliki koefisien (-0,001), berarti ini memberikan efek negatif maka jika PMDN meningkat sebesar 1% maka PDRB akan menurun sebesar 0,001%. Sedangkan PMA memiliki koefisien sebesar 0,001 yang artinya setiap peningkatan 1% pada PMA maka PDRB akan meningkat sebesar 0,001%. Demikian juga dengan AK dengan koefisien sebesar 0,352 artinya

peningkatan 1% pada AK ini akan meningkatkan PDRB sebesar 0,352%.

3. *Random Effect Model*

Konstanta sebesar (-0,273) menunjukkan nilai dasar PDRB tanpa dipengaruhi semua variabel independen (PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK) atau dalam kondisi dasar. Koefisien (-0,034) pada variabel PAD berarti jika PAD meningkat sebesar 1%, maka PDRB akan menurun sebesar 0,034%. Koefisien pada variabel PTPP adalah 0,145 maka setiap kenaikan 1% pada PTPP maka PDRB akan meningkat sebesar 0,145%. Demikian juga dengan BPD yang memiliki koefisien sebesar 0,155 menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada BPD maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,155%. Sementara itu, variabel PMDN memiliki nilai koefisien (-0,001) yang memberikan efek negatif maka jika PMDN meningkat sebesar 1% maka PDRB akan menurun sebesar 0,001%. Sedangkan PMA memiliki koefisien sebesar 0,002 yang artinya setiap peningkatan 1% pada PMA maka PDRB akan meningkat sebesar 0,002%. Demikian juga dengan AK dengan koefisien sebesar 0,314 artinya peningkatan 1% pada AK ini akan meningkatkan PDRB sebesar 0,314%.

4.2.1.2 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Pada model regresi ini memasukkan variabel interaksi UMKM pengguna internet di wilayah kota (KOTA_IT) untuk mengukur dampak kombinasi antara kemajuan digital UMKM dan keunggulan karakteristik wilayah kota terhadap variasi capaian PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Variabel tersebut bertujuan menelusuri apakah kontribusi UMKM yang sudah menggunakan internet jauh lebih besar di wilayah kota dibanding dengan wilayah kabupaten. Berikut ini adalah tabel estimasi PDRB, PAD,

PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT dengan *Common Effect*.

Fixed Effect. dan *Random Effect*.

Tabel 4.3 Hasil estimasi PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT dengan *Common Effect*. *Fixed Effect*. dan *Random Effect*

Variabel dependen: PDRB						
Variabel Independen	<i>Common Effect</i>		<i>Fixed Effect</i>		<i>Random Effect</i>	
	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob
C	-4,290	0,269	0,688	0,415	0,973	0,226
LPAD	0,533***	0,000	-0,077***	0,012	-0,063**	0,036
LPTPP	-0,516	0,119	0,015	0,821	-0,001	0,992
LBPD	-0,034	0,922	0,112**	0,059	0,107**	0,065
LPMDN	0,060***	0,013	-0,001	0,762	-0,002	0,665
LPMA	0,012	0,185	0,001	0,639	0,001	0,486
LAK	1,873**	0,024	0,427***	0,001	0,413***	0,001
LUMKM	-0,052	0,787	-0,038	0,325	-0,056	0,131
LIT	-0,059	0,733	0,054*	0,103	0,054**	0,092
LKOTA_IT	0,040**	0,038	0,011	0,311	0,036***	0,000
r-square	0,590		0,995		0,318	
Adjusted R-squared	0,568		0,994		0,281	
S.E. of regression	0,332		0,040		0,044	
Sum squared resid	18,174		0,208		0,322	
Log likelihood	-50,147		341,113			
F-statistic	26,42		647,751		0,855	
Prob (F-statistic)	0,000		0,000		0,000	

Catatan:

- *** prob < 0,01 (signifikan pada alpha 1%)
- ** prob < 0,05 (signifikan pada alpha 5%)
- * prob < 0,10 (signifikan pada alpha 10%)

Berdasarkan Tabel 4.3 model regresi data panel adalah sebagai berikut:

1. *Common Effect Model*

Konstanta sebesar (-4,290) menunjukkan nilai dasar PDRB tanpa dipengaruhi semua variabel independen (PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT) atau dalam kondisi dasar. Koefisien 0,533 pada variabel PAD berarti jika PAD meningkat sebesar 1%. maka PDRB akan meningkat sebesar 0,533%.

Sebaliknya, koefisien negatif pada variabel PTPP (-0,516) menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada PTPP maka PDRB akan menurun sebesar 0,516%. Demikian juga dengan koefisien BPD (-0,034) menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada BPD akan menurunkan PDRB sebesar 0,034%. Sementara itu, variabel PMDN memiliki koefisien 0,060 yang berarti jika PMDN meningkat 1% maka PDRB akan meningkat sebesar 0,060%, koefisien pada PMA sebesar 0,012 yang berarti jika PMA meningkat 1% maka PDRB akan meningkat sebesar 0,012%. Demikian juga dengan variabel AK dengan koefisien sebesar 1,873 memberikan efek positif yang artinya peningkatan 1% pada AK maka akan meningkatkan PDRB sebesar 1,873%. Namun variabel UMKM memiliki nilai koefisien (-0,052) yang berpengaruh negatif, artinya ketika UMKM naik 1% maka PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,052%, demikian juga dengan variabel IT yang memiliki koefisien sebesar (-0,059) yang artinya ketika IT naik sebesar 1% maka PDRB akan turun sebesar 0,059%. Akan tetapi pada variabel interaksi internet di kota yaitu KOTA_IT memiliki koefisien sebesar 0,040 yang artinya setiap kenaikan 1% KOTA_IT maka PDRB akan meningkat juga sebesar 0,040%.

2. *Fixed Effect Model*

Konstanta sebesar 0,688 menunjukkan nilai dasar PDRB tanpa dipengaruhi semua variabel independen (PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT) atau dalam kondisi dasar. Koefisien (-0,077) pada variabel PAD berarti jika PAD meningkat sebesar 1%, maka PDRB akan menurun sebesar 0,077%. Koefisien pada variabel PTPP adalah 0,015 maka setiap kenaikan 1% pada PTPP maka PDRB akan meningkat sebesar 0,012%. Demikian juga dengan BPD yang

memiliki koefisien sebesar 0,112 menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada BPD maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,112%. Sementara itu, variabel PMDN (-0,001) berarti ini memberikan efek negatif maka jika PMDN meningkat sebesar 1%, maka PDRB akan menurun sebesar 0,001%. Sedangkan PMA memiliki koefisien sebesar 0,001 yang artinya setiap peningkatan 1% pada PMA maka PDRB akan meningkat sebesar 0,001%. Demikian juga dengan AK dengan koefisien sebesar 0,427 artinya peningkatan 1% pada AK ini akan meningkatkan PDRB sebesar 0,427%. Namun variabel UMKM memiliki nilai koefisien (-0,038) yang berpengaruh negatif, artinya ketika UMKM naik 1% maka PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,038%. Sedangkan variabel IT memiliki koefisien sebesar 0,054 yang artinya ketika IT naik sebesar 1% maka PDRB akan naik sebesar 0,054%. Demikian juga pada variabel interaksi internet di kota yaitu KOTA_IT memiliki koefisien sebesar 0,011 yang artinya setiap kenaikan 1% KOTA_IT maka PDRB akan meningkat juga sebesar 0,011%.

3. *Random Effect Model*

Konstanta sebesar 0,973 menunjukkan nilai dasar PDRB tanpa dipengaruhi semua variabel independen (PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT) atau dalam kondisi dasar. Koefisien (-0,063) pada variabel PAD berarti jika PAD meningkat sebesar 1%, maka PDRB akan menurun sebesar 0,063%. Demikian juga pada variabel PTPP (-0,001) menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada PTPP maka PDRB akan menurun sebesar 0,001%. Pada koefisien BPD 0,107 menunjukkan bahwa kenaikan 1% pada BPD akan meningkatkan PDRB sebesar 0,107%. Sementara itu, variabel PMDN memiliki koefisien (-0,02) yang berarti jika PMDN

meningkat 1% maka PDRB akan menurun sebesar 0,002%. Koefisien pada PMA sebesar 0,001 yang berarti jika PMA meningkat 1% maka PDRB akan meningkat sebesar 0,001%. Demikian juga dengan variabel AK dengan koefisien sebesar 0,413 memberikan efek positif yang artinya peningkatan 1% pada AK maka akan meningkatkan PDRB sebesar 0,413%. Namun variabel UMKM memiliki nilai koefisien (-0,056) yang berpengaruh negatif, artinya ketika UMKM naik 1% maka PDRB akan mengalami penurunan sebesar 0,056%. Sedangkan pada variabel IT yang memiliki koefisien sebesar 0,054 yang artinya ketika IT naik sebesar 1% maka PDRB akan meningkat sebesar 0,054%. Demikian juga pada variabel interaksi internet di kota yaitu KOTA_IT memiliki koefisien sebesar 0,036 yang artinya setiap kenaikan 1% KOTA_IT maka PDRB akan meningkat juga sebesar 0,036%.

4.2.2 Teknik Penaksiran Model

Berdasarkan hasil regresi data panel didapatkan tiga model yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Dari hasil uji model tersebut di atas maka dapat dilakukan uji kesesuaian model dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman.

4.2.2.1 Uji Chow

Pemilihan antara model *Common Effect* dan *Fixed Effect* dalam regresi data panel diawali dengan melakukan uji Chow. Dalam kerangka pengujian ini, jika nilai probabilitas *chi-square* (atau *probabilitas cross-section F*) lebih kecil dari 0,05, maka model yang dianggap lebih sesuai adalah *Fixed Effect*. Sebaliknya, jika *probabilitas chi-square* lebih besar dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Common Effect*.

Jika hasil uji Chow mengarah pada penggunaan model *Common Effect*, langkah

berikutnya adalah melakukan uji Lagrange Multiplier (LM test) untuk membandingkan apakah model *Common Effect* atau *Random Effect* yang lebih tepat digunakan. Namun, bila uji Chow justru menunjukkan bahwa *Fixed Effect* lebih unggul, analisis perlu dilanjutkan dengan uji Hausman untuk menentukan apakah model final yang digunakan sebaiknya *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Dengan demikian, rangkaian uji ini membantu peneliti memilih spesifikasi model panel yang paling konsisten dan efisien.

1. Uji Chow Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Berikut ini adalah tabel hasil Uji Chow PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK.

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	391.367327	(34,204)	0.0000
Cross-section Chi-square	1027.309902	34	0.0000

Hasil pada tabel 4.4 menunjukkan probabilitas dari *cross-section chi-square* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Sesuai hipotesis maka pada model ini menggunakan model *Fixed Effect*.

2. Uji Chow Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Berikut ini adalah tabel hasil uji Chow PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT:

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	333.250207	(34,131)	0.0000
Cross-section Chi-square	782.521628	34	0.0000

Hasil pada tabel 4.5 menunjukkan probabilitas dari *cross-section chi-square* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Sesuai hipotesis maka pada model ini menggunakan model *Fixed Effect*.

4.2.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang lebih sesuai dalam analisis data panel. Dalam pengujian ini, jika nilai probabilitas *chi-square* kurang dari 0,05 maka model *Fixed Effect* dinilai lebih cocok dipakai. Sebaliknya, jika probabilitas *chi-square* lebih dari 0,05 maka model *Random Effect* dianggap sebagai pilihan yang lebih tepat.

1. Uji Hausman Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Berikut ini adalah tabel hasil uji Hausman PDRB, PAD, PTPP, BPD,

PMDN, PMA, dan AK:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Correlated Random Effects – Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	66.533209	6	0.0000

Hasil pada tabel 4.6 menunjukkan probabilitas dari *cross-section chi-square* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Sesuai hipotesis maka pada model ini menggunakan model *Fixed Effect*.

2. Uji Hausman Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Berikut ini adalah tabel hasil uji Hausman PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Hausman PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	46.216260	9	0.0000

Hasil pada tabel 4.7 menunjukkan probabilitas dari *cross-section chi-square* sebesar 0,0000 lebih rendah dari 0,05. Sesuai hipotesis maka pada model ini menggunakan model *Fixed Effect*.

Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman pada model dasar dan model utama, model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah model *Fixed Effect*. Oleh karena itu, analisis selanjutnya menggunakan model *Fixed Effect* dengan variabel dependen yaitu PDRB per kapita, sedangkan variabel independen yang digunakan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP), Belanja Pemerintah Daerah (BPD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Angkatan Kerja (AK). Selanjutnya untuk model utama ditambahkan dengan variabel independen jumlah UMKM dan UMKM pengguna internet (IT), serta UMKM pengguna internet di wilayah kota (KOTA_IT) sebagai variabel interaksi.

Tabel 4. 8 Hasil Model *Fixed Effect* PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Variabel dependen: PDRB				
Variabel Independen	<i>Fixed Effect</i>		<i>Random Effect</i>	
	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob
C	0,688	0,415	0,973	0,226
LPAD	-0,077***	0,012	-0,063**	0,036
LPTPP	0,015	0,821	-0,001	0,992
LBPD	0,112**	0,059	0,107**	0,065
LPMDN	-0,001	0,762	-0,002	0,665
LPMA	0,001	0,639	0,001	0,486
LAK	0,427***	0,001	0,413***	0,001
LUMKM	-0,038	0,325	-0,056	0,131
LIT	0,054*	0,103	0,054**	0,092
LKOTA_IT	0,011	0,311	0,036***	0,000
R-squared	0,995		0,318	
Adjusted R-squared	0,994		0,281	
S.E. of regression	0,040		0,044	
Sum squared resid	0,208		0,322	
Log likelihood	341,113			
F-statistic	647,751		0,855	
Prob(F-statistic)	0,000		0,000	

Catatan:

- *** prob < 0.01 (signifikan pada alpha 1%)
- ** prob < 0.05 (signifikan pada alpha 5%)
- * prob < 0.10 (signifikan pada alpha 10%)

Tabel 4.8 menyajikan hasil estimasi dari model *Fixed Effect* dan *Random Effect* mengingat *Random Effect* juga memperlihatkan signifikansi yang kuat pada sejumlah variabel penting. Khususnya, variabel Angkatan Kerja (AK) dan variable UMKM pengguna internet di kota (KOTA_IT) yang menonjol sangat signifikan di model *Random Effect*. Meskipun model *Fixed Effect* lebih unggul dari sisi kecocokan data, model *Random Effect* menawarkan informasi yang lebih kuat terkait variabel UMKM pengguna internet di kota, sehingga presentasi ganda ini memperkaya analisis secara menyeluruh.

4.3 Pengujian Hipotesis Penelitian

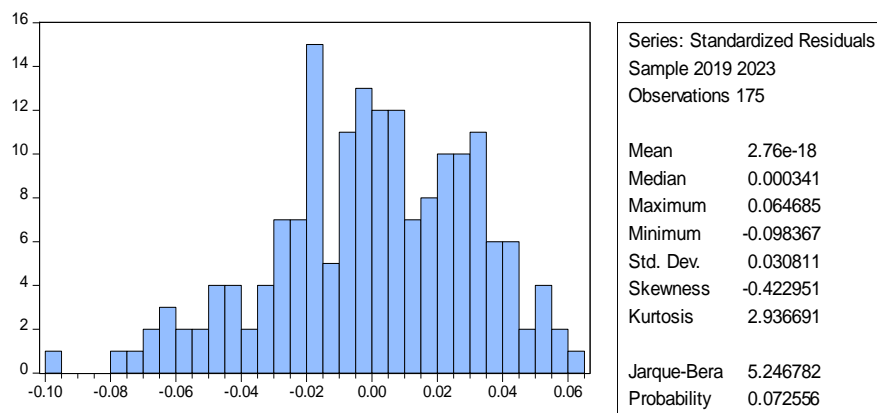
Pengujian model dalam penelitian ini meliputi uji Asumsi Klasik, uji statistik yang meliputi uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan analisis koefisien determinasi (R^2), sebagai berikut:

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menerapkan dua jenis model regresi panel, yakni model dasar dan model utama. Dari kedua model tersebut, model utama dijadikan acuan utama dalam analisis karena telah mencakup variabel kebaruan penelitian serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Dengan demikian, pengujian asumsi klasik difokuskan pada model utama, yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.3.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan memastikan bahwa data dalam model regresi, terutama residual, mengikuti distribusi normal sehingga estimasi koefisien dan uji statistik dapat diandalkan. Jarque–Bera (JB) digunakan untuk mengecek hal ini dengan melihat apakah *skewness* dan *kurtosis* data sejalan dengan karakteristik distribusi normal. Jika nilai probabilitas JB lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan, residual dianggap berdistribusi normal dan asumsi normalitas dinilai terpenuhi. Berikut ini adalah Uji Normalitas Model *Fixed Effect* PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT:



Gambar 4. 10 Diagram Uji Normalitas Model *Fixed Effect* PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Berdasarkan gambar 4.10 Probabilitas Jarque–Bera sebesar 0,073 yang lebih tinggi daripada tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa residual model tidak menyimpang secara berarti dari distribusi normal. Artinya, secara statistik tidak ada indikasi pelanggaran asumsi normalitas pada komponen *error*. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dilanjutkan ke tahap analisis panel berikutnya tanpa kekhawatiran adanya gangguan akibat distribusi residual yang menyimpang.

4.3.1.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas terjadi ketika beberapa variabel independen dalam regresi berganda saling berkorelasi kuat sehingga kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel terikat menjadi sulit dipisahkan. Untuk mendeteksinya, dapat digunakan regresi bantu yang melihat seberapa besar satu variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya melalui statistik F. Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menjadi indikator praktis. Jika VIF yang mendekati 1 menunjukkan tidak ada masalah berarti, sedangkan VIF yang sangat tinggi (misalnya di atas 10) menandakan multikolinieritas serius yang berpotensi membuat koefisien regresi tidak stabil dan kurang dapat diinterpretasikan. Berikut ini

adalah tabel uji multikolinearitas model *Fixed Effect* PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT:

Tabel 4. 9 Uji Multikolinearitas Model *Fixed Effect* PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Variance Inflation Factors
Date: 11/15/25 Time: 19:38
Sample: 20192023
Included observations: 175

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.273940	38019.28	NA
LPAD	0.000692	11.10580	1.632887
LPTPP	0.004046	372.5987	2.085300
LBPD	0.038687	4685.099	1.177324
LPMDN	4.24E-05	1.366302	1.365695
LPMA	2.07E-05	1.056880	1.056642
LAK	0.224294	30238.87	1.121012
LUMKM	0.000416	17.13943	5.078508
LIT	0.000139	6.288111	3.365098
KOTA_LIT	0.000157	39.77318	3.501865

Berdasarkan tabel 4.9 nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk seluruh variabel independen yaitu PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT berada di bawah batas 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa model tidak menghadapi persoalan multikolinearitas yang serius. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan linear antarsesama variabel independen relatif lemah, sehingga kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel terikat masih dapat dibedakan dengan jelas. Dalam situasi seperti ini, estimasi koefisien regresi cenderung lebih stabil dan mudah ditafsirkan, sehingga hasil uji t maupun uji F dapat dijadikan dasar penarikan kesimpulan secara lebih kuat.

4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas diperlukan untuk memverifikasi keandalan model regresi panel sebelum menarik kesimpulan, tanpa pengujian ini koefisien regresi berisiko menghasilkan selang kepercayaan yang salah dalam menarik hipotesis. Uji Glejser dalam penelitian ini digunakan untuk mendeteksi adanya

heteroskedastisitas. Berikut ini adalah tabel uji hetreoskedastisitas pada Model *Fixed Effect* PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT:

Tabel 4. 10 Uji Heteroskedastisitas Model *Fixed Effect* PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Dependent Variable: ABSRES
Method: Panel Least Squares
Date: 01/30/26 Time: 12:35
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.289831	0.419905	-0.690229	0.4913
LPAD	-0.021696	0.015209	-1.426507	0.1561
LPTPP	-0.029483	0.032547	-0.905851	0.3667
LBPD	0.041765	0.029343	1.423333	0.1570
LPMDN	-0.000179	0.002110	-0.084951	0.9324
LPMA	-0.000874	0.000892	-0.978788	0.3295
LAK	0.074625	0.059851	1.246842	0.2147
LUMKM	0.005752	0.019031	0.302237	0.7630
LIT	-0.006407	0.016523	-0.387782	0.6988
KOTA_LIT	0.006703	0.005529	1.212336	0.2276

Berdasarkan tabel 4.10 nilai probabilitas untuk seluruh variabel independen yaitu PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 tidak ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi panel ini, di mana varians residual diasumsikan konstan di seluruh pengamatan.

4.3.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar residual. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan statistik Durbin-Watson dengan membandingkan nilai statistik Durbin-Watson yang dihasilkan dengan nilai batas pada tabel DW. Berikut ini adalah tabel uji autokorelasi pada model *Fixed Effect* PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT:

Tabel 4. 11 Uji Autokorelasi Model *Fixed Effect* PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Uji Autokorelasi	DW test	dL	dU	4-dU	4-dL
Durbin-Watson	1,9191	1,6582	1,8490	2,3418	2,0809

Berdasarkan tabel 4.11 hasil dari Uji Durbin-Watson (DW), nilai DW berada pada rentang tidak ada autokorelasi. Dengan demikian, model regresi panel dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari gejala autokorelasi, sehingga estimasi koefisien dan uji statistiknya dapat diandalkan untuk analisis dampak variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik pada model regresi utama, dapat diketahui bahwa model telah memenuhi kriteria normalitas, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terdapat heteroskedastisitas, serta tidak ditemukan autokorelasi. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik tersebut maka hasil estimasi koefisien regresi dapat diinterpretasikan secara ekonometrika dan digunakan sebagai dasar dalam analisis serta penarikan kesimpulan penelitian.

4.3.2 Uji Statistik Parsial (Uji t)

Uji t ini merupakan bagian krusial dari pengujian hipotesis parsial dalam model regresi ekonometrika, yang bertujuan untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi tertentu. Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa koefisien regresi (β) sama dengan nol, artinya variabel independen tidak berpengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan sebaliknya, dengan keputusan diambil berdasarkan perbandingan nilai probabilitas (*p-value*) terhadap α .

4.3.2.1 Uji t Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui variabel PAD memiliki nilai koefisien (-0,057)

dan probabilitas 0,018. Dengan menggunakan uji satu sisi, nilai probabilitas tersebut menjadi 0,009 sehingga PAD berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% terhadap PDRB per kapita. Variabel PTPP memiliki nilai koefisien 0,175 dan probabilitas 0,000 dengan demikian PTPP berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 1% terhadap PDRB per kapita. Variabel BPD memiliki nilai koefisien 0,189 dan probabilitas 0,000 dengan demikian BPD berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 1% terhadap PDRB per kapita. Variabel AK memiliki nilai koefisien 0,352 dan probabilitas 0,007 dengan demikian AK berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 1% terhadap PDRB per kapita.

4.3.2.2 Uji t Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui variabel PAD memiliki nilai koefisien (-0,077) dan probabilitas 0,012. Dengan menggunakan uji satu sisi, nilai probabilitas tersebut menjadi 0,006 sehingga PAD berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% terhadap PDRB per kapita. Variabel BPD memiliki nilai koefisien 0,112 dan probabilitas 0,059. Dengan menggunakan uji satu sisi, nilai probabilitas tersebut menjadi 0,029 sehingga BPD berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap PDRB per kapita. Variabel AK memiliki nilai koefisien 0,427 dan probabilitas 0,001 dengan demikian AK berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 1% terhadap PDRB per kapita. Variabel IT memiliki nilai koefisien 0,011 dan probabilitas 0,103. Dengan menggunakan uji satu sisi, nilai probabilitas tersebut menjadi 0,051 sehingga IT berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 10% terhadap PDRB per kapita.

4.3.3 Uji Statistik Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (*p-value*). Jika *p-value* < α (0,05), maka H_0 ditolak, yang berarti kumpulan variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika *p-value* > α (0,05), maka H_0 tidak ditolak, sehingga secara simultan variabel independen dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Rumusan hipotesis untuk uji F dapat disajikan sebagai berikut:

- a. $H_0 : \beta \geq 0,05$, artinya semua variabel independen tidak terdapat pengaruh secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
- b. $H_0 : \beta \leq 0,05$, artinya semua variabel independen terdapat pengaruh secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

4.3.3.1 Uji F Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil uji F diperoleh nilai Prob (F-Statistic) sebesar 0,000. Karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, maka H_0 dinyatakan ditolak. Dengan demikian, secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP), Belanja Pemerintah Daerah (BPD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Angkatan Kerja (AK) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB).

4.3.3.2 Uji F Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji F diperoleh nilai Prob (F-Statistic) sebesar

0,000. Karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, maka H_0 dinyatakan ditolak. Dengan demikian, secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP), Belanja Pemerintah Daerah (BPD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Angkatan Kerja (AK), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), UMKM pengguna internet (IT), dan UMKM pengguna internet di kota (KOTA_IT) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB).

4.3.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa baik suatu model mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel independen. Nilai adjusted R^2 berada pada kisaran 0 hingga 1, semakin mendekati 1 maka semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel-variabel independen di dalam model, sehingga informasi yang digunakan untuk melakukan prediksi dapat dikatakan semakin lengkap.

4.3.4.1 Uji R^2 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat hasil pengujian menggunakan model *Fixed Effect* diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar 0,991, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP), Belanja Pemerintah Daerah (BPD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Angkatan Kerja (AK) yang ada dalam model dapat menjelaskan PDRB per kapita sebesar 99,1% sedangkan 0,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3.4.2 Uji R² Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat hasil pengujian menggunakan model *Fixed Effect* diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0,994, artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP), Belanja Pemerintah Daerah (BPD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Angkatan Kerja (AK), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), UMKM pengguna internet (IT), dan UMKM pengguna internet di kota (KOTA_IT) yang ada dalam model dapat menjelaskan PDRB per kapita sebesar 99,4% sedangkan 0,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

4.4.1.1 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Berdasarkan hasil estimasi dengan model *Fixed Effect*, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif pada tingkat signifikansi 1% terhadap PDRB per kapita. Nilai koefisien PAD sebesar (-0,057) menunjukkan bahwa peningkatan PAD sebesar 1% diikuti penurunan PDRB per kapita sebesar 0,057%. Temuan ini menggambarkan bahwa peningkatan PAD selama periode penelitian justru berkaitan dengan menurunnya PDRB per kapita, sehingga pola perolehan dan pemanfaatan PAD perlu dikaji lebih jauh dalam perumusan status dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung penguatan *sustainable livelihood* di Provinsi

Jawa Tengah.

4.4.1.2 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Berdasarkan hasil estimasi dengan model *Fixed Effect*, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif pada tingkat signifikansi 1% terhadap PDRB per kapita. Nilai koefisien PAD sebesar $(-0,077)$ menunjukkan bahwa peningkatan PAD sebesar 1% diikuti penurunan PDRB per kapita sebesar 0,077%. Temuan ini menggambarkan bahwa peningkatan PAD selama periode penelitian justru berkaitan dengan menurunnya PDRB per kapita, sehingga pola perolehan dan pemanfaatan PAD perlu dikaji lebih jauh dalam perumusan status dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung penguatan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah. Temuan tersebut tidak sejalan dengan Teori *Fiskal Federalisme* yang dikemukakan Richard Musgrave (1959) dan tidak sejalan juga dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menemukan kontribusi positif PAD terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDRB daerah, misalnya penelitian Shafwah et al. (2024) di Kota Makassar maupun Azis et al. (2022) di Provinsi Riau yang sama-sama menunjukkan bahwa PAD mendorong peningkatan kinerja ekonomi daerah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan PAD di Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya memberikan dorongan produktif bagi perekonomian daerah. Kenaikan PAD diduga belum secara konsisten dialokasikan pada belanja pembangunan yang berorientasi jangka panjang, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan

UMKM, tetapi relatif lebih banyak terserap pada belanja rutin dan birokrasi yang berdampak terbatas terhadap peningkatan output. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan yang secara khusus menganalisis komposisi dan kualitas belanja daerah untuk memastikan peran PAD dalam mendorong peningkatan PDRB per kapita. Pada model utama, pengaruh negatif PAD terhadap PDRB per kapita bahkan tampak lebih kuat, sehingga menegaskan bahwa kualitas pengelolaan dan penggunaan PAD perlu mendapat perhatian khusus dalam perumusan kebijakan daerah.

4.4.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pengaruh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

4.4.2.1 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Berdasarkan hasil estimasi dengan model *Fixed Effect*, variabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP) berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 1% terhadap PDRB per kapita. Nilai koefisien PTPP sebesar 0,175 menunjukkan bahwa peningkatan PTPP sebesar 1% diikuti meningkatnya PDRB per kapita sebesar 0,175%. Temuan ini menggambarkan bahwa peningkatan PTPP selama periode penelitian berkaitan dengan menguatnya kinerja PDRB per kapita, sehingga pola perolehan dan pemanfaatan PTPP perlu dikaji lebih jauh dalam perumusan status dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung penguatan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.

4.4.2.2 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Berdasarkan hasil estimasi dengan model *Fixed Effect*, variabel Pendapatan

Transfer Pemerintah Pusat (PTPP) tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita. Meskipun koefisien PTPP menunjukkan arah hubungan positif terhadap PDRB per kapita, pengaruh tersebut tidak terbukti secara statistik. Oleh karena itu, pola perolehan dan pemanfaatan PTPP tetap perlu dikaji lebih lanjut, karena hasil penelitian ini belum memberikan bukti kuat bahwa peningkatan PTPP secara langsung mampu mendorong peningkatan PDRB per kapita yang mendukung penguatan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam model dasar, variabel PTPP dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Namun, ketika dalam model utama PTPP menjadi tidak berpengaruh, hal ini tidak sejalan dengan Teori *Transfer Dependency* yang dikemukakan oleh Bahl & Martinez-Vazquez (2022) dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardhana et al. (2013) dan Hasan (2015) di mana dana transfer dari pusat sangat berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan dana transfer pusat di Provinsi Jawa Tengah belum berjalan cukup efektif untuk benar-benar meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. PTPP kemungkinan besar digunakan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai dan biaya operasional pemerintahan, sehingga ruang fiskal yang tersisa untuk belanja pembangunan yang bersifat produktif relatif terbatas. Dalam kondisi tersebut, tambahan dana transfer cenderung hanya menjaga keberlanjutan layanan dasar dan stabilitas fiskal, tetapi belum cukup mendorong ekspansi kapasitas produksi, peningkatan produktivitas, maupun perluasan aktivitas ekonomi yang mampu mengangkat PDRB per kapita secara signifikan.

4.4.3 Belanja Pemerintah Daerah

Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

4.4.3.1 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Berdasarkan hasil estimasi dengan model *Fixed Effect*, variabel Belanja Pemerintah Daerah (BPD) berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 1% terhadap PDRB per kapita. Nilai koefisien BPD sebesar 0,189 menunjukkan bahwa peningkatan BPD sebesar 1% diikuti meningkatnya PDRB per kapita sebesar 0,189%. Temuan ini menggambarkan bahwa peningkatan BPD selama periode penelitian berkaitan dengan meningkatnya PDRB per kapita, sehingga pola perolehan dan pemanfaatan BPD perlu dikaji lebih jauh dalam perumusan status dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung penguatan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.

4.4.3.2 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Berdasarkan hasil estimasi dengan model *Fixed Effect* variabel Belanja Pemerintah Daerah (BPD) berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 5% terhadap PDRB per kapita. Nilai koefisien BPD sebesar 0,112 menunjukkan bahwa peningkatan BPD sebesar 1% diikuti meningkatnya PDRB per kapita sebesar 0,112%. Temuan ini menggambarkan bahwa peningkatan BPD selama periode penelitian berkaitan dengan meningkatnya PDRB per kapita, sehingga pola perolehan dan pemanfaatan BPD perlu dikaji lebih jauh dalam perumusan status dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung penguatan *sustainable*

livelihood di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini, Belanja Pemerintah Daerah (BPD) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Temuan tersebut sejalan dengan Teori *Keynesianisme* yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes dan penelitian Saputra et al. (2021), yang menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, belanja daerah berperan sebagai salah satu instrumen fiskal yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan memperkuat keberlanjutan penghidupan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Namun, dampak positif tersebut sangat bergantung pada bagaimana belanja itu dialokasikan dan dikelola, serta bagaimana ia berinteraksi dengan dinamika dan kondisi ekonomi lainnya.

4.4.4 Penanaman Modal Dalam Negeri

Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

4.4.4.1 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Berdasarkan hasil estimasi dengan model *Fixed Effect* variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB). Koefisien PMDN menunjukkan arah hubungan negatif terhadap PDRB per kapita, meskipun pengaruh tersebut tidak terbukti secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PMDN selama periode penelitian belum mampu mendorong peningkatan PDRB per kapita. Oleh karena itu, pola perolehan dan pemanfaatan PMDN perlu dikaji lebih jauh dalam perumusan status dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung penguatan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.

4.4.4.2 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Berdasarkan hasil estimasi dengan model *Fixed Effect* variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB). Koefisien PMDN menunjukkan arah hubungan negatif terhadap PDRB, meskipun pengaruh tersebut tidak terbukti secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa berdasarkan data yang digunakan belum terdapat bukti kuat bahwa peningkatan PMDN secara langsung mempengaruhi PDRB per kapita. Oleh karena itu pola perolehan dan pemanfaatan PMDN tetap perlu dikaji lebih lanjut dalam perumusan status dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung penguatan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa PMDN tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah. Temuan tersebut tidak sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang umumnya menemukan hubungan positif antara PMDN dan pertumbuhan ekonomi, seperti penelitian Albasyari & Priyadi (2023) di Provinsi Jawa Tengah serta Hikmatiyar & Hayati (2011), yang memperoleh hasil bahwa PMDN berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa aliran penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya mengarah pada sektor-sektor yang mampu memberikan dampak langsung dan kuat terhadap peningkatan PDRB per kapita.

4.4.5 Penanaman Modal Asing

Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

4.4.5.1 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Berdasarkan hasil estimasi dengan model *Fixed Effect*, variabel Penanaman Modal Asing (PMA) tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB). Meskipun koefisien PMA menunjukkan arah hubungan positif terhadap PDRB per kapita, pengaruh tersebut tidak terbukti secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa berdasarkan data yang digunakan belum terdapat bukti kuat bahwa peningkatan PMA secara langsung mendorong kinerja PDRB per kapita, sehingga pola perolehan dan pemanfaatan PMA tetap perlu dikaji lebih lanjut dalam perumusan status dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung penguatan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.

4.4.5.2 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Berdasarkan hasil estimasi dengan model *Fixed Effect*, variabel Penanaman Modal Asing (PMA) tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB). Meskipun koefisien PTPP menunjukkan arah hubungan positif terhadap PDRB per kapita pengaruh tersebut tidak terbukti secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa berdasarkan data yang digunakan belum terdapat bukti kuat bahwa peningkatan PMA secara langsung mempengaruhi PDRB per kapita, sehingga pola perolehan dan pemanfaatan PMA tetap perlu dikaji lebih lanjut dalam perumusan status dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung penguatan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini, variabel PMA tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun koefisien PMA menunjukkan arah hubungan positif

terhadap PDRB per kapita, arah hubungan tersebut sejalan dengan *Endogenous Growth Theory* dan temuan Albasyari & Priyadi (2023) di Provinsi Jawa Tengah yang menemukan bahwa PMA berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, demikian pula Hikmatiyar & Hayati (2011), yang menyatakan bahwa PMA berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh konsentrasi investasi pada sektor atau wilayah tertentu sehingga dampaknya belum terasa secara merata.

4.4.6 Angkatan Kerja

Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

4.4.6.1 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Berdasarkan hasil estimasi dengan model *Fixed Effect*, variabel Angkatan Kerja (AK) berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 1% terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB). Nilai koefisien AK sebesar 0,352 menunjukkan bahwa peningkatan AK sebesar 1% diikuti meningkatnya PDRB per kapita sebesar 0,352%. Temuan ini mengindikasikan bahwa meningkatnya AK selama periode penelitian berkaitan dengan meningkatnya PDRB per kapita, sehingga pola perolehan dan pemanfaatan AK perlu dikaji lebih jauh dalam perumusan status dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung penguatan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.

4.4.6.2 Regresi Panel PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Berdasarkan hasil estimasi dengan model *Fixed Effect*, variabel Angkatan Kerja

(AK) berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 1% terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB). Nilai koefisien AK sebesar 0,427 menunjukkan bahwa peningkatan AK sebesar 1% diikuti meningkatnya PDRB per kapita sebesar 0,427%. Temuan ini mengindikasikan bahwa meningkatnya AK selama periode penelitian berkaitan dengan meningkatnya PDRB per kapita, sehingga pola perolehan dan pemanfaatan AK perlu dikaji lebih jauh dalam perumusan status dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung penguatan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini, Angkatan Kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Peningkatan besaran koefisien pada model utama menunjukkan bahwa kontribusi angkatan kerja terhadap PDRB per kapita menjadi relatif lebih kuat. Temuan tersebut sejalan dengan *Classical Labor Theory* yang dikembangkan oleh Adam Smith dan David Ricardo bahwa tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi utama yang secara langsung memengaruhi kapasitas output sebuah perekonomian. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Nilasari & Amelia (2022) yang menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, serta studi Hikmatiyar & Hayati (2011) yang menemukan bahwa tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa pemanfaatan angkatan kerja secara produktif merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong peningkatan output dan PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah.

4.4.7 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan model *Fixed Effect*, variabel Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada model utama tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto

per kapita (PDRB). Koefisien UMKM menunjukkan arah hubungan negatif terhadap PDRB, meskipun pengaruh tersebut tidak terbukti secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian belum secara langsung berdampak pada peningkatan PDRB per kapita. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, akses permodalan, serta integrasi UMKM ke dalam rantai nilai ekonomi yang lebih luas perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penguatan *sustainable livelihood*.

Temuan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan Teori *Schumpeterian Innovation* yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter bahwa kewirausahaan dan inovasi menjadi motor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Temuan ini juga tidak sejalan dengan penelitian Andira & Chandra (2023) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan UMKM terhadap ekonomi Kota Pekanbaru. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, keberadaan UMKM di Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya mampu untuk meningkatkan PDRB per kapita, kemungkinan karena adanya keterbatasan skala usaha, produktivitas, dan daya saing yang masih perlu diperkuat.

4.4.8 UMKM Pengguna Internet

Berdasarkan model *Fixed Effect*, variabel UMKM pengguna internet (IT) pada model utama berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 1% terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB). Nilai koefisien IT sebesar 0,054 menunjukkan bahwa kapita sebesar 0.054%. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penggunaan internet bagi UMKM berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemanfaatan internet membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi kegiatan

operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat daya saing dalam lingkungan ekonomi yang semakin berbasis digital. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang mendukung percepatan transformasi digital UMKM, antara lain melalui peningkatan kemampuan literasi digital serta penyediaan akses yang lebih merata terhadap infrastruktur teknologi, guna mengoptimalkan kontribusi sektor ini terhadap pembangunan ekonomi regional.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan Mutiarani et al. (2025) yang menekankan bahwa proses digitalisasi pada UMKM mempunyai peran penting dalam memperkuat perekonomian lokal. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa transformasi digital menjadi faktor kunci yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah UMKM, sekaligus memperluas dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan.

4.4.9 UMKM Pengguna Internet di Kota

Berdasarkan model *Fixed Effect* variabel UMKM pengguna internet di kota (KOTA_IT) tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB). Koefisien KOTA_IT menunjukkan arah hubungan positif terhadap PDRB, meskipun pengaruh tersebut tidak terbukti secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa berdasarkan data yang digunakan belum terdapat bukti kuat bahwa peningkatan UMKM pengguna internet di wilayah kota secara langsung mempengaruhi kinerja PDRB per kapita. Oleh karena itu, pola pengembangan dan pemanfaatan internet bagi UMKM di wilayah perkotaan Provinsi Jawa Tengah tetap perlu dikaji lebih lanjut dalam perumusan status dan arah kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan mata penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

4.4.10 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat (PTPP), Belanja Pemerintah Daerah (BPD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Angkatan Kerja (AK), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), UMKM pengguna internet (IT), dan UMKM Pengguna Internet di wilayah kota (KOTA_IT) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB)

Dari hasil uji F (signifikansi simultan) diperoleh nilai Prob (F-Statistic) sebesar 0.000000. Karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, maka H_0 dinyatakan ditolak. Dengan demikian, secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP), Belanja Pemerintah Daerah (BPD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Angkatan Kerja (AK), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), UMKM pengguna internet (IT), serta UMKM pengguna internet di wilayah kota (KOTA_IT) terbukti berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto per kapita (PDRB).

Secara parsial, hasil estimasi menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PDRB per kapita, namun masing-masing tetap memiliki peran penting ketika dilihat dalam model secara keseluruhan. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP) tidak berpengaruh secara parsial tetap berfungsi sebagai instrumen fiskal yang menopang kapasitas belanja pemerintah daerah. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) meski tidak berpengaruh, tetap merefleksikan kondisi iklim investasi yang mempengaruhi proses pembentukan output dalam jangka menengah dan panjang. Sementara Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak berpengaruh secara parsial mengindikasikan bahwa jumlah UMKM di

Provinsi Jawa Tengah selama periode penelitian belum secara langsung berdampak pada peningkatan PDRB per kapita. Sedangkan UMKM pengguna internet di wilayah kota (KOTA_IT) yang tidak berpengaruh secara parsial tetap mencerminkan dinamika transformasi struktural melalui penguatan usaha kecil dan digitalisasi ekonomi lokal. Dengan demikian, walaupun kekuatan pengaruh masing- masing variabel berbeda ketika diuji parsial, secara simultan seluruh variabel ini saling melengkapi dan bersama- sama membentuk model yang signifikan dalam menjelaskan variasi PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan kata lain, uji F menegaskan bahwa model yang digunakan sudah memadai untuk menjelaskan pengaruh gabungan variabel- variabel kebijakan *sustainable livelihood* terhadap kinerja ekonomi daerah, sehingga pembahasan lebih rinci terhadap koefisien masing- masing variabel menjadi penting sebagai landasan penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat menjelaskan PDRB per kapita sebesar 99,4% sedangkan 0,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model seperti IPM Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, serta indikator ketersediaan dan kualitas infrastruktur.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI. DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien (-0,077), berpengaruh negatif pada tingkat signifikansi 1% terhadap PDRB per kapita, berarti bahwa peningkatan PAD justru diduga menurunkan PDRB per kapita. Hal ini menunjukkan adanya ketidakefektifan pengelolaan PAD dalam mendukung kebijakan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP) memiliki koefisien 0,015, namun tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita. Meskipun memiliki arah pengaruh yang tepat, kontribusi PTPP terhadap variasi PDRB per kapita tidak terbukti secara statistik, mengindikasikan pemanfaatan PTPP yang belum optimal dalam mendukung kebijakan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.
3. Belanja Pemerintah Daerah (BPD) memiliki koefisien 0,112, berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 5% terhadap PDRB per kapita. Hasil ini menegaskan bahwa efektivitas Belanja Pemerintah Daerah (BPD) lebih ditentukan oleh kualitas alokasi dan komposisi pengeluaran daripada besaran anggaran semata sehingga belum optimal dalam mendukung kebijakan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.
4. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki koefisien (-0,001) namun tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita. Hasil ini menunjukkan ketidakmampuan PMDN

dalam mendorong PDRB per kapita dan investasi dalam negeri belum mengarah pada sektor-sektor padat karya atau berorientasi ekspor di Provinsi Jawa Tengah.

5. Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki koefisien 0,001 namun tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PMA terbatas karena cenderung terkonsentrasi di sektor atau wilayah tertentu, sehingga dampaknya belum merata antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Angkatan Kerja (AK) memiliki koefisien 0,427 berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 1% terhadap PDRB per kapita, hal ini menjadikan AK sebagai variabel paling dominan. Hal ini menjadikan AK sebagai pendorong utama kebijakan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.
7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki koefisien (-0,038) namun tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita. Secara agregat, jumlah UMKM belum berkorelasi positif dengan peningkatan PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah, kemungkinan karena produktivitas dan skala usaha yang masih rendah.
8. UMKM Pengguna Internet (IT) memiliki koefisien 0,054 berpengaruh positif pada tingkat signifikansi 10% terhadap PDRB per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM sudah memberikan dampak ekonomi namun belum cukup kuat secara statistik terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah.
9. UMKM Pengguna Internet di Kota (KOTA_IT) memiliki koefisien 0,011 namun tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan, digitalisasi UMKM belum mampu mendorong peningkatan signifikan PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah.

10. Hasil Uji F seluruh variabel independen dalam model *Fixed Effect* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variasi PDRB per kapita di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2023, meskipun tidak semuanya signifikan ketika diuji secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa peran setiap variabel independen memiliki peran pendukung yang saling terkait dalam membangun fondasi perekonomian daerah, sehingga pembahasan rinci mengenai besaran koefisien masing-masing menjadi krusial untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan berorientasi pada peningkatan PDRB per kapita serta penguatan kebijakan *sustainable livelihood* di Provinsi Jawa Tengah.
11. Hasil Analisis koefisien determinasi menjelaskan PDRB per kapita sebesar 99,4% sedangkan 0,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi yang sangat tinggi menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap variasi PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah. Namun, masih terdapat sebagian kecil faktor eksternal di luar model, seperti tingkat pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, serta kualitas infrastruktur, yang juga berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi daerah dan layak dipertimbangkan dalam penelitian selanjutnya.

5.2 Implikasi

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Implikasi Teoritis

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan Teori *Fiskal Federalisme* yang dikemukakan Musgrave (1959) bahwa PAD selalu berkontribusi positif terhadap

pertumbuhan ekonomi, karena efek negatif PAD justru mengindikasikan ketergantungan pada transfer seperti dijelaskan Bahl & Martinez-Vazquez (2022) yang pada akhirnya melemahkan dorongan kemandirian fiskal daerah. Pengaruh positif yang kuat dari Angkatan Kerja (AK) memperkuat Teori *Classical Labor* yang dikemukakan David Ricardo tentang peran sentral tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi.

Di sisi lain, hubungan positif dan signifikan pada variabel UMKM pengguna internet (IT) sejalan dengan teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan Romer (1990), yang menempatkan inovasi dan kemajuan teknologi sebagai salah satu sumber utama penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi digital oleh UMKM dapat mendorong peningkatan efisiensi proses produksi, memperluas jaringan dan akses pasar, sekaligus mempercepat penyebaran pengetahuan antar pelaku usaha, sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap penguatan kinerja ekonomi regional.

2. Implikasi Praktis

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap PDRB per kapita menggambarkan pengelolaan PAD yang tidak efisien. Pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah perlu segera mereformasi struktur pengeluaran PAD dengan target alokasi minimal untuk belanja modal seperti infrastruktur digital, pelatihan kerja, dan pusat pendukung UMKM. Melakukan audit independen untuk memastikan PAD benar-benar menggerakkan ekonomi lokal, terapkan aturan belanja pada UMKM, dan buat anggaran setiap tahun dengan target yang jelas.

- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP) meskipun arahnya positif terhadap PDRB per kapita, namun ketidaksignifikanan secara statistik mengisyaratkan bahwa desain dan pemanfaatan PTPP masih belum efektif mendorong PDRB per kapita dan cenderung berfungsi sebagai instrumen penyeimbang fiskal dan stabilisasi, tetapi belum sepenuhnya berperan sebagai pendorong langsung pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas perencanaan, alokasi, dan implementasi belanja publik di tingkat daerah. Sehingga harus diarahkan khusus untuk proyek padat karya seperti infrastruktur konektivitas UMKM dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
- c. Belanja Pemerintah Daerah (BPD) perlu difokuskan pada kualitas, bukan kuantitas. Prioritaskan belanja modal untuk inkubator UMKM digital, pusat pelatihan vokasi, dan infrastruktur logistik UMKM. Lakukan pemantauan penggunaan anggaran yang mengukur Belanja Pemerintah Daerah terhadap penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan omset UMKM lokal.
- d. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak berpengaruh terhadap PDRB per kapita dan justru memiliki arah hubungan negatif, yang mengindikasikan bahwa investasi domestik yang ada belum sepenuhnya tepat sasaran dalam memacu pertumbuhan ekonomi regional. Berikan insentif pajak khusus untuk PMDN di sektor padat karya berkelanjutan seperti agribisnis organik dan industri kreatif lokal. Bentuk pelayanan terpadu satu pintu untuk PMDN yang memastikan investasi domestik benar-benar menyerap tenaga kerja lokal dan terintegrasi dengan rantai pasok UMKM.

- e. Penanaman Modal Asing (PMA) perlu diintegrasikan dengan ekonomi lokal agar dampaknya merata. Wajibkan PMA menyerap tenaga kerja lokal dan batas minimal rantai pasok dari UMKM melalui kemitraan PMA-UMKM. Arahkan PMA ke kawasan industri terpadu yang dilengkapi pelatihan kerja untuk memaksimalkan penyebaran teknologi, inovasi keterampilan.
- f. Angkatan kerja (AK) terbukti pendorong utama PDRB per kapita. Luncurkan program Sertifikasi Kompetensi Jawa Tengah yang menargetkan pekerja fokus pada keterampilan digital dan industri. Menghubungkan kompetensi tenaga kerja di setiap kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga produktivitas tenaga kerja bisa meningkat drastis.
- g. Jumlah UMKM belum memberikan dampak positif terhadap ekonomi. Alihkan strategi dari mengejar kuantitas menjadi fokus kualitas melalui program UMKM berkualitas yang menargetkan UMKM unggulan. Berikan akses pembiayaan cepat, sertifikasi halal dan standar nasional, serta bantuan masuk pasar ekspor untuk UMKM yang punya potensi besar.
- h. Digitalisasi UMKM perlu ekosistem yang lengkap. Bangun *Digital Business Development Center* di 35 kabupaten/kota dengan pelatihan *e-commerce*, akses *marketplace* nasional, pembiayaan permodalan, dan logistik terjangkau. Menargetkan UMKM aktif online untuk hasil nyata.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- i. Perbaikan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah perlu meninjau kembali cara memanfaatkan PAD agar tidak lagi menekan, tetapi justru mendorong peningkatan PDRB per kapita. PAD sebaiknya lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan belanja modal yang benar-benar produktif, seperti pembangunan infrastruktur digital, penguatan fasilitas pelatihan vokasi, dan pengembangan pusat layanan bagi UMKM, sehingga setiap kenaikan PAD dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

- j. Optimalisasi Pemanfaatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP)

Secara konseptual, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP) memang dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap PDRB per kapita di Provinsi Jawa Tengah masih belum signifikan. Karena itu, pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam memanfaatkan dana transfer, dengan memastikan bahwa anggaran tersebut diarahkan pada program yang memiliki target hasil yang jelas, baik dari sisi output maupun outcome, seperti proyek padat karya, peningkatan konektivitas wilayah, dan penguatan daya saing UMKM, bukan sekadar menambah belanja rutin yang berdampak rendah terhadap aktivitas ekonomi produktif.

k. Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah (BPD)

Pemerintah daerah perlu mengubah pola belanjanya, dari yang penting habis terserap menjadi benar- benar berorientasi pada hasil. Anggaran sebaiknya lebih banyak dialokasikan ke belanja modal yang langsung mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja dan UMKM, seperti pembangunan infrastruktur dasar, sistem logistik, serta berbagai fasilitas pendukung aktivitas ekonomi lokal. Setiap program belanja juga perlu disertai evaluasi rutin untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran tersebut berkontribusi pada kenaikan PDRB per kapita.

l. Peninjauan Ulang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Pemerintah perlu mendorong agar PMDN tidak lagi terfokus pada sektor-sektor yang minim penyerapan tenaga kerja, tetapi diarahkan ke sektor padat karya dan bernilai tambah tinggi. Upaya ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif fiskal yang menarik, menyederhanakan proses perizinan, dan memfasilitasi kemitraan antara investor domestik dan UMKM lokal. Dengan demikian, investasi dalam negeri tidak hanya menambah angka realisasi investasi, tetapi juga benar- benar menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok lokal, dan memberikan efek pengganda yang nyata terhadap peningkatan PDRB per kapita.

m. Penguatan Keterhubungan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Ekonomi Lokal

Karena pengaruh PMA masih positif tetapi belum signifikan, pemerintah perlu memperkuat keterkaitan antara investasi asing dan kegiatan ekonomi lokal.

Salah satunya dapat dilakukan dengan mewajibkan penggunaan tenaga kerja lokal, mendorong adanya transfer teknologi, serta membangun kerja sama rantai pasok antara perusahaan PMA dan UMKM daerah. Dengan langkah ini, PMA tidak hanya berdiri sebagai kantong aktivitas ekonomi tersendiri, tetapi benar- benar ikut menopang dan menguatkan struktur perekonomian di Provinsi Jawa Tengah secara lebih merata.

n. Pengembangan Kualitas dan Produktivitas Angkatan Kerja (AK)

Mengacu pada hasil penelitian yang menunjukkan angkatan kerja sebagai variabel paling dominan dan signifikan, pemerintah perlu memperluas program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan kerja sama dengan dunia usaha dan industri. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja diikuti oleh peningkatan produktivitas, sehingga benar- benar mendorong kenaikan PDRB per kapita.

o. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing UMKM

Banyaknya jumlah UMKM yang ada tetapi belum berdampak positif terhadap PDRB per kapita menunjukkan bahwa kebijakan yang ditempuh selama ini masih terlalu menekankan sisi jumlah, bukan mutu. Karena itu, pemerintah perlu mengarahkan fokus pada pengembangan UMKM yang benar- benar berkualitas melalui program pembinaan UMKM unggulan yang menekankan penguatan kemampuan manajerial, kemudahan akses pembiayaan, peningkatan standar kualitas produk, serta dukungan perluasan pasar. Dengan cara tersebut, UMKM diharapkan tidak hanya bertambah secara jumlah, tetapi juga mampu

memberi kontribusi yang lebih nyata terhadap peningkatan PDRB per kapita.

p. Penguatan Ekosistem Digitalisasi UMKM

Digitalisasi UMKM yang belum terbukti berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa sekadar memberi akses internet tidak otomatis meningkatkan kinerja usaha. Pemerintah perlu membangun ekosistem pendukung yang lebih lengkap, seperti penyediaan pusat pelatihan keterampilan digital, pendampingan dalam pengelolaan toko daring, fasilitasi akses ke *marketplace* nasional maupun internasional, serta perbaikan layanan logistik dan sistem pembayaran digital. Langkah ini menjadi sangat penting terutama di kawasan perkotaan, agar UMKM pengguna internet dapat benar-benar memperbesar skala usahanya dan pada akhirnya memberi kontribusi yang lebih terasa terhadap peningkatan PDRB per kapita.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel yang lebih luas dan relevan dengan konsep *sustainable livelihood*, seperti kualitas pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, serta indikator ketersediaan dan kualitas infrastruktur, agar pengaruhnya terhadap PDRB per kapita dapat tergambarkan secara lebih utuh.

Peneliti juga dapat mempertimbangkan penggunaan metode analisis yang lebih maju, misalnya regresi kuantil panel atau model panel dinamis, untuk menangkap perbedaan pengaruh variabel antar kelompok daerah dengan level PDRB per kapita yang tidak sama. Selain itu, periode pengamatan sebaiknya diperpanjang dan, jika memungkinkan, menggunakan data dengan frekuensi lebih tinggi (data tahunan atau

data triwulanan) agar dinamika jangka pendek maupun jangka panjang dapat dianalisis dengan lebih mendalam.

Pendekatan spasial juga dapat ditambahkan untuk melihat adanya efek sebar (*spillover effect*) antar kabupaten/kota, sehingga perumusan kebijakan dapat lebih mempertimbangkan keterkaitan ekonomi antarwilayah. Di samping itu, penting dilakukan kajian kualitatif lanjutan melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, pejabat daerah, dan investor, guna menggali faktor-faktor non-kuantitatif yang memengaruhi efektivitas kebijakan *sustainable livelihood* di tingkat lokal.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Variabel yang digunakan masih terbatas pada indikator makro tertentu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat (PTPP), Belanja Pemerintah Daerah (BPD), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Angkatan Kerja (AK), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan UMKM pengguna internet (IT), sehingga belum mencakup faktor lain seperti kualitas tata kelola, tingkat korupsi, maupun aspek sosial yang juga berpotensi memengaruhi PDRB per kapita.
2. Data yang dipakai berupa data sekunder tingkat kabupaten/kota yang bersifat agregat, sehingga tidak mampu menggambarkan secara rinci perbedaan kondisi di tingkat rumah tangga atau pelaku usaha secara individu.
3. Rentang waktu penelitian hanya mencakup periode 2017–2023, sehingga belum sepenuhnya merefleksikan dinamika jangka panjang maupun dampak kebijakan terbaru yang mungkin belum tertangkap dalam data.

4. Kemungkinan adanya masalah endogenitas, seperti hubungan dua arah antara PDRB per kapita dengan variabel fiskal atau investasi, belum ditangani secara menyeluruh dengan teknik estimasi yang lebih lanjut.
5. Fokus kajian yang hanya pada Provinsi Jawa Tengah membuat hasil penelitian ini perlu digunakan dengan kehati-hatian apabila hendak digeneralisasikan ke provinsi lain yang memiliki struktur ekonomi dan kondisi kelembagaan berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Albasyari. N. N.. & Priyadi. U. (2024). Analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*. 172–180. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss2.art8>
- Ananda. Y. (2024). Peran UMKM Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *Jurnal Bangun Manajemen*. 3(2). <https://doi.org/10.56854/jbm.v3i2.487>
- Anderson. George. (2010). *Fiscal federalism : a comparative introduction*. Oxford University Press.
- Andira. A. P.. & Chandra. R. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022 STMIK Dharmapala Riau. Program Studi Manajemen Retail. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7(3).
- Azis. A.. Tampubolon. D.. & Desweni. S. P. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di 12 Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2012-2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 7(2). 41–52.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Indonesia* (Vol. 16).
- Bahl, R., & Martinez-Vazquez, J. (2022). Perspectives in Fiscal Decentralization: Challenges and the Unfinished Agenda. *Canadian Tax Journal*, 70, 69–96. <https://doi.org/10.32721/ctj.2022.70.suppl.bahl>
- Eyraud. L.. & Lusinyan. L. (2011). *Decentralizing Spending More than Revenue: Does It Hurt Fiscal Performance?*
- Hacbert. R. F.. & Link. A. N. (1987). Adam Smith On The Division Of Labor And Relative Factor Prices. *History of Economics Society Bulletin*. 9(1). 80–84. <https://doi.org/10.1017/S1042771600004038>
- Hasan. M. (2015). Pengaruh Dana Transfer Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Economic*. 3.
- Hikmatiyar. P. F.. & Hayati. B. (2011). Analisis Pengaruh Pmdn. Pma. Dan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Pdrb Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 1995-2009. *Fakultas Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Indah. N.. Aruan. M.. Hutagalung. I.. Purba. B.. Ekonomi. F.. Sarjana. J.. Ekonomi. I.. & Medan. U. N. (2023). Analisis Dampak Teori Keynes Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui

- Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*. 1(1). 1–7.
<https://doi.org/XX..XXXXX/Jimea>
- Iqbal. M. (2015). Regresi Data Panel (2) “Tahap Analisis”. Perbanas Institute:
<https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-2-tahap-analisis/>
- Jones. C. I. (2021). *The Past and Future of Economic Growth: A Semi-Endogenous Perspective* (2916; NBER Working Paper). <http://www.nber.org/papers/w29126>
- Lestari. G. G.. & Robertus. M. H. (2023). Pengaruh Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Dalam Negeri. Dana Perimbangan. dan Aglomerasi terhadap Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah di Provinsi Banten Tahun 2011-2020. *Diponegoro Journal of Economics*. 12(2). 57–68. <https://doi.org/10.14710/djoe.37984>
- Malerba. F.. & McKelvey. M. (2020). Knowledge-intensive innovative entrepreneurship integrating Schumpeter. evolutionary economics. and innovation systems. *Small Business Economics*. 54(2). 503–522. <https://doi.org/10.1007/s11187-018-0060-2>
- Meyer. D. F.. Masehla. T. M.. & Kot. S. (2017). The Relationship Between Economic Growth And Economic Development: A Regional Assessment In South Africa. *J. Advanced Res. L. & Econ*. 8. 1377.
- Musgrave. R. A.. & Musgrave. P. B. (1989). *Public Finance In Theory And Practice*.
- Mutiarani. Royani. N.. Mitasari. D.. Masitoh. G.. & Idil Fitri. T. (2025). Analisis Dampak Digitalisasi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal Di Indonesia. *JSE: Jurnal Sharia Economica JSE*. 4(2). <https://doi.org/10.46773/jse.v4i1>
- Nilasari. A.. & Amelia. R. (2022). Pengaruh PDRB Per Kapita. Indeks Pembangunan Manusia. dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*. 2(2). 169–182.
<https://journal.inspirasi.or.id/index.php/nomicpedia>
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023*. Pemerintah Provinsi Jawa tengah.
- Prasetya. F. (2012). *Modul Ekonomi Publik Bagian Vii: Teori Fiskal Federalisme*. Universitas Brawijaya.
- Rahman. Y. A.. & Chamelia. A. L. (2015). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Jejak*. 8(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3857>

- Riskiyah Aprilia. N., Arifin. D. A., & Djasuli. M. (2024). Pengaruh Investasi dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Upaya Mewujudkan Rethinking Government. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Desember. 10(24). 296–303.
- Robert Chambers. & Gordon Conway. (2014). *Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century*. <https://www.researchgate.net/publication/248535825>
- Saputra. M. R., Haliah. & Indrijawati. A. (2021). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*. 14(2). 129–134. <https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14810>
- Shafwah. R., Masrudin. & Mukhtar. A. (2024). Berkelanjutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang. *Jurnal Bisnis Net*. 7(1). 282–289.
- Sunan Hidayat. W., Santosa. B., Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. M., & Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Wahyusunan. J. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat 2010-2015. In *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* (Vol. 5. Issue 1).
- Wardhana. A., Juanda. B., Siregar. H., & Wibowo. D. K. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sosiohumaniora*. 15(2). 111–118.
- Utari. T. S. (2017). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi. Upah Minimumn Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Pada Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2011-2015*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

LAMPIRAN

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 Povinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	[Seri 2010] PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Juta rupiah)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	3301 Kab Cilacap	55.65	57.05	58.37	46.43	46.74	48.64	50.72
2	3302 Kab Banyumas	21.11	22.28	23.61	22.07	22.72	23.8	24.83
3	3303 Kab Purbalingga	17.04	17.79	18.71	17.26	17.62	18.38	19.01
4	3304 Kab Banjarnegara	14.97	15.72	16.60	14.83	15.15	15.78	16.40
5	3305 Kab Kebumen	14.93	15.71	16.62	14.50	14.86	15.52	16.20
6	3306 Kab Purworejo	16.83	17.68	18.68	17.09	17.53	18.30	19.06
7	3307 Kab Wonosobo	15.86	16.59	17.53	15.47	15.85	16.44	16.94
8	3308 Kab Magelang	16.54	17.26	18.10	17.61	18.09	18.91	19.70
9	3309 Kab Boyolali	20.78	21.85	23.14	21.13	21.91	23.08	24.16
10	3310 Kab Klaten	21.41	22.50	23.78	21.84	22.52	23.69	24.87
11	3311 Kab Sukoharjo	27.51	28.88	30.51	29.37	30.23	31.6	32.88
12	3312 Kab Wonogiri	19.71	20.73	21.85	19.75	20.34	21.42	22.42
13	3313 Kab Karanganyar	27.23	28.61	30.14	28.07	28.74	30.19	31.63
14	3314 Kab Sragen	27.09	28.56	30.30	27.05	27.85	29.22	30.52
15	3315 Kab Grobogan	12.94	13.63	14.36	13.36	13.73	14.41	14.99
16	3316 Kab Blora	19.64	20.42	21.28	19.78	20.41	20.79	21.28
17	3317 Kab Rembang	19.43	20.42	21.43	20.8	21.44	22.45	23.42
18	3318 Kab Pati	22.15	23.29	24.64	23.09	23.63	24.72	25.74
19	3319 Kab Kudus	80.83	82.48	84.46	83.66	81.58	82.5	83.44
20	3320 Kab Jepara	15.58	16.26	17.08	17.71	18.34	19.23	20.02
21	3321 Kab Demak	14.54	15.18	15.91	15.3	15.53	16.17	16.8
22	3322 Kab Semarang	31.15	32.50	33.97	33.00	33.86	35.34	36.69
23	3323 Kab Temanggung	18.15	18.92	19.80	18.88	19.36	20.19	21.03
24	3324 Kab Kendal	28.89	30.33	31.99	29.96	30.77	32.13	33.52
25	3325 Kab Batang	18.08	18.95	19.91	18.79	19.48	20.39	21.27
26	3326 Kab Pekalongan	16.56	17.41	18.31	16.61	16.9	17.54	18.23
27	3327 Kab Pemalang	12.60	13.28	14.09	12.37	12.74	13.22	13.6
28	3328 Kab Tegal	15.57	16.39	17.34	15.37	15.74	16.34	16.93
29	3329 Kab Brebes	16.43	17.23	18.25	16.56	16.8	17.51	17.96
30	3371 Kota Magelang	47.92	50.37	53.23	51.94	53.58	56.53	59.48

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	[Seri 2010] PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Juta rupiah)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
31	3372 Kota Surakarta	61.39	64.70	68.55	66.65	69.09	73.21	77.1
32	3373 Kota Salatiga	45.65	47.65	50.03	49.51	50.6	52.74	54.89
33	3374 Kota Semarang	70.14	73.49	77.62	83.25	86.9	91.06	95.5
34	3375 Kota Pekalongan	22.22	23.28	24.48	23.92	24.51	25.61	26.7
35	3376 Kota Tegal	40.34	42.55	45.07	40.08	40.85	42.46	44.09

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Povinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah Menurut JenisPengeluaran (dalam Milyar Rp)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	3301 Kab Cilacap	645.82	497.35	500.33	495.41	739.13	700.43	757.74
2	3302 Kab Banyumas	619.70	648.33	636.51	729.89	761.99	822.69	889.32
3	3303 Kab Purbalingga	355.86	282.68	266.84	284.01	377.88	306.20	300.98
4	3304 Kab Banjarnegara	297.49	235.99	231.82	263.41	313.83	284.51	319.83
5	3305 Kab Kebumen	443.61	351.97	401.17	417.69	472.02	512.35	432.56
6	3306 Kab Purworejo	298.61	278.95	282.94	326.57	438.26	330.21	410.21
7	3307 Kab Wonosobo	309.17	226.82	211.01	224.70	339.75	264.94	243.40
8	3308 Kab Magelang	403.56	325.09	427.61	406.10	375.38	432.69	432.82
9	3309 Kab Boyolali	388.01	342.96	331.68	369.37	514.97	444.69	424.88
10	3310 Kab Klaten	371.52	373.77	273.72	304.55	315.30	307.85	303.14
11	3311 Kab Sukoharjo	464.57	433.49	315.26	332.21	528.35	495.28	367.64
12	3312 Kab Wonogiri	333.84	269.03	223.67	252.34	241.30	332.81	256.30
13	3313 Kab Karanganyar	415.14	343.16	327.92	357.15	426.65	266.85	382.87
14	3314 Kab Sragen	404.56	334.30	318.67	338.22	537.27	364.47	365.14
15	3315 Kab Grobogan	440.46	315.74	319.43	332.00	424.19	424.75	367.82
16	3316 Kab Blora	280.05	203.17	200.00	236.97	326.77	325.97	305.31
17	3317 Kab Rembang	318.05	305.68	291.86	307.26	404.10	353.09	377.26
18	3318 Kab Pati	428.37	383.91	326.37	351.86	388.64	388.75	352.22
19	3319 Kab Kudus	366.03	337.36	323.76	378.70	507.17	412.61	429.65
20	3320 Kab Jepara	331.06	369.33	359.89	386.44	408.64	427.52	500.81
21	3321 Kab Demak	309.61	342.32	339.73	404.37	445.01	477.20	461.75
22	3322 Kab Semarang	417.42	383.48	380.39	479.87	575.75	480.30	598.16
23	3323 Kab Temanggung	308.47	252.02	249.68	266.91	363.13	308.71	303.73

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah Menurut JenisPengeluaran (dalam Milyar Rp)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
24	3324 Kab Kendal	404.91	335.84	414.12	425.30	439.20	438.18	601.22
25	3325 Kab Batang	219.81	237.55	235.22	246.40	322.79	300.97	300.05
26	3326 Kab Pekalongan	305.39	311.29	391.25	466.82	346.60	342.97	446.36
27	3327 Kab Pemasang	425.89	300.48	278.49	309.06	365.39	349.13	380.70
28	3328 Kab Tegal	375.53	372.28	416.87	450.74	591.00	531.15	570.99
29	3329 Kab Brebes	528.84	346.91	372.17	398.65	518.51	419.40	475.83
30	3371 Kota Magelang	233.56	249.88	222.48	255.04	319.93	377.37	277.74
31	3372 Kota Surakarta	527.54	525.13	544.78	303.18	560.58	647.44	828.54
32	3373 Kota Salatiga	218.44	208.93	221.45	228.00	280.68	240.96	226.79
33	3374 Kota Semarang	1.791.89	1.821.27	2.159.41	2.516.65	2.385.94	2.545.99	2.865.71
34	3375 Kota Pekalongan	192.00	179.22	215.69	218.02	252.04	263.48	240.81
35	3376 Kota Tegal	306.83	275.02	297.68	333.01	308.12	340.05	416.26

3. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP) Povinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah Menurut JenisPengeluaran (dalam Milyar Rp)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	3301 Kab Cilacap	1.874.95	1.893.59	1.980.52	1.750.58	2.403.37	2.563.41	2.673.56
2	3302 Kab Banyumas	1.868.37	1.894.41	2.003.43	2.046.99	2.535.64	2.589.70	2.673.56
3	3303 Kab Purbalingga	1.238.86	1.240.57	1.305.70	1.275.00	1.569.83	1.701.87	1.696.72
4	3304 Kab Banjarnegara	1.421.12	1.354.08	1.373.85	1.396.27	1.663.94	1.732.71	1.782.18
5	3305 Kab Kebumen	1.712.42	1.654.14	1.723.81	1.748.40	2.222.63	2.329.70	2.370.79
6	3306 Kab Purworejo	1.207.26	1.264.23	1.330.77	1.372.72	1.772.40	1.848.53	1.865.28
7	3307 Kab Wonosobo	1.133.22	1.139.81	1.257.47	1.255.15	1.509.85	1.613.31	1.727.47
8	3308 Kab Magelang	1.309.02	1.398.13	1.490.27	1.519.53	1.982.64	2.100.71	2.025.29
9	3309 Kab Boyolali	1.354.44	1.438.53	1.477.55	1.496.00	1.825.28	1.903.26	1.880.41
10	3310 Kab Klaten	1.624.72	1.662.13	1.720.87	1.707.74	2.131.12	1.823.54	2.217.33
11	3311 Kab Sukoharjo	1.217.88	1.219.81	1.269.17	1.287.50	1.520.53	1.516.01	1.567.66
12	3312 Kab Wonogiri	1.520.11	1.532.14	1.629.13	1.614.37	1.926.98	1.926.89	2.189.65
13	3313 Kab Karanganyar	1.271.47	1.325.73	1.397.42	1.398.56	1.650.04	1.731.96	1.762.37
14	3314 Kab Sragen	1.401.31	1.405.51	1.462.93	1.498.07	1.710.75	1.787.12	1.796.82
15	3315 Kab Grobogan	1.522.60	1.520.82	1.588.35	1.662.55	2.058.99	2.150.76	2.187.69
16	3316 Kab Blora	1.348.44	1.375.55	1.492.77	1.251.01	1.814.36	1.851.13	1.974.87
17	3317 Kab Rembang	927.65	1.071.22	1.086.41	1.118.65	1.436.08	1.485.29	1.555.20
18	3318 Kab Pati	1.689.03	1.637.31	1.676.98	1.684.33	2.218.73	2.302.53	2.280.50
19	3319 Kab Kudus	1.310.92	1.281.77	1.063.28	1.062.97	1.585.71	1.658.34	1.628.28
20	3320 Kab Jepara	1.316.70	1.339.63	1.420.54	1.269.90	1.860.08	1.896.87	1.876.22

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (dalam Milyar Rp)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
21	3321 Kab Demak	1.230.55	1.205.19	1.290.49	1.309.48	1.793.63	1.914.41	1.921.03
22	3322 Kab Semarang	1.283.94	1.307.51	1.383.82	1.394.52	1.736.01	1.857.13	1.843.53
23	3323 Kab Temanggung	1.077.45	1.069.11	1.157.14	1.185.54	1.537.85	1.585.78	1.578.28
24	3324 Kab Kendal	1.258.08	1.299.80	1.383.52	1.381.09	1.753.44	1.819.21	1.859.73
25	3325 Kab Batang	1.038.29	1.048.71	1.123.49	1.142.71	1.419.28	1.448.97	1.473.32
26	3326 Kab Pekalongan	1.282.88	1.288.22	1.352.27	1.346.75	1.634.96	1.721.09	1.800.59
27	3327 Kab Pemasang	1.554.32	1.542.92	1.630.29	1.626.62	2.076.66	2.144.29	2.191.55
28	3328 Kab Tegal	1.505.67	1.513.20	1.629.81	1.653.02	2.117.37	2.206.62	2.222.55
29	3329 Kab Brebes	1.693.64	1.753.06	1.906.34	1.884.54	2.456.46	2.557.21	2.535.54
30	3371 Kota Magelang	553.12	570.46	590.29	563.54	657.13	607.89	666.61
31	3372 Kota Surakarta	1.048.16	1.090.92	1.134.14	1.027.58	1.321.15	1.376.20	1.319.24
32	3373 Kota Salatiga	593.10	561.01	581.89	585.87	646.90	677.37	679.60
33	3374 Kota Semarang	1.640.98	1.689.24	1.800.27	1.815.31	2.320.54	2.423.15	1.962.79
34	3375 Kota Pekalongan	586.16	586.38	622.26	632.39	686.77	690.95	724.76
35	3376 Kota Tegal	644.94	602.57	664.38	691.36	692.04	702.58	693.57

4. Belanja Pemerintah Daerah (BPD) Povinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (dalam Milyar Rp)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	3301 Kab Cilacap	3.003.05	3.260.83	3.352.05	3.194.04	3.329.81	3.402.04	3.581.07
2	3302 Kab Banyumas	3.200.69	3.319.06	3.621.36	3.743.92	3.430.88	3.600.85	3.619.90
3	3303 Kab Purbalingga	2.013.77	1.924.91	2.101.28	2.095.81	1.999.90	2.122.76	2.079.21
4	3304 Kab Banjarnegara	2.178.82	2.119.10	2.128.69	2.247.98	2.042.02	2.039.21	2.266.43
5	3305 Kab Kebumen	2.630.27	2.652.06	2.961.00	3.033.76	2.779.84	2.824.36	2.900.29
6	3306 Kab Purworejo	2.265.14	2.255.67	2.215.44	2.483.29	2.135.48	2.347.14	2.384.06
7	3307 Kab Wonosobo	1.715.29	1.856.17	2.028.21	2.055.35	1.860.10	2.011.11	2.078.39
8	3308 Kab Magelang	2.451.44	2.486.54	2.671.02	2.713.50	2.413.16	2.570.33	2.721.24
9	3309 Kab Boyolali	2.148.43	2.203.11	2.371.99	2.466.44	2.268.51	2.471.83	2.342.72
10	3310 Kab Klaten	2.482.13	2.973.12	2.803.54	2.906.33	2.493.41	2.109.37	2.817.02
11	3311 Kab Sukoharjo	1.887.50	2.050.16	2.242.84	2.392.53	2.089.46	2.042.03	2.263.27
12	3312 Kab Wonogiri	2.315.60	2.246.86	2.423.35	2.474.91	2.297.51	2.243.21	2.540.53
13	3313 Kab Karanganyar	2.066.49	2.064.58	2.313.59	2.287.24	2.138.94	2.088.82	2.243.05
14	3314 Kab Sragen	2.202.50	2.236.80	2.146.65	2.312.89	2.160.88	2.268.53	2.477.57
15	3315 Kab Grobogan	2.553.15	2.379.93	2.514.43	2.615.09	2.428.63	2.687.13	2.612.91
16	3316 Kab Blora	1.981.35	2.116.48	2.261.53	2.012.81	2.113.77	2.396.22	2.280.18
17	3317 Kab Rembang	1.829.09	1.814.66	1.827.51	1.964.43	1.836.44	1.991.79	2.037.56
18	3318 Kab Pati	2.626.44	2.725.89	2.825.57	2.900.22	2.623.73	2.717.69	2.700.64
19	3319 Kab Kudus	2.007.00	1.957.70	1.814.80	1.911.47	1.879.12	2.231.54	2.244.75
20	3320 Kab Jepara	2.215.49	2.300.57	2.331.89	2.035.63	2.309.41	2.429.31	2.509.55
21	3321 Kab Demak	1.986.48	2.050.07	2.347.59	2.384.41	2.336.02	2.487.34	2.493.26

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah Menurut Jenis Pengeluaran (dalam Milyar Rp)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
22	3322 Kab Semarang	2.034.38	2.171.80	2.277.67	2.454.22	2.198.88	2.536.33	2.553.90
23	3323 Kab Temanggung	1.768.57	1.670.31	1.910.78	1.981.49	1.877.97	1.958.75	2.024.95
24	3324 Kab Kendal	2.091.83	2.148.45	2.445.49	2.448.83	2.069.96	2.304.09	2.572.96
25	3325 Kab Batang	1.563.18	1.687.22	1.821.47	1.890.62	1.780.43	1.801.91	1.823.59
26	3326 Kab Pekalongan	2.037.60	2.160.74	2.417.32	2.446.66	2.075.04	2.123.95	2.285.30
27	3327 Kab Pemalang	2.258.34	2.324.29	2.679.00	2.828.84	2.524.56	3.508.26	2.632.95
28	3328 Kab Tegal	2.453.00	2.127.37	2.866.76	2.891.81	2.776.66	2.722.06	2.951.35
29	3329 Kab Brebes	2.767.71	2.825.36	3.256.32	3.270.99	3.126.23	3.091.29	3.161.05
30	3371 Kota Magelang	879.41	937.35	1.031.97	995.61	935.05	1.039.50	1.012.69
31	3372 Kota Surakarta	1.768.35	1.914.82	2.056.24	1.616.32	1.866.50	2.088.32	2.257.49
32	3373 Kota Salatiga	849.47	923.54	949.29	1.006.40	956.50	932.07	978.10
33	3374 Kota Semarang	4.328.94	4.506.41	5.134.43	5.256.09	4.764.05	4.871.95	4.983.82
34	3375 Kota Pekalongan	924.17	883.18	1.026.16	1.055.86	962.09	1.031.09	1.008.40
35	3376 Kota Tegal	1.017.22	916.73	1.120.47	1.278.39	1.089.71	1.127.74	1.225.39

5. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Povinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Investasi (Juta Rp)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	3301 Kab Cilacap	395.274	4.805.118	6.830.890	4.285.260	1.554.233	622.737	1.730.249
2	3302 Kab Banyumas	441.642	614.635	461.613	1.075.030	996.394	859.956	1.094.384
3	3303 Kab Purbalingga	45.765	9.104	52.876	137.433	569.164	264.394	158.432
4	3304 Kab Banjarnegara	50.645	148.609	168.027	68.583	114.381	492.561	498.759
5	3305 Kab Kebumen	17.065	71.423	78.430	39.135	106.715	135.572	257.838
6	3306 Kab Purworejo	13.942	113.205	18.337	72.489	44.815	67.572	138.975
7	3307 Kab Wonosobo	1.689	16.125	14.715	9.280	226.642	92.518	257.592
8	3308 Kab Magelang	185.032	125.480	193.884	197.253	309.145	892.604	1.124.874
9	3309 Kab Boyolali	474.463	1.113.601	422.074	709.545	1.047.751	1.518.220	934.628
10	3310 Kab Klaten	247.327	229.789	212.273	43.752	110.408	1.081.216	2.897.471
11	3311 Kab Sukoharjo	2.055.378	1.107.151	921.678	439.117	861.519	1.670.938	1.188.106
12	3312 Kab Wonogiri	41.832	42.569	58.525	41.717	341.596	207.346	95.053
13	3313 Kab Karanganyar	1.957.677	989.035	261.022	181.965	936.568	898.891	1.233.014
14	3314 Kab Sragen	999.425	2.441.479	33.837	117.735	617.772	773.267	468.007
15	3315 Kab Grobogan	247.327	215.709	393.136	3.492.707	4.137.736	517.607	344.602
16	3316 Kab Blora	100.356	13.246	2.562	282.232	75.107	74.496	120.665
17	3317 Kab Rembang	74.039	427.815	242.944	237.573	154.594	765.402	261.467
18	3318 Kab Pati	889.756	106.168	221.462	176.432	222.494	188.886	372.695
19	3319 Kab Kudus	1.034.981	687.188	2.041.677	1.919.450	720.573	583.677	1.540.216

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Investasi (Juta Rp)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
20	3320 Kab Jepara	56.968	8.365	17.621	34.312	149.831	160.737	295.572
21	3321 Kab Demak	758.549	463.883	517.439	962.321	2.569.159	2.495.473	2.315.261
22	3322 Kab Semarang	1.339.476	2.141.899	545.448	575.109	633.559	1.156.630	1.835.056
23	3323 Kab Temanggung	165.804	93.391	7.582	33.142	94.001	141.771	172.781
24	3324 Kab Kendal	4.566	311.708	135.931	201.109	560.723	585.891	1.579.250
25	3325 Kab Batang	321.423	544.149	240.596	253.423	3.202.162	1.142.111	805.076
26	3326 Kab Pekalongan	5.907.350	1.241.009	40.784	76.393	478.073	202.731	655.905
27	3327 Kab Pemalang	2.033	103.358	51.607	110.095	175.274	630.479	488.734
28	3328 Kab Tegal	404.468	59.570	40.784	7.577.239	157.467	565.738	525.210
29	3329 Kab Brebes	62.908	67.551	44.044	34.026	514.790	266.600	751.537
30	3371 Kota Magelang	16.418.900	12.966	25.080	30.106	289.066	116.715	237.692
31	3372 Kota Surakarta	29.262	383.299	212.675	391.913	153.236	450.422	747.796
32	3373 Kota Salatiga	98.596	121.931	22.520	91.667	92.592	101.195	178.730
33	3374 Kota Semarang	1.129.039	8.534.748	4.048.092	6.633.895	8.483.056	5.096.830	6.984.722
34	3375 Kota Pekalongan	51.257	96.123	24.335	26.999	410.595	69.178	502.453
35	3376 Kota Tegal	34.327	13.495	34.484	47.697	199.990	101.932	194.399

6. Penanaman Modal Asing (PMA) Povinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Realisasi Proyek. Nilai Investasi dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Asing (PMA) Investasi (Juta Rp)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	3301 Kab Cilacap	5.839	9.297	16.668	2.446	3.160	147.360	23.142.198
2	3302 Kab Banyumas	4.966	774	176	203	1.724	11.453	70.599
3	3303 Kab Purbalingga	363.030	12.358	205	538	17.420	313.721	140.538
4	3304 Kab Banjarnegara	1.107	23	72	67	1.004	43.551	153.884
5	3305 Kab Kebumen	0	0	0	0	0	0	20.520
6	3306 Kab Purworejo	790	0	15	46	107	3.668	5.401
7	3307 Kab Wonosobo	793	2	0	1	107	59.890	229
8	3308 Kab Magelang	2.493	2.733	44	63	256	10.514	37.790
9	3309 Kab Boyolali	13.194	15.263	8.209	5.192	25.796	780.254	59.345
10	3310 Kab Klaten	10.257	3.091	3.212	2.204	23.690	411.713	293.229
11	3311 Kab Sukoharjo	26.009	53.682	4.861	5.453	2.300	232.263	431.892
12	3312 Kab Wonogiri	6.553	122	1.102	5.272	4.122	89.887	272.499
13	3313 Kab Karanganyar	930	7.522	13.752	9.964	298.486	222.164	29.205
14	3314 Kab Sragen	1.630	5.106	1.759	5.916	3.160	71.068	92.370
15	3315 Kab Grobogan	19.129	42.752	20.614	14.575	16.537	253.928	231.845
16	3316 Kab Blora	6.342	4.235	207	133	65	347	268.003
17	3317 Kab Rembang	4.518	16.643	8.679	498	26.877	191.360	19.082
18	3318 Kab Pati	3.978	164	6.053	12.871	45.944	1.459.913	134.738
19	3319 Kab Kudus	2.461	114	849	1.914	797	108.041	335.859
20	3320 Kab Jepara	1.042.726	915.787	1.434.375	370.929	377.464	9.424.590	154.454

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Realisasi Proyek, Nilai Investasi dan Tenaga Kerja Penanaman Modal Asing (PMA) Investasi (Juta Rp)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
21	3321 Kab Demak	15.784	21.462	8.656	14.604	3.864	602.151	1.457.304
22	3322 Kab Semarang	24.727	18.850	23.384	3.846	3.314	1.937.913	1.196.824
23	3323 Kab Temanggung	0	9.093	196	394	67.009	338.482	1.277.741
24	3324 Kab Kendal	6.998	60.485	18.727	65.813	222.588	4.609.593	129.040
25	3325 Kab Batang	431.383	1.009.895	964.463	613.150	298.486	4.736.711	4.819.684
26	3326 Kab Pekalongan	0	0	0	0	23.628	2.440	3.752.566
27	3327 Kab Pemalang	1.144	1.152	2.237	1.039	67.009	297.689	934.305
28	3328 Kab Tegal	105.411	13.392	13.582	9.703	60.546	935.646	927.006
29	3329 Kab Brebes	26.416	91.203	29.764	90.895	33.632	1.370.811	1.358.754
30	3371 Kota Magelang	8.009	58	693	1.199	117	4.381	596.880
31	3372 Kota Surakarta	3.329	89	633	2.282	1.651	85.192	4.378
32	3373 Kota Salatiga	31.822	9.679	15.502	11.567	83.631	289.111	169.963
33	3374 Kota Semarang	200.588	46.012	122.124	110.752	104.259	4.777.159	415.193
34	3375 Kota Pekalongan	0	597	9	71	532	32.346	3.259.389
35	3376 Kota Tegal	164	1.068	2.435	37	963	39.950	34.268

7. Angkatan Kerja (AK) Povinsi Jawa Tengah tahun 2017-2023

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah (%)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	3301 Kab Cilacap	93.70%	92.52%	92.69%	90.90%	90.03%	90.38%	91.26%
2	3302 Kab Banyumas	95.38%	95.81%	95.79%	95.25%	93.95%	93.95%	93.65%
3	3303 Kab Purbalingga	94.67%	93.94%	95.22%	93.26%	93.95%	94.77%	94.39%
4	3304 Kab Banjarnegara	95.28%	96.00%	95.53%	93.28%	94.14%	93.62%	93.74%
5	3305 Kab Kebumen	94.42%	94.48%	95.24%	95.98%	93.97%	94.08%	94.89%
6	3306 Kab Purworejo	96.36%	95.49%	97.04%	91.25%	96.41%	95.55%	95.98%
7	3307 Kab Wonosobo	95.82%	96.56%	96.53%	94.66%	94.74%	94.99%	95.05%
8	3308 Kab Magelang	97.56%	97.09%	96.88%	95.70%	94.97%	95.03%	95.58%
9	3309 Kab Boyolali	96.33%	97.84%	96.88%	93.16%	94.91%	95.08%	95.95%
10	3310 Kab Klaten	95.65%	96.89%	96.45%	96.04%	94.52%	95.69%	95.80%
11	3311 Kab Sukoharjo	97.73%	97.22%	96.60%	92.13%	96.68%	97.53%	96.60%
12	3312 Kab Wonogiri	97.62%	97.72%	97.46%	97.35%	97.57%	98.05%	98.08%
13	3313 Kab Karanganyar	96.83%	97.66%	96.85%	93.56%	94.11%	94.30%	95.65%
14	3314 Kab Sragen	95.45%	95.18%	96.66%	90.37%	95.24%	95.31%	96.13%
15	3315 Kab Grobogan	96.98%	97.76%	96.41%	90.79%	95.62%	95.60%	95.98%
16	3316 Kab Blora	97.15%	96.74%	96.11%	96.39%	96.19%	96.30%	96.90%
17	3317 Kab Rembang	96.81%	97.13%	96.31%	86.96%	96.33%	98.24%	97.40%
18	3318 Kab Pati	96.17%	96.39%	96.26%	87.51%	95.40%	95.55%	95.71%
19	3319 Kab Kudus	96.44%	96.67%	96.14%	92.88%	96.23%	96.79%	96.75%
20	3320 Kab Jepara	95.16%	96.22%	97.03%	92.30%	95.77%	95.90%	96.65%
21	3321 Kab Demak	95.53%	92.84%	94.54%	96.55%	94.72%	93.89%	94.62%
22	3322 Kab Semarang	98.22%	97.72%	97.42%	95.28%	94.98%	95.19%	95.95%
23	3323 Kab Temanggung	97.03%	96.76%	97.01%	75.48%	97.38%	97.46%	97.68%
24	3324 Kab Kendal	95.07%	93.94%	93.69%	92.33%	92.45%	92.66%	94.24%

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah (%)						
		Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
25	3325 Kab Batang	94.18%	95.77%	95.84%	90.03%	93.41%	93.36%	93.94%
26	3326 Kab Pekalongan	95.61%	95.59%	95.57%	91.91%	95.72%	96.77%	96.75%
27	3327 Kab Pemalang	94.41%	93.79%	93.50%	91.43%	93.29%	93.37%	93.45%
28	3328 Kab Tegal	92.67%	91.55%	91.79%	90.10%	90.03%	90.36%	91.40%
29	3329 Kab Brebes	91.96%	92.73%	92.57%	93.38%	90.22%	90.52%	91.02%
30	3371 Kota Magelang	93.32%	95.12%	95.57%	91.72%	91.27%	93.29%	94.75%
31	3372 Kota Surakarta	95.53%	95.61%	95.82%	94.30%	92.15%	94.17%	95.42%
32	3373 Kota Salatiga	96.04%	95.72%	95.57%	91.02%	92.74%	94.42%	95.43%
33	3374 Kota Semarang	93.39%	94.71%	95.46%	89.48%	90.46%	92.40%	94.01%
34	3375 Kota Pekalongan	94.95%	93.87%	94.23%	80.69%	93.11%	95.02%	94.98%
35	3376 Kota Tegal	91.81%	92.06%	91.93%	86.17%	91.75%	93.32%	93.95%

8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Povinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (unit)				
		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	3301 Kab Cilacap	45.748	45.748	46.271	41.532	63.203
2	3302 Kab Banyumas	51.254	51.254	40.272	50.878	88.949
3	3303 Kab Purbalingga	73.715	73.715	70.446	85.966	65.567
4	3304 Kab Banjarnegara	30.011	30.011	36.151	25.651	35.301
5	3305 Kab Kebumen	52.497	52.497	53.532	48.089	50.322
6	3306 Kab Purworejo	19.701	19.701	26.543	31.079	54.858
7	3307 Kab Wonosobo	25.408	25.408	22.605	24.232	25.741
8	3308 Kab Magelang	37.505	37.505	30.576	37.149	64.818
9	3309 Kab Boyolali	33.062	33.062	36.093	37.005	17.855
10	3310 Kab Klaten	35.753	35.753	32.403	27.446	34.369
11	3311 Kab Sukoharjo	22.417	22.417	17.262	16.937	39.570
12	3312 Kab Wonogiri	45.245	45.245	38.684	20.210	35.118
13	3313 Kab Karanganyar	11.538	11.538	8.362	7.914	21.335
14	3314 Kab Sragen	21.105	21.105	17.047	15.533	40.887
15	3315 Kab Grobogan	9.610	9.610	11.129	10.580	58.405
16	3316 Kab Blora	9.872	9.872	13.203	11.944	23.934
17	3317 Kab Rembang	13.347	13.347	12.269	18.507	51.067
18	3318 Kab Pati	12.415	12.415	13.528	14.725	62.119
19	3319 Kab Kudus	19.042	19.042	18.330	17.359	23.036
20	3320 Kab Jepara	49.657	49.657	46.493	52.849	37.821
21	3321 Kab Demak	16.271	16.271	12.090	12.141	59.922
22	3322 Kab Semarang	28.987	28.987	19.504	25.010	25.291
23	3323 Kab Temanggung	33.440	33.440	27.798	43.094	33.752
24	3324 Kab Kendal	15.244	15.244	16.508	20.098	44.726
25	3325 Kab Batang	27.689	27.689	30.346	31.212	46.102
26	3326 Kab Pekalongan	45.467	45.467	41.517	39.858	31.946
27	3327 Kab Pemalang	51.334	51.334	41.469	48.835	71.689
28	3328 Kab Tegal	24.214	24.214	25.645	21.094	58.009
29	3329 Kab Brebes	14.969	14.969	13.193	18.428	50.420

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (unit)				
		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
30	3371 Kota Magelang	1.829	1.829	1.899	1.918	16.857
31	3372 Kota Surakarta	6.416	6.416	7.137	8.050	21.608
32	3373 Kota Salatiga	2.552	2.552	3.052	3.153	25.780
33	3374 Kota Semarang	12.565	12.565	12.833	11.715	53.446
34	3375 Kota Pekalongan	7.017	7.017	7.303	8.005	48.774
35	3376 Kota Tegal	5.525	5.525	3.995	3.912	23.609

9. UMKM pengguna Internet (IT) Povinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah UMKM pengguna Internet (unit)				
		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	3301 Kab Cilacap	7.786	8.774	13.928	13.386	25.749
2	3302 Kab Banyumas	8.723	9.831	12.122	16.398	36.238
3	3303 Kab Purbalingga	12.546	14.139	21.204	27.707	26.712
4	3304 Kab Banjarnegara	5.108	5.756	10.881	8.267	14.382
5	3305 Kab Kebumen	8.935	10.069	16.113	15.499	20.501
6	3306 Kab Purworejo	3.353	3.779	7.989	10.017	22.349
7	3307 Kab Wonosobo	4.324	4.873	6.804	7.810	10.487
8	3308 Kab Magelang	6.383	7.193	9.203	11.973	26.407
9	3309 Kab Boyolali	5.627	6.341	10.864	11.927	7.274
10	3310 Kab Klaten	6.085	6.857	9.753	8.846	14.002
11	3311 Kab Sukoharjo	3.815	4.300	5.196	5.459	16.121
12	3312 Kab Wonogiri	7.701	8.678	11.644	6.514	14.307
13	3313 Kab Karanganyar	1.964	2.213	2.517	2.551	8.692
14	3314 Kab Sragen	3.592	4.048	5.131	5.006	16.657
15	3315 Kab Grobogan	1.636	1.843	3.350	3.410	23.794
16	3316 Kab Blora	1.680	1.893	3.974	3.850	9.751
17	3317 Kab Rembang	2.272	2.560	3.693	5.965	20.805
18	3318 Kab Pati	2.113	2.381	4.072	4.746	25.307
19	3319 Kab Kudus	3.241	3.652	5.517	5.595	9.385
20	3320 Kab Jepara	8.452	9.524	13.994	17.033	15.408
21	3321 Kab Demak	2.769	3.121	3.639	3.913	24.412
22	3322 Kab Semarang	4.934	5.560	5.871	8.061	10.304
23	3323 Kab Temanggung	5.691	6.414	8.367	13.889	13.751
24	3324 Kab Kendal	2.595	2.924	4.969	6.478	18.221
25	3325 Kab Batang	4.713	5.311	9.134	10.060	18.782
26	3326 Kab Pekalongan	7.738	8.721	12.497	12.846	13.015
27	3327 Kab Pemalang	8.737	9.846	12.482	15.740	29.206
28	3328 Kab Tegal	4.121	4.644	7.719	6.799	23.633
29	3329 Kab Brebes	2.548	2.871	3.971	5.939	20.541
30	3371 Kota Magelang	311	351	572	618	6.868
31	3372 Kota Surakarta	1.092	1.231	2.148	2.595	8.803

No	Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah UMKM pengguna Internet (unit)				
		Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
32	3373 Kota Salatiga	434	489	919	1.016	10.503
33	3374 Kota Semarang	2.139	2.410	3.863	3.776	21.774
34	3375 Kota Pekalongan	1.194	1.346	2.198	2.580	19.871
35	3376 Kota Tegal	940	1.060	1.202	1.261	9.618

10. Tabel Statistik Deskriptif per kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah

Kab/ Kota	Statistik	PDRB	PAD	PTPP	BPD	PMDN	PMA	AK	UMKM	IT
Cilacap	mean	52	619	2163	3303	2889109	3332424	92	48500	13925
	median	51	646	1981	3330	1730249	9297	91	45748	13386
	std	5	119	374	180	2437159	8735446	1	8439	7147
	min	46	495	1751	3003	395274	2446	90	41532	7786
	max	58	758	2674	3581	6830890	23142198	94	63203	25749
Banyumas	mean	23	730	2230	3505	791950	12842	95	56521	16662
	median	23	730	2047	3601	859956	1724	95	51254	12122
	std	1	102	353	194	283226	25785	1	18728	11331
	min	21	620	1868	3201	441642	176	94	40272	8723
	max	25	889	2674	3744	1094384	70599	96	88949	36238
Purbalingga	mean	18	311	1433	2048	176738	121116	94	73882	20462
	median	18	301	1306	2079	137433	17420	94	73715	21204
	std	1	41	215	71	193287	156916	1	7534	6978
	min	17	267	1239	1925	9104	205	93	65567	12546
	max	25	889	2674	3744	1094384	363030	95	85966	27707
Banjarnegara	mean	16	278	1532	2146	220224	28530	95	31425	8879
	median	16	285	1421	2129	148609	1004	94	30011	8267
	std	1	36	186	91	192595	57564	1	4321	3829
	min	15	232	1354	2039	50645	23	93	25651	5108
	max	17	320	1782	2266	498759	153884	96	36151	14382
Kebumen	mean	15	433	1966	2826	100883	2931	95	51387	14223
	median	16	433	1748	2824	78430	0	94	52497	15499
	std	1	51	324	151	79669	7756	1	2184	4739
	min	15	352	1654	2630	17065	0	94	48089	8935
	max	17	512	2371	3034	257838	20520	96	53532	20501
Purworejo	mean	18	338	1523	2298	67048	1432	95	30376	9497
	median	18	327	1373	2265	67572	107	96	26543	7989
	std	1	63	292	116	46585	2195	2	14513	7716

Kab/ Kota	Statistik	PDRB	PAD	PTPP	BPD	PMDN	PMA	AK	UMKM	IT
	min	17	279	1207	2135	13942	0	91	19701	3353
	max	19	438	1865	2483	138975	5401	97	54858	22349
Wonosobo	mean	16	260	1377	1944	88366	8717	95	24679	6860
	median	16	243	1257	2011	16125	107	95	25408	6804
	std	1	48	238	135	109686	22567	1	25741	10487
	min	15	211	1133	1715	1689	0	95	24679	6860
	max	18	340	1727	2078	257592	59890	97	25408	6804
Magelang	mean	18	400	1689	2575	432610	7699	96	41511	12232
	median	18	406	1520	2570	197253	2493	96	37505	9203
	std	1	39	333	129	402921	13769	1	13360	8212
	min	17	325	1309	2413	125480	44	95	30576	6383
	max	20	433	2101	2721	1124874	37790	98	64818	26407
Boyolali	mean	22	402	1625	2325	888612	129608	96	31415	8407
	median	22	388	1496	2343	934628	15263	96	33062	7274
	std	1	64	234	125	386374	287489	2	7785	2815
	min	21	332	1354	2148	422074	5192	93	17855	5627
	max	24	515	1903	2472	1518220	780254	98	37005	11927
Klaten	mean	23	321	1841	2655	688891	106771	96	33145	9109
	median	23	308	1721	2804	229789	10257	96	34369	8846
	std	1	37	237	307	1034046	171455	1	3469	3108
	min	21	274	1625	2109	43752	2204	95	27446	6085
	max	25	374	2217	2973	2897471	411713	97	35753	14002
Sukoharjo	mean	30	420	1371	2138	1177698	108066	96	23721	6978
	median	30	433	1288	2089	1107151	26009	97	22417	5196
	std	2	83	156	170	536922	164492	2	9251	5154
	min	28	315	1218	1888	439117	2300	92	16937	3815
	max	33	528	1568	2393	2055378	431892	98	39570	16121
Wonogiri	mean	21	273	1763	2363	118377	54222	98	36900	9769
	median	21	256	1629	2316	58525	5272	98	38684	8678
	std	1	44	254	117	115001	101525	0	10298	3169
	min	20	224	1516	2042	41717	122	97	38684	7701
	max	22	334	2190	2541	341596	272499	98	45245	14307
Karanganyar	mean	29	360	1505	2172	922596	83146	96	12137	3587
	median	29	357	1399	2139	936568	13752	96	11538	2517
	std	1	55	203	107	599880	123327	2	5418	2864
	min	27	267	1271	2065	181965	930	94	7914	1964
	max	32	427	1762	2314	1957677	298486	98	21335	8692
Sragen	mean	29	380	1580	2258	778789	25858	95	23135	6887
	median	29	364	1498	2237	617772	5106	95	21105	5006
	std	1	75	178	113	809084	38685	2	10225	5500

Kab/ Kota	Statistik	PDRB	PAD	PTPP	BPD	PMDN	PMA	AK	UMKM	IT
	min	27	319	1401	2147	33837	1630	90	15533	3592
	max	31	537	1797	2478	2441479	92370	97	40887	16657
Grobogan	mean	14	375	1813	2542	1335546	85626	96	19867	6807
	median	14	368	1663	2553	393136	20614	96	10580	3350
	std	1	54	305	109	1706995	108023	2	21553	9532
	min	13	316	1521	2380	215709	14575	91	9610	1636
	max	15	440	2188	2687	4137736	253928	98	58405	23794
Blora	mean	21	268	1587	2166	95523	39905	97	13765	4230
	median	20	280	1493	2116	75107	347	96	11944	3850
	std	1	55	287	152	92903	100612	0	5860	3265
	min	20	200	1251	1981	2562	65	96	9872	1680
	max	21	327	1975	2396	282232	268003	97	23934	9751
Rembang	mean	21	337	1240	1900	309119	38237	96	21707	7059
	median	21	318	1119	1836	242944	16643	97	13347	3693
	std	1	42	246	94	228470	68122	4	16591	7820
	min	19	292	928	1815	74039	498	87	12269	2272
	max	23	404	1555	2038	765402	191360	98	51067	20805
Pati	mean	24	374	1927	2731	311127	237666	95	23040	7724
	median	24	384	1689	2718	221462	12871	96	13528	4072
	std	1	33	320	101	267579	541054	3	21866	9892
	min	22	326	1637	2624	106168	164	88	12415	2113
	max	26	428	2303	2900	889756	1459913	96	62119	25307
Kudus	mean	83	394	1370	2007	1218252	64291	96	19362	5478
	median	83	379	1311	1958	1034981	1914	96	19042	5517
	std	1	63	257	169	610922	126196	1	2167	2430
	min	81	324	1063	1815	583677	114	93	17359	3241
	max	84	507	1658	2245	2041677	335859	97	23036	9385
Jepara	mean	18	398	1569	2305	103344	1960046	96	47295	12882
	median	18	386	1421	2309	56968	915787	96	49657	13994
	std	2	55	293	152	104636	3322091	2	5753	3733
	min	16	331	1270	2036	8365	154454	92	37821	8452
	max	20	501	1897	2510	295572	9424590	97	52849	17033
Demak	mean	16	397	1524	2298	1440298	303403	95	23339	7571
	median	16	404	1309	2348	962321	15784	95	16271	3639
	std	1	67	334	202	970531	554220	1	20556	9425
	min	15	310	1205	1986	463883	3864	93	12090	2769
	max	17	477	1921	2493	2569159	1457304	97	59922	24412
Semarang	mean	34	474	1544	2318	1175311	458408	96	25556	6946
	median	34	480	1395	2278	1156630	23384	96	25291	5871
	std	2	88	257	200	638660	787238	1	3890	2216

Kab/ Kota	Statistik	PDRB	PAD	PTPP	BPD	PMDN	PMA	AK	UMKM	IT
	min	31	380	1284	2034	545448	3314	95	19504	4934
	max	37	598	1857	2554	2141899	1937913	98	28987	10304
Temanggung	mean	19	293	1313	1885	101210	241845	94	34305	9622
	median	19	304	1186	1911	94001	9093	97	33440	8367
	std	1	40	242	126	63839	472994	8	5509	3955
	min	18	250	1069	1670	7582	0	75	27798	5691
	max	21	363	1586	2025	172781	1277741	98	43094	13889
Kendal	mean	31	437	1536	2297	482740	730463	93	22364	7037
	median	31	425	1384	2304	311708	65813	94	16508	4969
	std	2	81	262	199	528607	1712109	1	12658	6449
	min	29	336	1258	2070	4566	6998	92	15244	2595
	max	34	601	1860	2573	1579250	4609593	95	44726	18221
Batang	mean	20	266	1242	1767	929848	1839110	94	32608	9600
	median	19	246	1143	1802	544149	964463	94	30346	9134
	std	1	41	196	109	1054799	2024463	2	7706	5635
	min	18	220	1038	1563	240596	298486	90	27689	4713
	max	21	323	1473	1891	3202162	4819684	96	46102	18782
Pekalongan	mean	17	373	1490	2221	1228892	539805	95	40851	10963
	median	17	347	1352	2161	478073	0	96	41517	12497
	std	1	64	221	164	2104480	1416721	2	5553	2527
	min	17	305	1283	2038	40784	0	92	31946	7738
	max	18	467	1801	2447	5907350	3752566	97	45467	13015
Pemalang	mean	13	344	1824	2679	223083	186368	93	52932	15202
	median	13	349	1630	2633	110095	2237	93	51334	12482
	std	1	52	297	416	239512	347110	1	11237	10037
	min	12	278	1543	2258	2033	1039	91	41469	8737
	max	14	426	2192	3508	630479	934305	94	71689	29206
Tegal	mean	16	473	1835	2684	1332925	295041	91	30635	9383
	median	16	451	1653	2777	404468	60546	91	24214	6799
	std	1	91	330	295	2761860	436017	1	15393	8103
	min	15	372	1506	2127	40784	9703	90	21094	4121
	max	17	591	2223	2951	7577239	935646	93	58009	23633
Brebés	mean	17	437	2112	3071	248779	428782	92	22396	7174
	median	17	419	1906	3126	67551	90895	92	14969	3971
	std	1	72	386	199	282628	640007	1	15781	7589
	min	16	347	1694	2768	34026	26416	90	13193	2548
	max	18	529	2557	3271	751537	1370811	93	50420	20541
Kota Magelang	mean	53	277	601	976	2447218	87334	94	4866	1744
	median	53	255	590	996	116715	1199	93	1899	572
	std	4	55	45	60	6161893	224708	2	6703	2867

Kab/ Kota	Statistik	PDRB	PAD	PTPP	BPD	PMDN	PMA	AK	UMKM	IT
	min	48	222	553	879	12966	58	91	1829	311
	max	59	377	667	1040	1641890 0	596880	96	16857	6868
Kota Surakarta	mean	69	562	1188	1938	338372	13936	95	9925	3174
	median	69	545	1134	1915	383299	2282	95	7137	2148
	std	5	157	146	215	234766	31455	1	6565	3209
	min	61	303	1028	1616	29262	89	92	6416	1092
	max	77	829	1376	2257	747796	85192	96	21608	8803
Kota Salatiga	mean	50	232	618	942	101033	87325	94	7418	2672
	median	50	227	593	949	98596	31822	95	3052	919
	std	3	24	49	50	46193	106119	2	10269	4385
	min	46	209	561	849	22520	9679	91	2552	434
	max	55	281	680	1006	178730	289111	96	25780	10503
Kota Semarang	mean	83	2298	1950	4835	5844340	825155	93	20625	6792
	median	83	2386	1815	4872	6633895	122124	93	12565	3776
	std	9	396	307	332	2650293	1746800	2	18352	8411
	min	70	1792	1641	4329	1129039	46012	89	11715	2139
	max	96	2866	2423	5256	8534748	4777159	95	53446	21774
Kota Pekalongan	mean	24	223	647	984	168706	470420	92	15623	5438
	median	24	218	632	1008	69178	532	94	7303	2198
	std	1	31	54	63	199912	1229878	5	18536	8089
	min	22	179	586	883	24335	0	81	7017	1194
	max	27	263	725	1056	502453	3259389	95	48774	19871
Kota Tegal	mean	42	325	670	1111	89475	11269	92	8513	2816
	median	42	308	691	1120	47697	1068	92	5525	1202
	std	2	46	36	121	78487	17745	3	8475	3804
	min	40	275	603	917	13495	37	86	3912	940
	max	45	416	703	1278	199990	39950	94	23609	9618

11. Hasil Regresi Model Fixed Effect

a. PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, dan AK

Dependent Variable: LPDRB
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/03/25 Time: 20:39
 Sample: 2017 2023
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 245

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.770541	0.737488	-1.044818	0.2973
LPAD	-0.057005	0.023931	-2.382088	0.0181
LPTPP	0.175112	0.032320	5.417990	0.0000
LBPD	0.188791	0.048374	3.902724	0.0001
LPMDN	-0.000594	0.002929	-0.202804	0.8395
LPMA	0.001550	0.001428	1.085944	0.2788
LAK	0.352003	0.128104	2.747790	0.0065

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.992838	Mean dependent var	3.221902
Adjusted R-squared	0.991434	S.D. dependent var	0.502387
S.E. of regression	0.046497	Akaike info criterion	-3.147300
Sum squared resid	0.441043	Schwarz criterion	-2.561375
Log likelihood	426.5443	Hannan-Quinn criter.	-2.911349
F-statistic	707.0237	Durbin-Watson stat	1.162213
Prob(F-statistic)	0.000000		

b. PDRB, PAD, PTPP, BPD, PMDN, PMA, AK, UMKM, IT, dan KOTA_IT

Dependent Variable: LPDRB

Method: Panel Least Squares

Date: 11/12/25 Time: 23:05

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 175

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.687749	0.840632	0.818134	0.4148
LPAD	-0.077388	0.030448	-2.541621	0.0122
LPTPP	0.014735	0.065158	0.226138	0.8214
LBPD	0.111758	0.058744	1.902476	0.0593
LPMDN	-0.001284	0.004224	-0.304019	0.7616
LPMA	0.000841	0.001787	0.470530	0.6388
LAK	0.427274	0.119820	3.565973	0.0005
LUMKM	-0.037643	0.038099	-0.988050	0.3249
LIT	0.054324	0.033077	1.642324	0.1029
KOTA_LIT	0.011255	0.011069	1.016725	0.3112

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.995319	Mean dependent var	3.238671
Adjusted R-squared	0.993782	S.D. dependent var	0.505002
S.E. of regression	0.039821	Akaike info criterion	-3.395583
Sum squared resid	0.207727	Schwarz criterion	-2.599865
Log likelihood	341.1135	Hannan-Quinn criter.	-3.072817
F-statistic	647.7508	Durbin-Watson stat	1.919108
Prob(F-statistic)	0.000000		